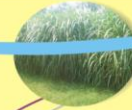




Album Peta



Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis

Tahun 2010



DAFTAR ISI

-
-
- Gambar 1 Peta Administrasi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2010
- Gambar 2 Peta Penggunaan Lahan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2009
- Gambar 3 Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2030
- Gambar 4 Peta Rencana Pola Ruang (Prioritas Pengembangan Pertanian)
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 5 Peta Rencana Pengembangan Komoditas Sub-Kawasan Cihaurbeuti
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 6 Peta Rencana Pengembangan Komoditas Sub-Kawasan Panumbangan
Kawasan Agropolitan Ciamis Tahun 2030
- Gambar 7 Peta Rencana Pengembangan Komoditas Sub-Kawasan Panjalu dan Lumbung
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 8 Peta Rencana Pengembangan Komoditas Sub-Kawasan Sukamantri
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 9 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Cihareuti
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 10 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Cihareuti (Lanjutan)
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 11 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Panumbangan
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 12 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Panumbangan (Lanjutan)
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 13 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Panjalu dan Lumbung
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 14 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Panjalu dan Lumbung (Lanjutan)
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 15 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Sukamantri
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
- Gambar 16 Peta Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Sub-Kawasan Sukamantri (Lanjutan)
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 2030
-
-



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis sebagian besar wilayah daratannya memiliki karakteristik sebagai daerah pertanian. Daerah pertanian yang sering diidentikkan dengan kawasan perdesaan dalam beberapa faktor memiliki banyak perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Diantara perbedaan yang menonjol adalah dalam hal kepadatan penduduk yang rendah dan dominasi sektor pertanian. Hingga tahun 2000, kawasan perdesaan merupakan kawasan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia.

Pengertian kawasan perdesaan menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 menggambarkan bahwa lebih dari 50 % penduduk Indonesia bermukim di kawasan perdesaan, yaitu sekitar 65%. Besarnya prosentase penduduk yang terkonsentrasi di kawasan perdesaan ini merupakan potensi sekaligus permasalahan bagi pembangunan.

1. Pertama, dari sisi produksi, desa menjadi penyedia sumberdaya manusia yang merupakan faktor produksi utama selain teknologi dan modal.
2. Kedua, dari sisi konsumsi, penduduk yang besar merupakan potensi pasar bagi produk-produk komersial.

Secara umum kawasan perdesaan identik dengan pertanian, mengandung peran ekonomi maupun kemasyarakatan yang sangat penting yang hingga kini belum dapat terpecahkan dan terealisasi secara baik dan menyeluruh. Peran yang terkandung dalam kawasan perdesaan tersebut adalah :

1. Penjamin ketersediaan pangan untuk mencapai keamanan pangan nasional, penyedia bahan mentah bagi industri, sekaligus penyedia lapangan kerja, pemberi sumbangan pada pendapatan nasional baik melalui pendapatan lokal maupun ekspor.

2. Kawasan perdesaan secara *de facto* masih harus mengemban tugas sebagai penjamin kelestarian sumberdaya dan lingkungan dan pengembang kultur daerah dalam menjaga kelestarian kebudayaan nasional.

Dalam kaitannya dengan proses produksi pangan dan bahan mentah, kawasan pedesaan merupakan konsumen bagi produk sarana produksi pertanian, produk investasi dan jasa produksi dan sekaligus sebagai pemasok bahan mentah untuk industri pengolah atau penghasil produk akhir.

Dengan cabang kegiatan ekonomi lain di depan (sektor hulu) dan dibelakangnya (sektor hilir) sektor pertanian perdesaan seharusnya terikat erat dalam apa yang disebut sebagai sistem agribisnis. Dalam perspektif agribisnis, sektor hulu seharusnya terdiri dari :

1. Perusahaan jasa penelitian
2. Perusahaan benih dan pemuliaan
3. Industri pakan, mesin pertanian, bahan pengendali hama dan penyakit, dan
4. Industri pupuk, lembaga penyewaan mesin dan alat alat pertanian, jasa pergudangan
5. Perusahaan bangunan pertanian dan asuransi, agen periklanan pertanian, mass-media pertanian, serta
6. Jasa konsultasi ilmu pertanian
7. Pandangan yang lebih maju mengharuskan adanya jasa jaminan kesehatan dan hari tua pelaku usahatani oleh koperasi petani atau lembaga yang sejenis.

Karena tingginya intensitas keterlibatan sektor perdagangan, maka di sektor hulu ini perlu juga diperhatikan peran dan fungsi organisasi dagang seperti pedagang besar, pedagang ritel, serta jasa-jasa perantara. Sektor hilir agribisnis mencakup:

1. Industri manufaktur makanan
2. Industri makanan dan hotel
3. Restoran dan toko-toko pengolah sekaligus penjual makanan

Melihat perannya yang begitu penting, kawasan perdesaan sebagai lokasi usaha tani hingga saat ini menghadapi permasalahan :

1. Sebagai pemasok hasil pertanian, sektor usahatani menghasilkan produk-produk pertanian dengan elastisitas penawaran yang rendah. Ini berarti bahwa perubahan harga produk yang terjadi di tingkat eceran direspon lambat oleh sektor usahatani. Ini menyebabkan kawasan perdesaan kurang bisa mengoptimalkan peluang pasar secara tepat waktu.
2. Sudah menjadi ciri khas produk pertanian juga bahwa bagian harga akhir yang diterima petani sangat rendah. Ini disebabkan rendahnya peran penciptaan nilai tambah oleh pelaku usaha tani terhadap produk-produk



akhirnya. Karena rendahnya bagian harga yang diterima kawasan perdesaan, rendah juga penerimaan, yang lebih lanjut menyebabkan rendahnya pendapatan bersih usaha tani. Akibatnya, adalah sulit diharapkan terjadinya pemupukan modal yang terjadi dari dalam masyarakat perdesaan sendiri. Rendahnya pemupukan modal menyebabkan rendahnya investasi masyarakat.

Beberapa upaya pemerintah dilakukan untuk memecahkan daya beli perdesaan dengan berbagai pendekatan baik yang berupa kebijakan harga maupun non harga. Berbagai skema kebijakan untuk merealisasikan campur tangan ini sudah dijalankan dari yang bersifat parsial, maupun yang bersifat komprehensif dalam bentuk program pembangunan perdesaan terpadu.

Namun, jika semuanya diukur dengan indikator dampak pembangunan, misalnya dalam bentuk peningkatan pendapatan riil per rumah tangga, peningkatan indeks kualitas hidup, harus diakui bahwa upaya-upaya dimaksud masih belum mampu menjawab permasalahan peningkatan kesejahteraan perdesaan secara nyata. Klaim ini diperkuat oleh kenyataan bahwa lebih dari 70% rakyat kita hidup di perdesaan, sekitar 50% dari total angkatan kerja nasional menggantungkan nasibnya bekerja di sektor pertanian, dan 80% dari rakyat hanya mengenyam pendidikan formal tertinggi setingkat sekolah dasar (SD) dan kesenjangan (gap) produktivitas antara sektor pertanian dengan industri semakin lebar. Kesenjangan produktivitas tersebut diikuti dengan kesenjangan antar golongan rumah tangga, kesenjangan pendapatan per kapita antara desa dan kota, dll.

Selama ini pembangunan suatu wilayah masih mendikotomikan antara kawasan perkotaan. Pembangunan kawasan perdesaan masih dipisahkan secara tegas dengan kawasan lainnya seakan-akan kawasan perdesaan sama sekali terlepas secara fungsional dari sistem perkotaan. Demikian juga sebaliknya untuk pengembangan kawasan perkotaan selama ini selalu melupakan keberadaan kawasan perdesaan sebagai suatu sistem yang menyeluruh.

Kenyataan lain yang terjadi menegaskan bahwa pembangunan hanya terarah pada kawasan perkotaan dengan berbagai eksekusi yang disebut urban bias (Lipton, 1977). Urban bias adalah suatu deskripsi tentang diskriminasi terhadap sektor pertanian dan wilayah perdesaan. Urban bias terjadi akibat kecenderungan pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi melalui kutub-kutub pertumbuhan yang semula diramalkan akan memberikan dampak tetesan (*trickle down effect*) kepada kawasan hinterland-nya. Namun yang terjadi malah gejala pengurasan yang besar (*masive backwash effect*) desa oleh kawasan perkotaan.

Dengan perkataan lain dalam ekonomi telah terjadi transfer netto sumberdaya dari wilayah pedesaan ke kawasan perkotaan secara besar-besaran. Eksekusi yang terjadi adalah: migrasi desa - kota yang tak terkendali, pengkumuhan kawasan perkotaan, pengangguran kota dan desa (Serageldin, 1996).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk memecahkan persoalan ini. Alternatif solusi atas masalah ini bisa dilakukan dengan cara campur tangan



pemerintah dalam bentuk upaya agar proses penciptaan nilai tambah terjadi di tingkat perdesaan itu sendiri. Artinya, kawasan perdesaan harus didorong menjadi kawasan yang tidak hanya menghasilkan bahan primer pangan dan serat, melainkan juga mampu menghasilkan bahan-bahan olahan atau industri hasil pertanian. Namun, penciptaan nilai tambah ditingkat perdesaan sendiri belum cukup menjamin apabila tidak ada jaminan bahwa proses itu dilakukan oleh petani atau dengan peran aktif petani sendiri.

Karena merealisasikan ide ini memerlukan investasi cukup besar oleh pihak perdesaan, dan pada saat yang sama keberadaan modal sulit diharapkan ditingkat perdesaan, akan sulit pula terjadi apabila pelaksanaan tanpa campur tangan pihak luar. Oleh karena itu diperlukan adanya kemitraan antar petani perdesaan, pelaku usaha bermodal dan pemerintah. Pola kemitraan semacam (kemitraan permodalan, produksi, pengolahan, pemasaran) akan menjamin terhindarnya eksploitasi pelaku usahatani di tingkat perdesaan oleh pelaku usaha lain di satu pihak, dan memungkinkan terjadinya nilai tambah yang bisa dinikmati pelaku usahatani. Ini akan menjamin peningkatan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan memungkinkan kawasan perdesaan melakukan investasi baik yang berupa pendidikan, maupun penciptaan lapangan usaha baru. Inilah yang dimaksud dengan dampak ganda (multiplier effect) dari penciptaan nilai tambah di tingkat perdesaan.

Dari berbagai alternatif model pembangunan, konsep agropolitan dipandang sebagai konsep yang menjanjikan teratasnya permasalahan ketidakseimbangan perdesaan-perkotaan selama ini. Secara singkat, agropolitan adalah suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan kota di wilayah pedesaan, sehingga mendorong "urbanisasi" (pengkotaan dalam arti positif), yang bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti migrasi desa-kota yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran massif sumberdaya alam, pemiskinan desa dll. Agropolitan menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanism ke dalam lingkungan pedesaan yang spesifik. Pendekatan ini bisa mendorong penduduk perdesaan tetap tinggal di pedesaan melalui investasi di wilayah pedesaan.

Agropolitan bisa mengantarkan tercapai tujuan akhir menciptakan daerah yang mandiri dan otonom, dan karenanya mengurangi kekuasaan korporasi trans-nasional atas wilayah lokal. Kepentingan lokal seperti ini akan dapat menjadi pengontrol kekuasaan pusat ataupun korporasi yang bersifat subordinatif. Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis secara keseluruhan, yaitu kawasan yang mencakup beberapa kecamatan yang terikat secara fungsional mengembangkan sektor ekonomi unggulan secara terpadu.

Dalam mengembangkan Kawasan Agropolitan yang masih bersifat pengembangan awal suatu pusat pertumbuhan dibutuhkan suatu konsep pengembangan tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan kondisi yang secara potensial dapat langsung dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan



wilayah. Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis masih merupakan embrio suatu pusat pertumbuhan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan konsep pengembangan yang khusus pula. Konsep pengembangan agropolitan diharapkan menjadi suatu konsep yang dapat dipakai dalam pengembangan Kabupaten Ciamis secara keseluruhan karena konsep agropolitan merupakan konsep pengembangan yang didasarkan basis ekonomi kawasan pertanian dengan dilengkapi oleh fasilitas yang lebih bersifat urban.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis ini adalah untuk memantapkan operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, mendapatkan pedoman dalam pengembangan kawasan agropolitan secara lebih mendetail sekaligus sebagai salah satu dasar dalam penetapan kebijakan percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkage*) dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.

Tujuan pekerjaan penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan ini antara lain :

1. Mengembangkan kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis;
2. Mewujudkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan yang berkualitas, aplikatif dan optimal sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
3. Mewujudkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah serta kemampuan daya dukung lingkungan;
4. Mewujudkan keteraturan ruang didalam kawasan agropolitan;
5. Mewujudkan suatu sistem linkage kegiatan yang saling mendukung mulai dari kegiatan pengembangan infrastruktur untuk mendukung agrobisnis termasuk memberikan suatu pedoman kegiatan pembangunan;
6. Mewujudkan suatu rencana tindak yang tertuang dalam program jangka pendek dan menengah mengenai pengembangan kawasan agropolitan.
7. Mewujudkan Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan yang mampu memformulasikan antara kepentingan masyarakat luas termasuk swasta dengan kecenderungan kewilayahan dan daya dukung kawasan sehingga diperoleh suatu pedoman yang bersifat partisipatif, aspiratif dan akomodatif.

Sasaran pokok dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan ini adalah tersusunnya suatu produk rencana sebagai salah satu



instrumen bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis maupun Provinsi Jawa Barat dalam pembuatan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu kawasan, dengan mengacu pada sumberdaya yang dimiliki sebagai modal dasar dalam percepatan pembangunan wilayah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka/struktur permasalahan dan potensi fisik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada pada lingkungan tersebut :
2. Menyusun formula analisis potensi dan prospek pengembangan kawasan;
3. Menyusun konsep pengembangan kawasan dengan berbasis pada konsep agropolitan secara mendetail dengan mencakup seluruh aspek potensi yang ada dalam kawasan;
4. Menyusun konsep pengembangan kawasan dalam tinjauan infrastruktur pendukung kegiatan agropolitan;
5. Menyusun rencana tindak (*action plan*) pengembangan kawasan yang dijabarkan secara detail dalam program jangka pendek dan menengah.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari tersusunnya Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan ini antara lain :

1. Tersedianya data dan informasi bagi Pemerintah Daerah mengenai potensi kewilayahan yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
2. Tersedianya suatu rumusan yang mengatur rencana penataan kawasan dan hubungan fungsional antar kegiatan dalam kawasan;
3. Tersedianya suatu rencana tindak dalam rencana jangka pendek dan jangka menengah;
4. Tersedianya suatu formula yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat mengenai pengembangan sistem kelembagaan.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Kawasan Perencanaan

Kawasan perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, meliputi lima kecamatan, 38 desa. Secara lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 1.1** berikut.



Gambar 1.1

Ruang lingkup wilayah studi



1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Lingkup materi pekerjaan penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan mencakup :

- a. Pengumpulan data dan informasi tentang kondisi eksisting dan perkembangan kawasan;
- b. Kegiatan tahap ini bertujuan untuk menginventarisir informasi baik kuantitatif maupun kualitatif berkaitan dengan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis. Kegiatan inventarisasi data dan informasi ini dilakukan melalui kegiatan survai primer dan survai sekunder serta kajian beberapa literatur dan studi pekerjaan sejenis dan studi terkait lainnya;
- c. Penalaran atau analisis keadaan dan perkembangan kawasan dari aspek fisik, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan kewilayahan serta aspek lainnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kawasan;
- d. Kegiatan pada tahap ini merupakan upaya mengidentifikasi potensi dan permasalahan kawasan perencanaan. Identifikasi potensi dan permasalahan pengembangan kawasan perencanaan merupakan hasil analisis terhadap data dan informasi yang terkait dengan kondisi dan karakteristik wilayah dan kawasan. Secara lebih spesifik, kajian potensi dan permasalahan wilayah akan menunjukkan daya dukung fisik wilayah (kesesuaian lahan, hidrologi dan kerawanan bencana) bagi pengembangan kegiatan pertanian, peluang pengembangan usaha dan agribisnis pertanian (komoditas unggulan dan peluang pasarnya), kelembagaan usaha pertanian, daya dukung sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penunjang. Selain itu, dirumuskan pula struktur ruang (kegiatan dan sistem kota-kota) sebagai masukan bagi arahan pengembangan ruang dalam penjabaran konsep pengembangan agropolitan;
- e. Penyusunan materi rencana berupa kebijakan umum dan strategi dasar pengembangan kawasan dari aspek fisik, poleksosbudhankam, serta alternatif konsep pengembangan kawasan yang bersifat teknis maupun non teknis yang dapat dijabarkan secara operasional yang dituangkan dalam rencana jangka pendek dan jangka panjang serta didukung oleh perangkat pendukung baik berupa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun dalam bentuk rencana yang lebih teknis yang bersifat geometrik.
- f. Pada tahap perumusan rencana dan tahapan pengembangan ini dihasilkan rencana penetapan dan pengembangan kawasan agropolitan serta kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pendukung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan ini.



1.5 Metodologi Pekerjaan

Dalam menyusun rencana pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, perlu ditempuh beberapa tahapan kegiatan sebagai upaya pendekatan. Tahapan tersebut meliputi :

1. Identifikasi permasalahan pengembangan.
2. Review kebijakan, studi literatur, serta kajian teoritis terkait.
3. Identifikasi kawasan perencanaan.
4. Identifikasi sistem agribisnis dan sistem pendukung.
5. Identifikasi karakteristik kawasan agropolitan.
6. Rumusan potensi dan permasalahan.
7. Perumusan tujuan, konsep dan strategi pengembangan.
8. Rencana pengembangan kawasan.
9. Arahan pemanfaatan ruang.
10. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

1.6 Keluaran Hasil Pekerjaan

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan ini harus didasarkan pada beberapa prinsip dan ketentuan teknis perencanaan sebagai berikut :

- a. Kawasan perencanaan mencakup lima kecamatan yang terdiri dari 38 desa di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis;
- b. Penetapan rencana mencerminkan konsep-konsep dasar pengembangan kawasan agropolitan;
- c. Penetapan program pembangunan dalam kawasan agropolitan mencerminkan adanya sistem keterkaitan antar elemen kegiatan dan bersinergi dengan program yang lebih makro;

Didasarkan pada prinsip dan ketentuan teknis diatas, maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini minimal mencakup aspek-aspek berikut :

- a. Arah pengembangan. Dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan ini, arah pengembangan yang diharapkan adalah adanya suatu konsep pengembangan kawasan agropolitan yang mengacu pada konsep :
 - Pemberdayaan masyarakat;
 - Meningkatkan agrobisnis komoditi unggulan;
 - Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agrobisnis dan industri pertanian;



- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang bersifat strategis;
- b. Rencana Kawasan.
1. Merumuskan strategi pengembangan kawasan yang mencakup :
 - Pembagian zoning kawasan berdasarkan potensi dominan yang dimiliki oleh masing-masing kawasan, seperti zoning kawasan wisata, zoning kawasan budidaya perikanan, zoning kawasan pertanian dan perkebunan dll;
 - Menjabarkan secara sistematis mengenai hubungan antar zoning dalam mendukung fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan;
 - Penentuan pola dan struktur ruang kawasan;
 - Penentuan strategi pengembangan dan pemenuhan kebutuhan prasarana terutama untuk mendukung fungsi wilayah sebagai kawasan agropolitan;
 - Penentuan strategi penatagunaan tanah, air dan udara yang mencakup unsur penguasaan lahan, perencanaan–pemanfaatan–pengendalian rencana tata ruang;
 - Strategi penanganan permasalahan lingkungan;
 2. Merumuskan rencana tata ruang kawasan agropolitan
 - Memetakan sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan (komoditi unggulan atau potensial) atau telah berkembang diversifikasi usaha komoditi unggulannya;
 - Rencana penyediaan sarana dan prasarana agrobisnis yang memadai untuk mendukung perkembangan sistem dan usaha agrobisnis;
 - Memformulasikan rencana kelestarian lingkungan hidup, baik sumberdaya alam, sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa supaya lebih terjamin;
 - Rencana pemanfaatan lahan;
 - Rencana pengembangan utilitas dalam kawasan agropolitan;
 - Perangkat administratif pengendalian program dan rencana, berupa perangkat administratif untuk mengendalikan pelaksanaan rencana yang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahap pelaksanaan, karena berbagai hal tetapi masih dapat memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lahan, kapasitas prasarana lingkungan, dan masih sejalan dengan rencana dan program penataan kawasan. Perangkat tersebut misalnya penerapan insentif dan disinsentif, pengalihan hak membangun dalam batas tertentu dsb;

3. Merumuskan program pembangunan kawasan agropolitan dengan mengacu pada skala prioritas pembangunan dan tahapan pelaksanaan program.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis ini terdiri dari 7 bab, yaitu :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Dasar Pertimbangan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 3 Potensi dan Persoalan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 4 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 5 Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 6 Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan

Bab 7 Indikasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan



Bab 2

Dasar Pertimbangan Pengembangan Kawasan Agropolitan

2.1 Pengertian dan Pemahaman Tentang Agropolitan

2.1.1 Pengertian Agropolitan

Agropolitan terdiri dari kata agro (pertanian) dan kata politan (polis = kota), sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dimana kawasan pertanian tersebut memiliki fasilitas seperti layaknya kawasan perkotaan.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.

Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan. Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan.

Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.



2.1.2 Ciri dan Persyaratan Kawasan Agropolitan

Berdasarkan Undang Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan system permukiman dan system agribisnis. Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Agropolitan adalah suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan kota di wilayah pedesaan, sehingga mendorong urbanisasi, yang bisa menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti yang selama ini kita saksikan: migrasi desa-kota yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran massif sumberdaya alam, pemiskinan desa dll.

Secara ilustratif kawasan agropolitan digambarkan oleh batasan teknik berikut :

- Kawasan pertanian yang meliputi distrik-distrik agropolitan;
- Kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km²;
- Berbatas radius maksimal 10 km,;
- Kawasan yang berpenduduk antara 50.000 – 150.000 jiwa;

Adapun ciri dari kawasan agropolitan :

- Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan kegiatan pertanian (agribisnis)
- Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan-pertanian atau agribisnis termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agibisnis hulu (saran pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- Hubungan antara kota dan daerah-daerah hinterland daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interdependensi/timbal balik yang harmonis, dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungann (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.

Syarat kawasan agropolitan :

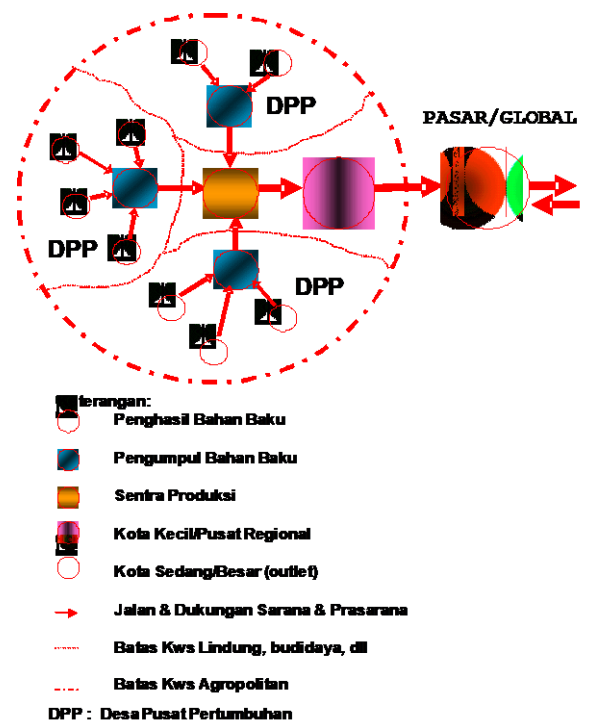
- Memiliki lahan yang didukung oleh Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai dan telah memiliki komoditi unggulan yang sesuai budaya lokal
- Memiliki Kelembagaan dan Prasarana/Sarana Agribisnis



- Pasar (pasar untuk hasil pertanian, sarana pertanian, pasar lelang/sub terminal agribisnis)
- Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank/LKM)
- Balai penyuluhan pertanian sebagai klinik konsultasi agribisnis (tempat percontohan agribisnis, sumber informasi, dan pusat pemberdayaan dan penyuluhan usaha agribisnis)
- Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis (termasuk inovasi teknologi tepat guna untuk teknologi pertanian dan produk olahannya)
- Prasarana aksesibilitas (jalan, irigasi, dsb)
- Memiliki Kelembagaan Petani (koperasi, Asosiasi Petani./Gapoktan, Kelompok Tani, Kelompok Usaha)
- Memiliki Sarana dan Prasarana umum (listrik, telepon, dsb)
- Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial

2.1.3 Konsep Kawasan Agropolitan

Konsep agropolitan dipandang sebagai konsep yang menjanjikan teratasinya permasalahan ketidakseimbangan perdesaan–perkotaan. Agropolitan menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanisme ke dalam lingkungan pedesaan yang spesifik. Pendekatan ini bisa mendorong penduduk perdesaan tetap tinggal di pedesaan melalui investasi di wilayah perdesaan. Penerapan konsep pengembangan agropolitan sebagai refleksi dari konsep pembangunan dari bawah (development from below), bukanlah konsep yang baru. Konsep ini pada dasarnya merupakan reaksi terhadap konsep pembangunan dari atas (development from above) yang cenderung menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan industrialisasi yang dalam beberapa hal menimbulkan eksese urban bias. Dengan demikian mengingat kawasan agropolitan ini merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis maka konsep pengembangan kawasan agropolitan diharapkan menjadi suatu konsep yang dapat dipakai dalam pengembangan Kabupaten Ciamis secara keseluruhan.



Gambar 2.1
Konsep
Pengembangan
Kawasan
Agropolitan

Bagian ini menjabarkan latar belakang dikembangkannya konsep agropolitan yang pada lima tahun terakhir ini menjadi salah satu konsep yang banyak dikembangkan pada beberapa wilayah di Indonesia khususnya yang memiliki economic base di sektor primer. Pada bagian selanjutnya dijabarkan konsepsi pengembangan kawasan agropolitan serta kebutuhan dukungan perangkat kelambagaan serta faktor penunjang lainnya.

Konsep pengembangan agropolitan meliputi beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

A. Prinsip Dasar

Pada prinsipnya konsep agropolitan development bertujuan untuk mengembangkan kegiatan pertanian sebagai sektor utama lokal pada suatu wilayah dengan mengikutsertakan bagian terbesar penduduknya sebagai subyek pembangunan. Sedangkan konsep local economic development adalah suatu konsep yang menekankan perlunya menciptakan lapangan kerja bagi kepentingan penduduk lokal dengan memanfaatkan sumberdaya (alam, manusia, modal) setempat. Kedua konsep ini mengutamakan upaya pemberdayaan kekuatan lokal apabila kepentingan kekuatan lokal berbenturan dengan kekuatan ekonomi asing.

Dalam konsep agropolitan development dikembangkan pemahaman tentang suatu agropolitan district yakni suatu wilayah teritorial yang perekonomiannya dasarnya pertanian dan mempunyai satu Agropolis atau kota pertanian yang melayani seluruh

Gambar 2.2



keperluan serta merupakan pusat pengolahan hasil pertanian dalam agropolitan district. Kota tersebut berpenduduk sekitar 10.000 - 25.000 orang, serta keseluruhan wilayah berpenduduk sekitar 50.000 - 150.000 orang. Agropolitan district memiliki sistem pemerintahan yang berdiri sendiri dan terintegrasi. Untuk menghindari backwash effect dari wilayah yang lebih maju, agropolitan district ini secara selektif tertutup dari hubungan khusus dengan wilayah lainnya (selective spatial closure) (Nurzaman, 2002 : 6).

Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem

jaringan sumber daya air. Pola ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran pemanfaatan ruang kawasan, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya.

Ini diharapkan menjadi barrier terjadinya perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan, sehingga mendorong mereka tinggal ditempat dan menjadi investor di lingkungannya. Dengan konsep ini, pada beberapa wilayah perdesaan yang akan menjadi pilot project, lingkungan permukiman yang ada sekarang akan diubah menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan Agropolis atau kota pertanian, yang mana dalam perencanaannya meliputi berbagai aspek seperti penataan kawasan, penentuan sentra-sentra komoditi unggulan, penataan jaringan jalan, pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan, pengembangan industri yang berorientasi kepada agroindustri dan lain-lain.

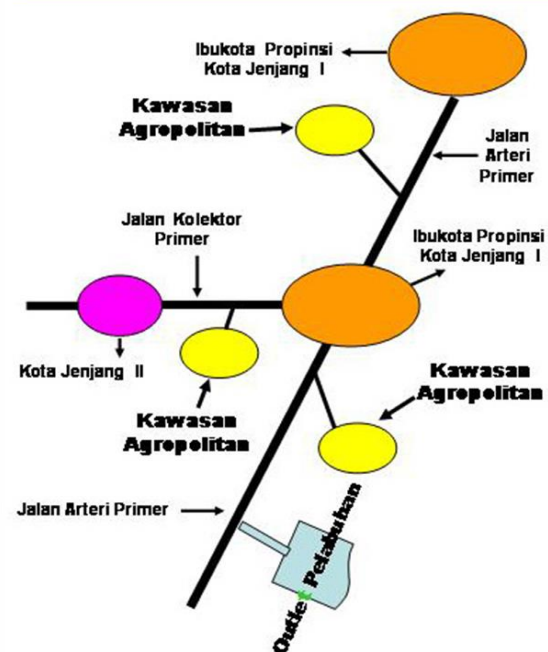
Konsep Agropolitan tidak dimaksudkan untuk merubah secara total atau mengganti konsep perencanaan yang telah ada, tetapi justru untuk mencoba melengkapi celah-celah perencanaan yang masih belum jelas seperti yang masih bersifat umum yang tercantum didalam RPJM maupun RPJP.

Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah, konsep pengembangan kawasan agropolitan akan meliputi hal-hal berikut ini :

- Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian (*agricultural trade/transport center*), penyedia jasa pendukung pertanian (*Agriculture support services*), pasar konsumen produk non pertanian (*non agriculture consumers market*), pusat industri pertanian (*agro based industry*), Penyedia pekerjaan non pertanian (*non agricultural employment*) dan pusat agropolitan serta hinterlannya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi dan kabupaten.
- Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian (*agricultural production*), intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*), pusat pendapatan pedesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand fo agricultural goods and services*) dan produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversivication*).

Gambar 2.3

**Kawasan Agropolitan
Dalam Sistem Pemasaran**



- Penetapan sektor unggulan, yaitu merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya, kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar dan mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor.

Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi). Dukungan sistem kelembagaan, yaitu dukungan kelembagaan pengelola.

B. Batasan Kawasan Agropolitan

Mengingat konsep yang mendasari pengembangan kawasan agropolitan adalah konsep spasial, maka kawasan agropolitan tidak harus identik dengan dengan sebuah kota dalam batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan economic of scale dan economic of scope. Dimungkinkan bahwa sebuah kawasan agropolitan meliputi irisan wilayah dari beberapa kota/kabupaten atau bagian wilayah kota/kabupaten yang berdekatan.

Karena itu, penetapan kawasan agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah. Dengan demikian bentuk dan luasan kawasan agropolitan dapat meliputi satu wilayah desa/kelurahan atau kecamatan atau beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota lain yang berbatasan.

2.2 Kabupaten Ciamis ditinjau Dari Konsep Agropolitan

Sesuai dengan kebijakan nasional pengembangan agropolitan yang bertolak dari berbagai indikasi kegagalan penerapan konsep pengembangan industri yang dipercepat, maka pemerintah pusat merasa perlu untuk mereformulasi arahan kebijakan pengembangan wilayah ke arah *community based development*.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara historis sebagian besar wilayah daratannya memiliki karakteristik sebagai daerah pertanian. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi, pusat-pusat pertumbuhan kawasan berubah menjadi pusat kegiatan yang pada akhirnya menjadikan tumbuhnya kota-kota baru. Untuk menjaga keseimbangan pesatnya pertumbuhan kota dan desa (yang sebagian besar merupakan daerah pertanian), diperlukan kebijakan yang tetap menjaga keseimbangan pesatnya pertumbuhan kota dan desa (yang sebagian besar merupakan daerah pertanian), diperlukan kebijakan yang tetap menjaga keseimbangan pergerakan ekonomi, lingkungan serta membatasi terjadinya urbanisasi.



Arahan kebijakan tersebut antara lain meliputi :

- Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara merata, sehingga tidak semata-mata hanya dilihat dari kemampuan peningkatan PAD atau PDRB saja;
- Usaha yang intensif untuk menambah kapasitas produksi daerah perdesaan, yang diarahkan pada upaya untuk memenuhi bahan makanan dengan tenaga sendiri (*self-sufficiency*);
- Ketergantungan terhadap dunia luar dikurangi seminimal mungkin;
- Tiap usaha harus diarahkan untuk memperluas pasar dalam negeri, dan memperluas lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan;
- Penekanan pembangunan pada pengolahan sumber-sumber lokal.
- Perbedaan pendapatan antara golongan atas dan golongan bawah harus diperkecil;

Strategi yang mencakup unsur-unsur di atas dikenal sebagai strategi pembangunan wilayah perdesaan yang dipercepat. Konsep ini mencoba menerapkan pengembangan wilayah yang berbasis kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, perlu diutamakan pengembangan yang mengandalkan sepenuhnya pada sumberdaya alam dan keahlian setempat (lokal). Alternatif konsep pengembangan tersebut dikenal dengan konsep pengembangan *development from below*, dengan berbagai bentuk rinci pengembangan antara lain konsep *agropolitan development* dan konsep *local economic development*. Dimana sektor pertanian yang dijadikan andalan program ini akan menyentuh subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Diawali pada tahun 2002, program yang melibatkan berbagai elemen yang lintas sektoral ini, telah di ujicobakan di 8 (delapan) provinsi, dengan alokasi dana dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebesar lebih kurang Rp. 6,1 Milyar, sebagai stimulan program rintisan yakni di : (i) Kabupaten Agam (Sumatera Barat); (ii) Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu); (iii) Kabupaten Cianjur (Jawa Barat); (iv) Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta); (v) Kabupaten Bangli (Bali); (vi) Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan); (vii) Kabupaten Boalemo (Gorontalo); (viii) Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Selatan).

Kabupaten Ciamis, yang termasuk ke dalam Kawasan Andalan Priangan Timur Propinsi Jawa Barat memiliki *economic base* di sektor primer (sektor pengolahan sumber daya alam), tentu layak untuk dijadikan kawasan agropolitan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu :

1. Karakteristik Fisik dan Penggunaan Lahan
 - a. Jenis tanah yang didominasi oleh Latosol & Andosol Coklat dengan pH 5-7, yang sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian
 - b. Iklim Tropis dengan suhu rata-rata 28°C dan Curah Hujan rata-rata 452,1 mm/tahun
 - c. Topografi 45% pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian 450-1000 m dpl
 - d. Penggunaan lahan didominasi oleh kebun campur seluas 43.585,83 Ha, kemudian perkebunan seluas 34.645,86 Ha, dan sawah seluas 27.578,25 Ha.

2. Karakteristik Kependudukan, dimana salah satu sektor kependudukan yaitu mata pencaharian penduduk didominasi oleh petani dengan presentase 75 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Ciamis.
3. Karakteristik Ekonomi, dimana sector pertanian merupakan sector yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Ciamis dari tahun 2003 – 2007, yaitu sebesar Rp1.916.926.251,00 (tahun 2003), Rp.1.963.214.473 (tahun 2004), Rp.2.020.655.969 (tahun 2005) Rp.2.011.181.945 (tahun 2006) dan Rp.2.063.609.037 (tahun 2007), dan hampir setiap tahunnya itu mengalami kenaikan sekitar 10%.

Adapun dasar kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis diawali dengan posisi Kabupaten Ciamis dalam konteks keruangan nasional dan kemudian konteks keruangan Propinsi Jawa Barat dimana Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Sistem Kota – Kota di Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran

2.3 Kebijakan Kabupaten Ciamis

2.3.1 Kabupaten Ciamis dalam Konteks Keruangan Nasional

Berdasarkan konteks keruangan Nasional pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), dalam PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN, terdapat 2 (dua) aspek menonjol yang dapat dikaitkan dengan keberadaan Kabupaten Ciamis, yaitu penetapan kawasan andalan dan sistem pusat – pusat permukiman perkotaan:

1. Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Definisi PKL pada Kabupaten Ciamis adalah sebagai pusat pengembangan dan pengelolaan yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan pusat jasa keuangan/ bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, pusat pengelolaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan, bersifat khusus yang mendorong perkembangan sektor strategis.
2. Kabupaten Ciamis mencakup Kawasan Andalan Priangan Timur dan sekitarnya (bersama – sama dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Garut) serta Kawasan Andalan Pangandaran dan sekitarnya, dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, industri, perkebunan dan kehutanan serta pariwisata. Seperti terlihat dalam gambar dibawah ini. Sedang untuk jenis sektor unggulan yang mencakup kota – kota dengan tingkatan hirarki dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 2.1
Sektor Unggulan Dan Cakupan Wilayah Kawasan Andalan
Propinsi Jawa Barat

Kawasan Andalan	Sektor Unggulan	Kota – Kota Yang Tercakup		
1. Kawasan Penyangga DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri ▪ Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekasi (PKW) ▪ Depok (PKL) ▪ ParungPanjang (PKL) ▪ Cileungsi (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tambun (PKL) ▪ Cibitung (PKL) ▪ Serang (PKL) ▪ Plered (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Purwakarta (PKL) ▪ Cikampek (PKL) ▪ Cikarang (PKL) ▪ Jatiluhur (PKL)
2. Kawasan Bopuncur dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bogor (PKW) ▪ Cianjur (PKL) ▪ Cipanas (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cisarua (PKL) ▪ Ciampea (PKL) ▪ Cibinong (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cisarua (PKL) ▪ Citeureup (PKL)
3. Kawasan Sukabumi dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perikanan ▪ Pariwisata ▪ Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sukabumi (PKW) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelabuhan Ratu (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cibadak (PKL)
4. Kawasan Cekungan Bandung dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri ▪ Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pariwisata ▪ Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bandung (PKN) ▪ Cimahi (PKL) ▪ Padalarang (PKL) ▪ Lembang (PKL) ▪ Majalaya (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cileunyi (PKL) ▪ Banjaran (PKL) ▪ Soreang (PKL) ▪ Pangalengan (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciwidey (PKL) ▪ Ciparay (PKL) ▪ Sumedang (PKL) ▪ Subang (PKL)
5. Kawasan Cirebon – Indramayu dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri ▪ Perikanan ▪ Perkebunan ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cirebon (PKW) ▪ Indramayu (PKL) ▪ Palimanan (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jatibarang (PKL) ▪ Sumber (PKL) ▪ Majalengka (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuningan (PKL) ▪ Ciledug (PKL)
6. Kawasan Priangan Timur dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Pangan ▪ Industri ▪ Perkebunan ▪ Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tasikmalaya (PKW) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Garut (PKL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciamis (PKL)
7. Kawasan Pangandaran dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pangandaran (PKW) 		

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.1

Peta

Kawasan Andalan Jawa Barat



2.3.2 Kabupaten Ciamis dalam Konteks Keruangan Propinsi Jawa Barat

RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 menyatakan Kabupaten Ciamis sebagai Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang berfungsi sebagai pertanian tanaman pangan, industri, perkebunan dan kehutanan dengan skala pelayanan nasional atau beberapa propinsi, yang mana berdasarkan PKL pemanfaatan lahan lebih cenderung pada kawasan Budidaya.

Rencana Pengembangan Sistem Kota – Kota di Kawasan Andalan Priangan Timur dan Pangandaran

Dalam mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan perencanaan tata ruang antara propinsi dengan kabupaten/kota dan mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan sektoral atau wilayah, maka diperlukan tinjauan khusus terhadap kebijakan struktur tata ruang Kabupaten Ciamis berdasarkan RTRWP Jawa Barat Tahun 2002 – 2010.

Dengan dikenalkan dan digalakkan pemahaman kawasan andalan sesuai dengan RTRWN Tahun 1997, seperti yang telah diungkapkan di atas, maka dalam kajian RTRWP Jawa Barat Tahun 2002, terdapat 2 (dua) kawasan andalan dengan wilayah administrasi termasuk dalam Kabupaten Ciamis, yaitu:

1. Kawasan Andalan Priangan Timur dan sekitarnya dengan Kota Tasikmalaya sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan Kota Ciamis – Garut adalah PKL (Pusat Kegiatan Lokal).
2. Kawasan Pangandaran dan sekitarnya yang merupakan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)

Secara menyeluruh pengembangan sistem kota – kota bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai fungsi yang diembannya, serta mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung struktur tata ruang yang telah direncanakan.

Penjabaran rencana, sasaran serta arahan pengembangan sistem kota – kota yang berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut ini :

- a) Menata dan mengarahkan perkembangan pusat – pusat kegiatan di bagian Utara dan Tengah.
- b) Mengembangkan secara terbatas pusat – pusat kegiatan di bagian Selatan.
- c) Menata distribusi PKN dan PKW yang mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah.

Sasaran Rencana pengembangan kota – kota adalah:

- a) Berkembangnya 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi:
 - Metropolitan Bogor – Depok – Bekasi (Bodebek)
 - Metropolitan Bandung
 - Metropolitan Cirebon.
- b) Berkembangnya 6 (enam) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - Metropolitan Cianjur – Sukabumi,
 - Cikampek – Cikopo,

- Pelabuhanratu
- Tasikmalaya,
- Kadipaten,
- Pangandaran.

Wilayah Kabupaten Ciamis terbagi dalam 2 kawasan yaitu Kawasan Andalan Pangandaran dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Pangandaran dan Kawasan Andalan Priangan Timur dengan PKW adalah Tasikmalaya, dimana Ciamis diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL).

Arahan pengembangan untuk kawasan andalan:

- 1) Priangan Timur dan Sekitarnya, adalah:
 - a) Mewujudkan Kawasan Andalan Priangan Timur menjadi sentra bisnis dengan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pada sektor agrobisnis, industri, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, kehutanan dan pariwisata.
 - b) Tujuan pengembangan:
 - Membantu permodalan, peralatan, keterampilan dan manajemen petani.
 - Menumbuhkan dan mengembangkan sistem jaringan produksi.
 - Meningkatkan pola kemitraan dan kelembagaan usaha.
 - Meningkatkan pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan marginal.
 - Meningkatkan komoditi unggulan yang berorientasi ekspor.
 - Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan produksi agrobisnis.
 - Membangun keterkaitan sektor agrobisnis dengan sektor produktif lainnya.
 - Membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
 - c) Sasaran pengembangan:
 - Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyediaan revolving fund seperti kredit usaha tani dan pola kerjasama usaha tani sistem bagi hasil,
 - Terselenggaranya pelatihan keterampilan dibidang budidaya, panen, dan pasca panen serta pengolahan hasil pertanian dan teknik unggulan, seperti penanggahan ternak unggas dan sapi potong/perah serta industri kecil makanan olahan.
 - Tersediaanya alat mesin pertanian melalui usaha kelompok.
 - Pengoptimalan fungsi kelembagaan, pelayanan informasi, dan penyuluhan dalam peningkatan produktifitas dan alih teknologi dengan memberdayakan fungsi dan kinerja BIPP dan kantor-kantor pelayanan lainnya.
 - Tertatanya wilayah pengembangan produktifitas tanaman dan ternak unggulan dengan mengembangkan sentra-sentra produksi dan sistem informasi.
 - Meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat - pusat pelayanan dengan mengembangkan sarana jalan penghubung sentra - sentra produksi.
 - Berkembangnya sistem bagi hasil dalam kemitraan usaha sapi potong dan unggas dengan menyederhanakan birokrasi dan deregulasi.
 - Berkembangnya pasar keuangan pedesaan melalui pendirian BPR dan BMT di setiap kecamatan dan mendorong pengembangan koperasi.

- Pengoptimalan lahan pengangonan melalui inventarisasi lahan pengangonan dan pengolahannya atas dasar kerjasama antar pemerintah, pengusaha dan kelompok tani.
- Rehabilitasi lahan kritis dengan melakukan pembuatan hutan kemasyarakatan.
- Tersedianya benih dan bibit unggul,
- Berkembangnya potensi pasar melalui diversifikasi pangsa pasar dan labelisasi produk.
- Berkembangkannya inkubator bisnis agribisnis melalui jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi.
- Berkembangnya potensi kepariwisataan melauai pembangunan jaringan transportasi darat.

Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Jawa Barat yang harus diakomodir dalam strategi pengembangan wilayah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan kawasan lindung yang berfungsi lindung khususnya pada wilayah yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air (fungsi hidrologis), pencegahan banjir, erosi dan sedimentasi.
2. Mengidentifikasi dan melakukan penelitian lokasi secara pasti bagi kawasan-kawasan lainnya yang berfungsi lindung yang meliputi :
 - a. Kawasan perlindungan bawahan.
 - b. Kawasan perlindungan setempat.
 - c. Kawasan suaka alam.
 - d. Kawasan pelestarian alam.
 - e. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
 - f. Kawasan rawan bencana alam, dan
 - g. Kawasan lindung lainnya.
3. Mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan keberadaannya. Pada beberapa bagian kawasan hutan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembalikan fungsi hutan dengan vegetasi yang sesuai dalam bentuk penanaman kembali atau reboisasi dan rehabilitasi.
4. Mengendalikan pertumbuhan kawasan perkotaan yang berpotensi mengancam keberadaan kawasan lindung dan sentra produksi pangan.
5. Melakukan peningkatan produktivitas pertanian, yang mencakup :
 - a. Mempertahankan areal lahan sawah beririgasi teknis.
 - b. Menambah, memperluas dan meningkatkan lahan pertanian beririgasi skala kecil dan pedesaan pada kawasan-kawasan yang potensial.
 - c. Mendayagunakan lahan kecil secara optimal, termasuk lahan-lahan pertanian yang belum dimanfaatkan dan kurang produktif.
 - d. Mempertahankan dan mengefektifkan pemanfaatan kawasan budidaya khusus, (perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi)
 - e. Deviasi/pergeseran penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian diprioritaskan pada lahan-lahan yang tidak produktif.
6. Mengembangkan dan pemantapan zona industri yang telah berkembang pada koridor bagian wilayah tengah dengan penekanan pada pencegahan dampak yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan serta pengembangan agro

- industri terutama pada pusat-pusat atau sentra-sentra pertanian pada wilayah barat dan wilayah timur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
7. Membangun sarana transportasi dan mendorong pembangunan wilayah pengembangan secara selektif dan bijaksana.
 - a. Pengembangan kawasan-kawasan pusat produksi, dengan dukungan sistem transportasi yang dapat menghubungkan kawasan-kawasan tersebut dengan pusat-pusat pemasaran, baik dalam wilayah maupun luar wilayah.
 - b. Pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk dapat mendorong perkembangan pusat-pusat dan kawasan di bagian barat dan bagian timur wilayah, baik dalam bentuk peningkatan terhadap sistem transportasi yang ada maupun pengembangan baru atau tambahan.
 - c. Pengembangan kegiatan di bagian tengah wilayah perlu diidentifikasi dan diteliti.
 8. Meningkatkan peran pariwisata dalam skala yang lebih luas dengan melakukan integrasi pariwisata di wilayah Kabupaten Ciamis, yaitu :
 - a. Pemanfaatan dan peningkatan kawasan pariwisata yang telah berkembang, dengan penekanan pada kegiatan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - b. Pengembangan kawasan-kawasan pariwisata baru terutama di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada yang didukung dengan kelengkapan infrastruktur.
 9. Penetapan lokasi pertambangan dan pemantauan kawasan perusahaan penggalian bahan galian dan mengurangi dampak lingkungan sebagai akibat penggalian bahan galian.
 10. Pengembangan sistem Perkotaan dan Pusat-pusat Pemukiman, meliputi :
 - a. Pengembangan kota-kota yang dapat menjadi pusat pertumbuhan wilayah di Bagian Barat (Leuwiliang, Jasinga, Dramaga, dan Tenjo)
 - b. Pengembangan pusat-pusat pemukiman yang akan menampung kebutuhan internal yang tumbuh maupun dari luar wilayah.
 - c. Pengendalian pusat-pusat pemukiman yang berkembang.
 - d. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kota yang meliputi jalan, air bersih, listrik, perumahan, dan persampahan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar kota.
 11. Strategi pengelolaan kawasan Perdesaaan adalah meliputi :
 - a. Pengendalian pemukiman pedesaan tidak berubah menjadi pemukiman perkotaan dengan tujuan agar lahan pertanian yang produktif tetap dapat dipertahankan serta konservasi air dapat terjaga dengan baik.
 - b. Pengembangan Kegiatan industri kecil, agro industri melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya.
 - c. Pengembangan desa wisata, bagian dari pengembangan budaya dan kearifan lokal.
 - d. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, tanaman tahunan, hutan produksi, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan kawasan permukiman perdesaan.
 12. Mendukung fungsi hidrologis wilayah sehingga keberadaan situ/danau alam/danau buatan dan pembangunan waduk/setu yang dapat berfungsi sebagai pengendali banjir.

13. Mempertahankan sumber-sumber air dan daerah resapannya dalam rangka menjaga ketersediaan air sepanjang tahun.
14. Melakukan pengembangan ekonomi yang difokuskan pada pengembangan Sentra-sentra Produksi, Kawasan Pengembangan Utama Komoditi (KAPUK), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terintegrasi (KAPEKSI) dan Kawasan Pengembangan Utama (KAPUT).

Ditinjau berdasarkan sistem perwilayahan regional, kedudukan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) Kabupaten Ciamis diklasifikasikan sebagai Kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, industri, perkebunan dan kehutanan serta pariwisata.
2. Berdasarkan RTRWP Jawa Barat Tahun 2002-2012, Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Definisi PKL pada Kabupaten Ciamis adalah sebagai pusat pengembangan dan pengelolaan yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan pusat jasa keuangan/ bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, pusat pengelolaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan, bersifat khusus yang mendorong perkembangan sektor strategis.
3. Pengelolaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, jasa pemerintahan untuk beberapa kecamatan, bersifat khusus yang mendorong perkembangan sektor strategis.

2.3.3 Kebijakan Kabupaten Ciamis

2.3.3.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

1. Tujuan

- Mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan perencanaan tata ruang Kabupaten Ciamis dengan perencanaan tata ruang Nasional, Propinsi Jawa Barat, kabupaten / kota sekitar, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- Mewujudkan pertumbuhan wilayah dan pemerataannya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, ketersediaan sumber daya alam, dan kebencanaan.
- Mewujudkan masyarakat Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui berbagai upayan yang berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan
- Mewujudkan Kabupaten Ciamis sebagai kawasan agrobisnis dan pariwisata dengan sector unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan

2. Kebijakan dan Strategi

2.1 Pengembangan Wilayah

Kebijakan mendorong dan mengendalikan pengembangan wilayah.

Strategi :

- Mengembangkan sector unggulan pertanian, industry, perkebunan,

kelautan

- Mengembangkan sector dengan memperhatikan kebencanaan dan kelestarian kawasan lindung
- Mengendalikan perkembangan kawasan potensi cepat tumbuh yang dapat menimbulkan konflik ruang di sepanjang koridor jalan arteri primer (nasional) dan koridor kawasan pesisir.
- Mengembangkan infrastruktur perkotaan dan perdesaan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada
- Mengarahkan investasi pada kawasan strategis

2.2 Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan mendorong terlaksananya peran Wilayah Pengembangan (WP) dan pusat-pusatnya dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah serta terwujudnya system kota-kota.

Strategi :

- Menentukan arah pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP.
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada WP.
- Penyediaan infrastruktur di masing-masing perkotaan dengan memperhatikan kebutuhan kawasan perdesaan sebagai wilayah pelayanannya yang kelengkapannya sesuai hirarki kota-kota.
- Memprioritaskan pengembangan infrastruktur kota PKW, PKL, kawasan perbatasan.

2.3 Pengembangan Pola Ruang

A. Kebijakan menetapkan kawasan berpotensi lindung dan mempertahankan kelestariannya dengan mempertimbangkan arahan RTRW Propinsi Jawa Barat dan potensi yang ada di Kabupaten Ciamis.

Strategi :

- Menetapkan kawasan lindung sesuai dengan criteria dan potensi.
- Mempertahankan kelestarian kawasan lindung yang ditetapkan.
- Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung yang sudah terjadi.
- Mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan penduduk.
- Mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam.

B. Kebijakan mendorong pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi kebencanaan.

Strategi :

- Pengembangan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan potensi rawan bencana (gempa bumi tektonik, tsunami, gerakan tanah, banjir, dan kekeringan).
- Mengoptimalkan pemanfaatan hutan produksi, hutan rakyat, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan pertanian berkelanjutan.
- Meningkatkan potensi pertanian hortikultura.
- Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perkebunan sesuai potensi yang ada.
- Mengembangkan kawasan peternakan sesuai dengan potensi yang ada.

- Mengembangkan perikanan tangkap, budidaya air laut, air payau, dan air tawar sesuai potensi lestari.
- Memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Mengembangkan ekowisata, agrowisata, wisata budaya, dan jasa lingkungan, serta wisata lain berdaya jual, diminati untuk dikunjungi dengan memperhatikan konservasi wilayah laut, gunung, dan hutan yang ramah lingkungan dan ramah budaya.
- Mengembangkan industry rumah tangga, industry kecil, dan menengah terutama yang mengolah hasil pertanian dan kehutanan.
- Mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan lahan yang ada dan memperhatikan kebencanaan.
- Merehabilitasi dan mengembangkan kawasan hutan mangrove, hutan pantai, terumbu karang, padang lamun di kawasan pesisir Kabupaten Ciamis.

C. Kebijakan menetapkan fungsi kawasan strategis sebagai kawasan prioritas

Strategi :

- Memprioritaskan pengembangan pada sector unggulan di setiap WP/SWP atau bernilai strategis.

2.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kebijakan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan penertiban sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang.

Strategi :

- Merumuskan arahan perijinan, arahan peraturan zonasi, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- Melakukan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang oleh Lembaga Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan oleh Bupati.

2.3.3.2 Rencana Struktur Ruang

1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

1.1 Sistem Hirarki Kota

Mempertimbangkan kebijakan tata ruang lebih tinggi, potensi yang ada dan kebutuhan pengembangan wilayah, maka ditetapkan system hirarki kota sebagai berikut :

1. Kota Pangandaran sebagai PKW/PKNp dengan lingkup pelayanan lebih luas dari wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga fasilitas minimal yang harus tersedia, yaitu pusat perdagangan/jasa regional, terminal tipe B, rumah sakit tipe A, pendidikan tinggi, pelabuhan laut, bandara (terdapat di Cijulang), TPA regional.
2. Kota Ciamis sebagai PKL-1 dengan lingkup pelayanan 1 Kabupaten Ciamis, sehingga fasilitas minimal yang harus tersedia yaitu pusat perdagangan/jasa skala kabupaten, terminal tipe B, rumah sakit tipe C.
3. Kota Banjarsari sebagai PKL-2 dengan lingkup pelayanan beberapa kecamatan dalam 1 WP, sehingga fasilitas minimal yang harus tersedia yaitu pusat perdagangan/jasa

skala WP, terminal tipe B, rumah sakit tipe C.

4. Kota Kawali sebagai PKL-2p dengan lingkup pelayanan beberapa kecamatan dalam 1 WP. Ditetapkan dengan tujuan peningkatan pelayanan dan pemerataan pelayanan yang optimal bagi kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah paling utara Kabupaten Ciamis, sehingga fasilitas minimal yang harus tersedia, yaitu pusat perdagangan/jasa skala WP, terminal tipe C, rumah sakit tipe C.
5. Kota Panjalu, Rancah, Sindangkasih, Cijeungjing, Pamarican, dan Cijulang sebagai PKL-3 dengan lingkup pelayanan beberapa kecamatan dalam 1 SWP. Fasilitas minimal yang harus tersedia, yaitu pusat perdagangan/jasa skala SWP, terminal tipe C (kecuali Cijulang terminal tipe B), Puskesmas dengan perawatan.
6. Kota kecamatan lainnya ditetapkan sebagai PPK dengan lingkup pelayanan 1 kecamatan. Fasilitas minimal yang harus tersedia, yaitu pasar kecamatan, Puskesmas tanpa perawatan, terminal tipe C, pemerintahan tingkat Kecamatan.

1.2 Pembagian Wilayah Pengembangan

Mempertimbangkan penetapan system hirarki kota-kota, homogenitas kegiatan, dan jangkauan pelayanan pusat-pusat ditetapkan pembagian WP dan SWP sebagai berikut:

1. WP Kawali (bagian dari WP Utara sebelumnya)
Meliputi SWP Panumbangan, SWP Kawali, dan SWP Rancah.
Ditetapkan dengan pertimbangan utama dibutuhkan adanya pusat pertumbuhan yang mampu memberikan pelayanan di sepanjang koridor kawasan paling utara di Kabupaten Ciamis.
Kota Kawali memiliki posisi strategis dan centris untuk dapat memberikan pelayanan pada WP ini. Kondisinya berbeda dengan WP Ciamis, kawasan WP ini memiliki karakter perdesaan relative kuat dengan potensi pertanian yang dapat diandalkan, adanya fungsi konservasi, dan morfologi wilayah yang berbeda dengan Wp Ciamis.
2. WP Ciamis (bagian dari WP utasa sebelumnya), dengan pusat pertumbuhan Kota Ciamis. Meliputi SWP Sindangkasih, SWP Ciamis, dan SWP Cijeungjing.
WP ini berciri kuat sebagai kawasan perkotaan sebagai implikasi adanya jalan arteri primer yang mampu mempercepat pertumbuhan kawasan di sepanjang koridor ruas jalan tersebut.
Ciri spesifik tersebut membutuhkan penanganan yang spesifik pula guna mengantisipasi terjadinya *urban sprawl*.
Meliputi kecamatan – kecamatan yang ada di koridor jalan arteri primer dan kecamatan-kecamatan yang berorientasi kuat terhadap pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang koridor jalan arteri primer.
3. WP Banjarsari (sebelumnya WP Tengah) dengan pusat pertumbuhan Kota Banjarsari.
Meliputi SWP Banjarsari dan SWP Pamarican.
4. WP Banjaran (sebelumnya WP Selatan), dengan pusat pertumbuhan Kota Pangandaran.
Meliputi SWP Pangandaran dan SWP Cijulang.

Lebih lengkapnya dapat disimak pada peta berikut ini.



Gambar 2.2

Peta

WP/SWP Kab. Ciamis



2.1 Pengertian dan Pemahaman Tentang Agropolitan.....	1
2.1.1 Pengertian Agropolitan.....	1
2.1.2 Ciri dan Persyaratan Kawasan Agropolitan.....	2
2.1.3 Konsep Kawasan Agropolitan.....	3
2.2 Kabupaten Ciamis ditinjau Dari Konsep Agropolitan.....	6
2.3 Kebijakan Kabupaten Ciamis.....	8
2.3.1 Kabupaten Ciamis dalam Konteks Keruangan Nasional.....	8
Tabel 2.1	9
Sektor Unggulan Dan Cakupan Wilayah Kawasan Andalan	9
Propinsi Jawa Barat	9
Gambar 2.1.....	10
Peta.....	10
Kawasan Andalan Jawa Barat.....	10
2.3.2 Kabupaten Ciamis dalam Konteks Keruangan Propinsi Jawa Barat.....	11
2.3.3 Kebijakan Kabupaten Ciamis.....	15
2.3.3.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi.....	15
2.3.3.2 Rencana Struktur Ruang.....	17
Gambar 2.2.....	19
Peta.....	19
WP/SWP Kab. Ciamis.....	19





Bab 3

Potensi dan Persoalan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis

3.1 Penilaian Terhadap Sistem Perekonomian / Agribisnis

3.1.1 Kelembagaan Agro Ekonomi

Kelembagaan agro ekonomi yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai penunjang berlangsungnya kegiatan pertanian (agro). Lembaga yang dimaksud tersebut terdiri dari lembaga badan hukum, swasta dan perorangan. Fungsi lembaga tersebut adalah menunjang kegiatan pertanian dari awal (modal ; keuangan, bibit/benih, pupuk dan teknologi) hingga akhir (pengolahan dan pemasaran).

Terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis, kelembagaan agro ekonomi yang mendukung kegiatan awal dan akhir pertanian masih belum terbentuk, walaupun ada masih bersifat parsial dan individual. Sehingga diperlukan upaya membentuk dan mengembangkan kelembagaan tersebut.

Sedangkan untuk kelembagaan pada tahap produksi, di Kawasan Agropolitan telah terbentuk kelompok tani, dimana terdapat 114 kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang terdapat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, terdiri dari ;

- Bidang pertanian tanaman pangan 59 kelompok
- Bidang peternakan 29 kelompok
- Bidang perikanan 13 kelompok
- Bidang perkebunan 6 kelompok
- Bidang kehutanan 7 kelompok

3.1.2 Fasilitas Usaha Tani

Fasilitas usaha tani yang terdapat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis merupakan fasilitas yang berupa alat bantu bagi petani dalam melakukan



kegiatan pertanian, baik itu pada tahapan persiapan/pematangan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, panen hingga pada tahapan kegiatan pengolahan hasil panen.

Sebagai suatu daerah yang diarahkan sebagai lokasi pengembangan agropolitan, penggunaan dan keberadaan alat-alat modern disektor pertanian tersebut sepatutnya bukan merupakan suatu hambatan/kendala dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses implementasi kegiatan pertanian di kawasan agropolitan tersebut. Mengamati kondisi saat ini, ketersediaan fasilitas usaha tani masih relatif terbatas pada tahap pra produksi dan produksi, sedangkan untuk tahapan kegiatan pengolahan hasil panen masih sangat kurang.

3.1.3 Sistem Transportasi Wilayah

Sistem transportasi wilayah merupakan salah satu indikator kemajuan/kesejahteraan suatu daerah/wilayah. Hal ini disebabkan oleh peranannya terhadap pemenuhan kebutuhan pergerakan (keluar-masuk) orang dan barang, baik untuk kepentingan lokal maupun regional.

Kondisi sistem transportasi wilayah di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis masih memiliki banyak keterbatasan, baik ditinjau dari jumlah dan kondisi prasarana jalan maupun prasarana angkutannya. Kedepan, dalam rangka pengembangan Kabupaten Ciamis termasuk kawasan agropolitan didalamnya pengembangan sistem transportasi merupakan salah satu prioritas utama.

3.1.4 Sistem Distribusi Produksi Pertanian

Sistem distribusi atau pemasaran produk-produk pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis saat ini didominasi hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja. Dimasa mendatang pemasaran produk-produk pertanian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan secara regional (*eksport*).

Salah satu tujuan pengembangan agribisnis dimasa mendatang adalah meningkatkan taraf hidup petani khususnya dan penduduk daerah perencanaan pada umumnya. Oleh karena itu orientasi eksport produk-produk pertanian menjadi prioritas dalam pengembangan agribisnis. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah dengan membangun jaringan distribusi hasil pertanian yang meliputi pembinaan kemitraan, pembangunan/pengadaan peningkatan terminal agribisnis, pengembangan SDM (keterampilan dan intelektual) petani terhadap perkembangan teknologi dan pasar.

Selain sistem pendistribusian hasil pertanian tersebut, untuk memperoleh nilai tambah pada produk-produk pertanian di kawasan perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan industri-industri makanan dalam hal



pengolahan bahan mentah menjadi setengah jadi maupun menjadi bahan siap pakai.

3.2 Penilaian Terhadap Komoditas Unggulan

Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis merupakan kawasan yang memiliki peluang untuk berkembang secara cepat. Kawasan ini memiliki sumber daya unggulan yang banyak potensial untuk dikembangkan. Meskipun belum dimanfaatkan secara optimal, namun keanekaragaman sumber daya yang dimiliki sampai saat ini mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan.

3.1.1 Analisis Komoditas Unggulan

Suatu komoditas dikatakan potensial manakala komoditas tersebut memiliki peluang pengembangan yang baik. Pengembangan tersebut dapat dilihat melalui sejumlah indikator antara lain luas lahan yang tersedia, jumlah petani, produksi dan produktivitas, serta peluang pasarnya.

Komoditas unggulan merupakan komoditas yang memenuhi kriteria antara lain :

1. Memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, dan produksi nasional.
2. Memberikan peluang lapangan kerja/usaha yang cukup luas.
3. Memiliki prospek pasar.
4. Memiliki dukungan dari ketersediaan teknologi untuk pengembangannya.
5. Memiliki kesesuaian yang tinggi dengan agroekosistem daerah.
6. Memiliki tingkat peluang pengembangan produk (*product development*) yang tinggi.
7. Memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) yang luas terhadap berkembangnya sektor-sektor lain.

Komoditas unggulan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis meliputi :

1. Padi Sawah

Padi merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, sehingga keberadaannya sangat strategis. Luas panen padi sawah di kawasan perencanaan pada tahun 2009 adalah sebesar 11.763 ha untuk padi ladang dengan jumlah produksi sekitar 69.670 ton.



Tabel 3.1
Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi
1	Kecamatan Cihaurbeuti	3.366	207.816,4 ton
2	Kecamatan Lumbung	2.278	13.952,7 ton
3	Kecamatan Panjalu	3.048	18.444,1 ton
4	Kecamatan Panumbangan	3.041	18.550,1 ton
5	Kecamatan Sukamantri	1.912	11.573 ton
JUMLAH		13.645	270.336,3

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

2. Jagung

Komoditas jagung di kawasan studi merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan, hal ini dapat dilihat dari potensi lahan yang cukup luas. Pembudidayaan komoditas jagung hampir tersebar diseluruh kecamatan, dan kondisi ini bisa ditingkatkan melalui berbagai upaya baik dari sisi peningkatan sumberdaya petaninya maupun introduksi teknologi pertanian. Selain peluang pasar yang baik, komoditi ini juga bisa disinergikan dengan pengembangan sektor peternakan.

Tabel 3.2
Luas Panen dan Produksi Jagung
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	55	302,5
2	Kecamatan Lumbung	7	39,27
3	Kecamatan Panjalu	392	2.532,46
4	Kecamatan Panumbangan	985	6.107
5	Kecamatan Sukamantri	529	5.574
JUMLAH		1.968	14.555,23

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

3. Cabe

Sama seperti jagung, komoditas cabe di kawasan studi merupakan komoditas unggulan untuk dikembangkan, hal ini dapat dilihat dari potensi lahan yang cukup luas dan jumlah produksinya yang relative tinggi. Pembudidayaan komoditas cabe menyebar diseluruh kecamatan, dan kondisi ini bisa ditingkatkan melalui berbagai upaya baik dari sisi peningkatan sumberdaya petaninya maupun introduksi teknologi pertanian.

Tabel 3.3
Luas Panen dan Produksi Cabe
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	35	490
2	Kecamatan Lumbung	1	9
3	Kecamatan Panjalu	96	1.153,4
4	Kecamatan Panumbangan	41	328
5	Kecamatan Sukamantri	131	1.965
JUMLAH		304	3.945,4

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

4. Teh

Dilihat dari kondisi eksisting, komoditi teh merupakan salah satu komoditi unggulan dari Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis. Selain karena nilai produksinya yang relatif tinggi, juga karena pangsa pasar masih terbuka lebar. Hanya saja diperlukan inovasi dalam hal pengelolaan pasca produksi serta perluasan pemasaran.

Tabel 3.4
Luas Panen dan Produksi Teh
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	155	155
2	Kecamatan Lumbung	-	-
3	Kecamatan Panjalu	43	43
4	Kecamatan Panumbangan	25	25
5	Kecamatan Sukamantri	142	142
JUMLAH			

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

5. Kopi

Dilihat dari kondisi eksisting, baik dari luas panen maupun produksinya, komoditi ini memang belum menunjukkan kontribusi yang signifikan. Tetapi, mempertimbangkan kebijakan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang akan mengintensifkan perkembangan komoditi kopi melalui serangkaian kebijakan seperti perluasan lahan serta pemberian bantuan bibit baik dari Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, maka komoditi ini dinilai layak untuk menjadi komoditi unggulan.

Tabel 3.5
Luas Panen dan Produksi Kopi
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	30	10,5
2	Kecamatan Lumbung	6,75	1.6875
3	Kecamatan Panjalu	43	60
4	Kecamatan Panumbangan	32,67	
5	Kecamatan Sukamantri	50	14,2
JUMLAH			

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

6. Albasia

Salah satu komoditi unggulan dari sektor kehutanan adalah albasia. Saat ini penyebaran dan budi dayanya merata di semua kecamatan. Komoditi ini jga memiliki pangsa pasar yang relatif baik.

Tabel 3.6
Luas Panen dan Produksi Albasia
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (m ³)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	9,166	324,3
2	Kecamatan Lumbung	748,223	7.409,82
3	Kecamatan Panjalu	669,436	7.484,4
4	Kecamatan Panumbangan		
5	Kecamatan Sukamantri		
JUMLAH			

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Ciamis 2010

7. Rimba Campuran

Komoditi lain dari sektor kehutanan yang menjadi komoditi unggulan adalah komoditi rimba campuran. Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan & Perkebunan, tingginya produksi dari komoditi ini, serta pangsa pasar yang masih terbuka lebar, maka rimba campuran layak untuk menjadi komoditi unggulan

Tabel 3.7
Luas Panen dan Produksi Rimba Campuran
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (m ³)
1	Kecamatan Cihaurbeuti		1.122,8
2	Kecamatan Lumbung		9.551,45
3	Kecamatan Panjalu	8,4	1.814,4
4	Kecamatan Panumbangan		
5	Kecamatan Sukamantri		
JUMLAH			

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

8. Ayam Ras

Komoditi ayam ras telah menjadi *trade mark* dari Kabupaten Ciamis, dan sentra penghasil ayam ras di Kabupaten Ciamis terdapat di lima kecamatan yang termasuk ke dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis. Karena itu tidak mengherankan jika penyebarannya merata di semua kecamatan dan produksinya juga tinggi, karena pengembangan komoditi ini juga didukung oleh kebijakan yang berlaku.

Tabel 3.8
Jumlah Populasi Ayam Ras
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Ayam Ras Pedaging (ekor)	Ayam Ras Petelur (ekor)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	334.000	334.000
2	Kecamatan Lumbung	81.000	-
3	Kecamatan Panjalu	511.200	19.000
4	Kecamatan Panumbangan	520.700	47.500
5	Kecamatan Sukamantri	23.345	8.000
JUMLAH			

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

9. Domba

Tidak berbeda dengan komoditi ayam ras, komoditi domba juga merupakan *trade mark* sektor peternakan Kabupaten Ciamis. Melihat kondisi eksisting serta ditunjang oleh luasnya pangsa pasar juga adanya dukungan kebijakan, maka komoditi ini layak menjadi komoditi unggulan dari Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.

Tabel 3.9
Jumlah Populasi Domba
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Domba (ekor)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	3.210
2	Kecamatan Lumbung	941
3	Kecamatan Panjalu	6.467
4	Kecamatan Panumbangan	6.705
5	Kecamatan Sukamantri	2.142
JUMLAH		

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

10. Sapi

Tidak berbeda dengan dua komoditi sebelumnya dari sektor peternakan, komoditi sapi juga memiliki pangsa pasar yang luas, bahkan dari informasi eksisting, orientasi komoditi ini adalah ekspor ke luar wilayah kawasan agropolitan khususnya, dan Kabupaten Ciamis pada umumnya. Dukungan kebijakan juga turut memperkuat pengembangan komoditi ini.

Tabel 3.10
Jumlah Populasi Sapi
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Domba (ekor)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	124
2	Kecamatan Lumbung	59
3	Kecamatan Panjalu	618
4	Kecamatan Panumbangan	306
5	Kecamatan Sukamantri	465
JUMLAH		

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

11. Udang Galah

Dilihat dari kondisi eksisting, komoditi ini memang belum menunjukkan kontribusi yang signifikan, namun melihat potensi pengembangan di masa yang akan datang ditambah dengan harga jualnya yang relatif tinggi, maka komoditi ini layak untuk menjadi komoditi unggulan.

Tabel 3.11
Luas Panen dan Produksi Udang Galah
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	2	2
2	Kecamatan Lumbung	0,5	1,11
3	Kecamatan Panjalu	-	-
4	Kecamatan Panumbangan		
5	Kecamatan Sukamantri		
JUMLAH			

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

12. Ikan Gurame

Kabupaten Ciamis saat ini memang sudah terkenal dengan komoditi ini. Karena itu, sudah sepatutnya komoditi ikan gurame masuk menjadi komoditi unggulan. Penyebaran yang hampir merata di seluruh kecamatan, relatif tingginya nilai produksi, serta dukungan kebijakan turut memperkuat pengembangan komoditi ini.

Tabel 3.12
Luas Panen dan Produksi Ikan Gurame
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	20,94	14,65
2	Kecamatan Lumbung	21	46,2
3	Kecamatan Panjalu		
4	Kecamatan Panumbangan	17	93,5
5	Kecamatan Sukamantri	1,4	17,5
JUMLAH			

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

13. Ikan Nila

Sama seperti komoditi ikan gurame, komoditi ikan nila saat ini telah menjadi komoditi potensial untuk dikembangkan. Melihat penyebarannya yang relatif hampir merata di semua kecamatan, tingginya nilai produksi, dukungan kebijakan, serta luasnya pangsa pasar membuat komoditi ini layak untuk menjadi komoditi unggulan.

Tabel 3.13
Luas Panen dan Produksi Ikan Nila
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Kecamatan Cihaurbeuti	45,31	158,58 ton
2	Kecamatan Lumbung	34	68 ton
3	Kecamatan Panjalu		
4	Kecamatan Panumbangan	45	256,5 ton
5	Kecamatan Sukamantri	6,8	87,04 ton
JUMLAH			

Sumber : BP4K Kabupaten Ciamis 2010

3.3 Potensi dan Persoalan Pengembangan

Identifikasi terhadap potensi dan permasalahan suatu daerah merupakan kesimpulan dari hasil analisis atau penilaian yang dilakukan sebelumnya terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam kaitan ini metoda yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana potensi dan kendala pengembangan agropolitan yang ada di Kabupaten Ciamis didekati melalui metoda analisis SWOT, yang mempertimbangkan kondisi daerah dilihat dari segi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), harapan (*opportunity*), dan ancaman (*threats*).

Dalam kasus yang terdapat di lima kecamatan yang diarahkan sebagai kawasan agropolitan, metoda analisis SWOT dibangun oleh elemen-elemen pembentuk struktur dan pembangkit kegiatan pengembangan daerah maupun kegiatan agropolitan itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan dalam metoda analisis SWOT adalah pendekatan secara kualitatif terhadap elemen-elemen pembentuk dan pembangkit kegiatan agropolitan, yaitu sebagai berikut :

Kekuatan (*Strength*)

- Perekonomian Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis mengalami pertumbuhan yang positif.
- Letak Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya.
- Potensi sumber daya alam yang berlimpah, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata yang diharapkan dapat menjadi faktor pendorong utama dalam pengembangan kawasan tersebut.

Kelemahan (*Weakness*)

- Infrastruktur terutama bidang transportasi belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, baik untuk pergerakan internal maupun eksternal.
- Kemiskinan kultural masyarakat perbatasan karena ketergantungan mata pencaharian penduduk dengan alam masih sangat tinggi. Yang menjadi pokok persoalan adalah adanya ketidakseimbangan antar unsur potensi alam dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolahnya.
- Kualitas Sumber Daya Manusia pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis masih relatif rendah. Jumlah penduduk berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah masih menempati porsi lebih besar dibandingkan di atasnya
- Prasarana pendidikan masih relatif kurang.
- Masih minimnya bantuan pengajaran maupun pelatihan terhadap para petani untuk memperkaya pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya untuk membudidayakan tanaman sawah/ladang.

Peluang (*Opportunity*)

- Kondisi alam Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis memiliki banyak potensi perkembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perkebunan, serta wisata alam.
- Dukungan kebijakan eksternal (RTRW Nasional dan RTRW Propinsi Jawa Barat) serta kebijakan internal dari RTRW Kabupaten Ciamis sendiri untuk mengembangkan sektor pertanian.
- Didukung oleh kebijakan pengembangan sistem transportasi yang menunjang interaksi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis sebagai sentra produksi pertanian dengan wilayah lainnya di luar kawasan agropolitan.



- Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis berpeluang untuk mengurangi ketergantungan orientasi Kawasan Barat dari Pulau Jawa yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan (Bandung, Jakarta), jika didukung akses prasarana dan sarana dasar serta pengelolaan yang baik sehingga pusat pertumbuhan di kawasan agropolitan menjadi outlet ekspor impor dengan skala regional (terminal regional)

Ancaman (*Threats*)

- Kedekatan geografis Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis terhadap wilayah lain dapat menyebabkan *backwash effect* pertumbuhan ekonomi
- Masih rendahnya dukungan kelembagaan dan mekanisme investasi yang terpadu untuk mendapatkan peluang pasar (*market opportunity*).



Bab 4

Konsep Pengembangan

Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis

4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis sebagai kawasan agropolitan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah secara keruangan dan penilaian terhadap potensi pengembangan komoditas unggulan adalah mengembangkan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis sebagai pusat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata melalui konsep kawasan agropolitan.

Untuk mencapai tujuan diatas, langkah yang diambil meliputi :

1. Mengembangkan kawasan pertanian sesuai dengan kesesuaian lahan dan kecocokan jenis komoditas, sehingga pemanfaatan ruang terkait pengembangan kawasan agropolitan dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Meningkatkan produktifitas komoditas perkebunan, pertanian dan perikanan yang telah berkembang dan yang akan dikembangkan di masa mendatang.
3. Mengembangkan peluang investasi di berbagai sektor terutama sektor-sektor yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan dan pengembangan wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pengembangan kawasan agropolitan.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana sosial ekonomi dalam rangka mempermudah kegiatan masyarakat.
6. Mengembangkan potensi lainnya yang dimiliki oleh Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna.
7. Meningkatkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan kawasan agropolitan.
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang.
9. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas hubungan antar elemen ruang.



10. Menjaga kawasan lindung untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan.

4.2 Pengembangan Kawasan Agropolitan

4.2.1 Prinsip Dasar Pengembangan

Tahap pengembangan agropolitan adalah penetapan lokasi sesuai dengan persyaratan daerah pengamatan seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan produk tata ruang dan bentuk organisasi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan (dihindari langkah penyeragaman organisasi). Selanjutnya adalah tahapan penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan, sehingga bisa dihindari adanya peluang pengaliran nilai tambah yang tidak terkendali ke luar kawasan. Dengan demikian penguatan kelembagaan lokal dan sistem kemitraan menjadi persyaratan utama yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam pengembangan kawasan agropolitan.

Lebih jauh, pola kemitraan (kemitraan permodalan, produksi, pengolahan dan pemasaran) akan menjamin terhindarnya eksploitasi pelaku usaha tani di tingkat perdesaan oleh pelaku usaha lain di satu pihak, dan memungkinkan terjadinya nilai tambah yang bisa dinikmati pelaku usaha tani. Hal ini pada gilirannya akan menjamin peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan memungkinkan kawasan perdesaan melakukan investasi baik yang bersifat pendidikan, maupun penciptaan lapangan usaha baru. Inilah yang dimaksud dengan dampak ganda (*multiplier effect*). Dari penciptaan nilai tambah di tingkat perdesaan.

Selain itu terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yang harus diterapkan dalam rangka mengembangkan kawasan agropolitan, diantaranya :

1. Prinsip Kerakyatan
Pembangunan diutamakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, atau dengan pengertian bukan kesejahteraan orang-perorang atau kelompok.
2. Prinsip Swadaya
Bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan harus mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian, bukan menumbuhkan ketergantungan.
3. Prinsip Kemitraan
Memperlakukan pelaku agribisnis sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
4. Prinsip Bertahap dan Berkelanjutan
Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada dan



kemampuan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan dan kelestarian lingkungan.

Prinsip pemberdayaan diatas dapat semakin lebih efektif, efisien dan optimal dalam tahap pelaksanaannya dengan memperhatikan 4 (empat) unsur kelompok sasaran (*stakeholder*) yang berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan, meliputi :

1. Unsur Masyarakat (Terutama Petani)
Merupakan unsur utama atau unsur penggerak yang harus berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencapai langkah-langkah yang harus dilakukan. Sehingga selain usaha budidaya pertanian yang telah dilakukan, pada gilirannya juga dapat menciptakan dan menumbuhkan kembangkan usaha-usaha baru *off- farm*, seperti penyediaan sarana produksi (*agroinput*), pengolahan hasil pertanian (*processing*), pemasaran (*marketing*) atau penyedia jasa keuangan.
2. Unsur Pemerintah
Para birokrat harus mampu mereposisi dirinya sebagai mitra usaha ekonomi kerakyatan di perdesaan, sehingga semua pihak dapat menjalankan usahanya dengan keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak manapun.
3. Unsur Pengusaha/Pengelola
Para pengusaha di perdesaan harus mampu memposisikan dirinya sebagai mitra usaha ekonomi kerakyatan di perdesaan, sehingga semua pihak dapat menjalankan usahanya dengan keuntungan yang wajar, tanpa merugikan pihak manapun.
4. Unsur Pendukung
Unsur pendukung terdiri dari :
 - Asosiasi dan kelompok agropolitan.
 - Perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
 - LSM, perorangan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Unsur pendukung ini harus berperan sebagai pemberi dorongan dan stimulasi, supaya ke empat unsure stkaholder ini dapat bekerjasama dalam suasana kesetaraan serta bersinergi melalui bidangnya masing-masing.

4.2.2 Arah Pengembangan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan agropolitan maka arah pengembangan agropolitan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis didalamnya termasuk peningkatan kualitas pengusaha (petani dan aparatur), sehingga mampu memanfaatkan potensi/peleuang ekonomi yang ada di perdesaan.



- b. Meningkatkan komoditas unggulan lokalitas yang saling mendukung dan menguatkan termasuk usaha industri kecil.
- c. Pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata dengan mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam, secara efisien dan ekonomis sehingga tidak ada limbah yang terbuang atau yang tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (usaha pertanian terpadu tanpa limbah).
- d. Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian pertanian dengan enam tepat (jumlah, kualitas, jenis, waktu, harga dan lokasi).
- e. Pengembangan Kelembagaan Petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.
- f. Pengembangan lembaga keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro.
- g. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan Terpadu.
- h. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri pertanian secara lokalitas.
- i. Peningkatan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/sub terminal agribisnis dan pusat lelang hasil pertanian.
- j. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang bersifat sinergis.
- k. Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.
- l. Pengembangan percobaan/pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai kondisi lokalitas.

4.2.3 Model Pengembangan

Dari berbaagai alternatif model pembangunan, konsep agropolitan dipandang sebagai konsep yang menjanjikan teratasinya masalah ketidakseimbangan perdesaan-perkotaan yang terjadi selama ini. Secara singkat agropolitan adalah :

1. Suatu model pembangunan yang mengandalkan desentralisasi, mengandalkan pembangunan infrastruktur setara kota di wilayah perdesaan, sehingga mendorong peng-kotaan dalam arti positif.
2. Mampu menanggulangi dampak negatif pembangunan seperti migrasi desa-kota yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, kehancuran massif sumberdaya alam, pemiskinan desa dan lain-lain.

Pendekatan ini pada akhirnya bisa mendorong penduduk perdesaan tetap tinggal di perdesaan. Agropolitan mampu mendorong tercapainya tujuan akhir menciptakan daerah yang mandiri dan otonom, dan karenanya mengurangi kekuasaan korporasi trans-nasional atas wilayah lokal. Kepentingan lokal seperti ini akan akan dapat menjadi pengontrol kekuasaan pusat ataupun korporasi yang bersifat *sub ordinat*.



Oleh Karena itu, dalam konteks penentuan model pengembangan agropolitan di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis sebagai manifestasi dari konsep pembangunan wilayah perdesaan, arahan pengembangan yang perlu dilakukan meliputi :

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)
Sebagai titik masuk (*entry point*) dari pemberdayaan SDM adalah menyadarkan mereka sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri mereka, bahwa tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang mereka miliki sekarang masih bisa ditingkatkan. Dengan kesadaran dan percaya diri akan tumbuh motivasi dikalangan masyarakat mereka sendiri untuk maju, sehingga mereka akan lebih mudah menerima dan tanggap terhadap setiap perubahan yang dianjurkan.

Pembinaan manusia sementara diarahkan kepada SDM yang memiliki 4 sifat (catur gatra), yaitu : berbudi pekerti luhur, tekun dan kerja keras, mampu bekerjasama dan memiliki sifat inovatif.

2. Pengembangan Permodalan
Bagi daerah-daerah yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, dapat dimulai dengan berbagai bantuan dalam bentuk bantuan cuma-cuma atau bantuan bergulir. Bantuan yang diberikan haruslah didasarkan atas kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat, bukan bantuan yang diberikan secara begitu saja. Untuk itu terlebih dahulu haruslah dilakukan identifikasi dan analisa kebutuhan masyarakat (petani) di daerah pengamatan. Atas dasar hasil analisa kebutuhan maka bantuan itu diberikan. Bagi daerah yang sudah banyak tersentuh pembangunan, bantuan permodalan bagi usaha ekonomi masyarakat sudah dapat diberikan dalam bentuk Kredit Subsidi atau Kredit Komersial dengan kemudahan khusus (tanpa jaminan dan prosedurnya mudah). Kredit ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha budidaya saja, tapi bias digunakan untuk segala macam usaha baik *on-farm* (budidaya) maupun *off-farm* seperti usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, perdagangan maupun pelayanan jasa keuangan/simpan pinjam.
3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat
Strategi ketiga dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis adalah dikembangkannya Kelembagaan Ekonomi Rakyat yaitu suatu kelembagaan yang tumbuh dari dan untuk kepentingan rakyat, bukan kelembagaan yang dibentuk untuk



kepentingan instansi Pembina. Inisiatif penting, karena hanya kelembagaan yang tumbuh dari bawah itulah yang mampu berkembang secara berkelanjutan.

Seperti diketahui bahwa ekonomi rakyat adalah suatu usaha ekonomi yang dijalankan oleh rakyat banyak dan jenisnya sangat beragam mulai dari usaha tani dilahan sempit, mengolah hasil pertanian, kerajinan, jual beli hasil pertanian dsb. Mereka pada umumnya berusaha sendiri-sendiri dengan keterampilan dan modal seadanya.

Langkah pertama dari strategi ini adalah mereka yang semula berusaha sendiri-sendiri (usaha rumah tangga), kitadorong dan bombing agar mereka mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok. Usaha tetap dijalankan di masing-masing keluarga, hanya mungkin ada aspek yang dikerjasamakan dalam kelompok (sebagai faktor pengikat), seperti pengadaan bahanbaku bersama, menjual hasil bersama, mendapatkan modal bersama dan sebagainya. Anggota kelompok harus terdiri dari para petani/pengusaha yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama (ada faktor pengikat/*binding factor*), sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi.

Langkah selanjutnya adalah menumbuhkan gabungan kelompok atau sering juga disebut sebagai asosiasi. Kelompok-kelompok yang sudah tumbuh dan berjalan secara baik, terutama kelompok-kelompok yang usahanya sejenis.

Tujuan dari ditumbuhkannya Gabungan Kelompok ini adalah dalam rangka mengembangkan kerjasama ekonomi yang lebih luas, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya. Manfaat itu umpamanya dapat dilihat dari :

- Menghimpun modal usaha yang lebih besar
- Memperbesar skala usaha
- Memperkuat posisi tawar menawar
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha

Gabungan kelompok atau asosiasi ini kalau sudah berjalan lancar dan baik, kita dorong dan bombing lagi agar mereka mau dan mampu menjadi salah satu lembaga ekonomi formal dan yang paling tepat tentunya adalah koperasi. Untuk mencapai itu perlu dilakukan berbagai kegiatan advokasi dan bimbingan, agar mereka benar-benar memahami apa manfaatnya menjadi suatu lembaga ekonomi formal (koperasi).



4. Pengembangan Usaha Agribisnis

Agribisnis sebagai usaha di bidang pertanian yang dibangun didasarkan pada suatu ke-sistem-an memerlukan suatu strategi yang utuh dan bertahap dalam pengembangannya. Keragaman sumberdaya agribisnis di setiap daerah memerlukan suatu strategi dan pendekatan yang berbeda-beda dari daerah satu kepada daerah lain. Namun demikian secara umum usaha agribisnis memerlukan tahapan perkembangan terutama bila dikaitkan dengan tingkat kemampuan sumberdaya manusianya dan penggunaan sumberdaya alam.

Para petani di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis harus mampu menghitung dan menganalisis apakah usaha agribisnis yang diusahakannya menguntungkan atau tidak. Untuk dapat menguntungkan suatu usaha, maka petani harus dapat mengembangkan model usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan.

Lebih jauh, untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan, petani di daerah pengamatan harus menerapkan/pengembangan usaha pertanian (agribisnis) yang efisien dan menguntungkan yang dirancang dalam kapasitas skala ekonomi yang menguntungkan. Upaya tersebut harus dimulai dengan pemilihan komoditas-komoditas unggulan, yang kemudian dikembangkan pengelolaannya secara komplementer (saling melengkapi) serta didukung dengan pengembangan prosesing, sortasi, pengepakan, pemasaran, industri kecil, industri jasa yang sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakatnya.

5. Pengembangan Sarana-Prasarana dan Iklim Usaha

Pengembangan sarana-prasarana public yang berwawasan lingkungan yang diperlukan seperti jaringan jalan, irigasi, transportasi, telekomunikasi, pasar, gudang dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian ke pasar dengan efisiensi dan resiko minimal.

Terkait hal diatas, variabel utama pengembangan sarana dan prasarana dilakukan dengan menelaah agribisnis hulu, proses produksi dan agribisnis hilir.

Agribisnis Hulu

Agribisnis hulu dengan indikator kegiatan yang meliputi :

- Penyediaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk dan obat-obatan) serta alat pertanian. Apabila sarana produksi ini cukup berarti kebutuhan petani terpenuhi dengan demikian memperoleh skor tinggi.



- Peranan KUD apabila sangat berperan didalam penyediaan sarana produksi, maka KUD cukup menunjang dalam usaha agribisnis.

Proses Produksi

Proses produksi dengan terdiri dari :

- Penerapan tekonologi, yang diukur adalah dosis pemupukan yang berimbang dan tepat waktu, menggunakan obat-obatan menurut anjuran, serta menggunakan benih/bibit yan berkualitas. Apabila semua anjuran penerapan teknologi tersebut dilaksanakan oleh petani di dalam kegiatan budidaya, maka mendapat kategori baik.
- Status lahan budidaya, yang digunakan terdiri dari tanah milik, menyewa/bagi hasil dan tanah garapan. Diharapkan petani sebagian besar melakukan kegiatan usaha tani (agribisnis) menggunakan tanah miliknya sendiri, hal ini berarti usaha taninya lebih efisien karena tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tanah untukusaha, dengan demikian mendapat kategori baik.
- Luas lahan budidaya dalam usaha tani agribisnis yaitu budidaya dengan luas lahan lebih 1 Ha; 0,50-1 Ha; kurang dari 0,50 Ha. Apabila luas lahan budidaya lebih dari 1 Ha mendapat kategori baik, karena usahatani (agribisnis) dengan penggunaan lahan lebih dari 1 Ha berarti usaha tani yang dilakukan memiliki skala luas ddengan berorientasi pada keuntungan.
- Target produksi, dimana pencapaian target produksi adalah merupakan harapan usaha tani apabila produksi tercapai sesuai dengan ukuran produksi per-Ha. Dalam pencapaian-pencapaian produksi, ukurannya terdiri lebih dari 100% dengan kategori baik, antara 70%-100% dan antara 50%-70%.

Agribisnis Hilir

Agribisnis hilir dengan terdiri dari standarisasi dan pengepakan, pemasaran hasil dan penyimpanan hasil panen.

- Standarisasi dan pengepakan hasil sebelum dipasarkan kedua-duanya dapat dilakukan sendiri. Apabila kedua-duanya dilakukan sendiri dengan kategori baik berarti petani memiliki kemampuan didalam penanganan hasil panen.
- Pemasaran hasil panen dapat dilakukan langsung ke terminal agribisnis/agropolitan, melalui pedagang pengumpul dan tengkulak. Pemasaran langsung ke sentra agribisnis akan jauh lebih baik karena adanya standar harga yang lebih baik dan jelas.
- Penyimpanan hasil dilakukan setelah panen, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehilangan dan kerusakan produksi. Diharapkan petani memiliki tempat penyimpanan (gudang) sendiri, hal ini dimaksudkan agar petani tidak mengalami kesulitan di dalam menyimpan hasil produksi.



Kelembagaan dan Sarana-Prasarana Penunjang

Kelembagaan dan sarana prasarana penunjang, meliputi :

- **Pasar**
Fungsi pasar adalah sebagai penyedia sarana yang dibutuhkan serta sebagai tempat memasarkan hasil usaha tani. Karena fungsinya yang demikian sangat diperlukan, maka adanya pasar di kawasan perencanaan yang letaknya strategis dan dapat mengakses keseluruhan wilayah agropolitan.
- **Lembaga Keuangan**
Lembaga keuangan adalah salah satu lembaga ekonomi sebagai penyedia modal bagi masyarakat usaha tani. Dengan demikian sangat diperlukan keberadaannya. Sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang sangat diperlukan, maka tingkat pelayanannya terhadap pemenuhan kebutuhan modal usaha bagi masyarakat adalah ditentukan oleh kapasitas modal yang dimiliki, kemudahan pelayanan serta jangkauan wilayah kerja lembaga keuangan dimaksud.
- **Balai Percobaan/Pengkajian Teknologi**
Dalam upaya peningkatan produksi dan kemampuan masyarakat dalam usaha tani, maka diperlukan suatu pengembangan dan pemasyarakatan teknologi pertanian. Pengembangan teknologi juga frekuensi penerapan (pemasyarakatan) yang dilakukan diantaranya demonstrasi cara (demplot) dan lain sebagainya.
- **Infrastruktur**
Infrastruktur yang terdiri dari jaringan jalan dan irigasi adalah sangat penting keberadaannya. Untuk jaringan irigasi dan fungsinya sebagai pengatur pemenuhan kebutuhan air di dalam proses budidaya dan penanganan. hasil ini mutlak sangat diperlukan. Kemudian jaringan jalan yang baik sangat diperlukan didalam kelancaran pengangkutan produksi serta komunikasi usaha. Disamping itu pula tingkat aksesibilitas daerah inti agropolitan dengan kawasan sekitarnya sangat ditentukan oleh kelayakan jalan.
- **Kelembagaan Tani**
Kelembagaan tani sebagai suatu wadah dalam mendinamiskan kegiatan usaha tani diperlukan keberadaannya. Kelembagaan tani yang baik adalah kelembagaan yang dapat menggerakkan, mengkoordinasikan anggotanya dalam kegiatan usaha tani. Oleh karena itu sangat diperlukan keberadaannya di kawasan perencanaan.



Dilain pihak, reformasi regulasi yang berhubungan dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi daerah dan wilayah seperti dalam hal perijinan, bea masuk, peraturan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus tercipta dalam kerangka saling mendukung dan konsisten, serta sedapat mungkin menghilangkan regulasi yang saling menghambat.

4.3 Konsep Struktur Ruang

4.3.1 Konsep Struktur Ruang Makro

Pengembangan konsep struktur ruang makro dimaksudkan untuk mendudukan posisi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis dalam konstelasi regional sehingga akan terlihat peran dan fungsi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah yang lebih luas. Dalam kajian ini, akan dilihat bagaimana arah kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis dan posisi geografis Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis terhadap wilayah sekitarnya.

Berdasarkan arah kebijakan pengembangan wilayah dari berbagai rencana tata ruang, maka pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

- a. Rencana pengembangan wilayah meliputi Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah yang terdiri dari pengembangan transportasi, prasarana sumber daya air dan irigasi, energi, telekomunikasi, serta prasarana perumahan dan permukiman.
 1. Rencana pengembangan transportasi
 - a. Pengembangan sistem jaringan jalan arteri
 - b. Pengembangan jaringan jalan lokal yaitu jalan penghubung antar kecamatan dan jalan poros desa sebagai penghubung kecamatan dengan desa/kelurahan.
 2. Rencana Pembangunan Terminal Regional
 3. Pengembangan sarana kesehatan
 4. Pengembangan sarana pendidikan dasar, menengah dan pendidikan keagamaan.
 5. Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi
 6. Rencana pengembangan sarana energi listrik dan telekomunikasi
- b. Dilihat dari arahan pola ruang, maka pemanfaatan ruang yang diarahkan untuk Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten

Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Non-Budidaya (Lindung), meliputi :
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya;
 - Kawasan Hutan Lindung (HL)
 - Kawasan Resapan Air (KRA)
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - Kawasan Sempadan Sungai
 - Kawasan Sekitar Danau/situ
 - c. Kawasan Suaka Alam;
2. Kawasan Budidaya, meliputi :
 - a. Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah
 - b. Budidaya Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering
 - c. Budidaya Perkebunan
 - d. Budidaya Peternakan
 - e. Budidaya Perikanan
 - f. Budidaya Kehutanan (Hutan produksi biasa dan terbatas)
 - g. Pengembangan Industri dan
 - h. Pengembangan Pariwisata
- c. Berdasarkan posisi geografis Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis, maka wilayah sekitarnya dapat mempengaruhi perkembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis. Lebih jelas secara skematik konsep tata ruang makro pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Struktur Tata Ruang Makro



4.3.2 Konsep Struktur Ruang Mikro

Struktur ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis merupakan suatu kerangka struktural yang menampilkan bentuk kotanya dan dapat dilihat dari unsur-unsur kegiatan fungsional yang dihubungkan oleh sistem transportasi serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kawasan.

Tujuan pembentukan konsep struktur ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, diantaranya adalah :

- Menjabarkan struktur ruang yang dikembangkan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
- Memacu pertumbuhan dan mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh kawasan
- Mendayagunakan fasilitas pelayanan yang penyebarannya dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan dan tingkat pelayanan
- Menciptakan daya tarik bagi seluruh bagian kawasan dengan penyebaran pusat-pusat pelayanan ke seluruh kawasan
- Menciptakan dinamika perkembangan kawasan yang sinergis

Konsep pengembangan struktur ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis penyebaran dialokasikan di tempat-tempat strategis atau yang mempunyai aksesibilitas baik, sehingga mudah dijangkau dari seluruh bagian kawasan. Kegiatan utama yang dikembangkan di pusat pelayanan ini berupa jasa pelayanan kegiatan pemerintahan, jasa pelayanan kegiatan perekonomian dan jasa, permukiman, yang dikembangkan secara berjenjang dan terpadu sesuai skala pelayanannya, meliputi :

1. Pusat pelayanan utama, berupa pusat jasa pelayanan pemerintahan dialokasikan di pusat kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan kecamatan dan desa.
2. Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa.
3. Pusat pelayanan kegiatan permukiman, guna melayani kebutuhan penduduk dengan skala pelayanan beberapa unit lingkungan yang dialokasikan tersebar di simpul-simpul jalan utama.
4. Sub pusat pelayanan, merupakan pusat pelayanan lingkungan yang dialokasikan tersebar merata ke seluruh pusat-pusat lingkungan dengan skala pelayanan lokal, sesuai ketersediaan lahan dan daya dukung lahan terhadap kegiatan yang akan dikembangkan.
5. Terkait dengan upaya pengembangan kawasan agropolitan, maka prasarana pendukung utama kawasan tersebut ditempatkan di

Konsep struktur ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2

Konsep Struktur Ruang Mikro



4.4 Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan

4.4.1 Perkiraan Kebutuhan Jenis dan Spesifikasi Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan pada sebuah wilayah akan memberikan konsekuensi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana penunjang kegiatan, khususnya kegiatan pertanian. Prasarana pengembangan kegiatan pertanian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Irigasi
Irigasi adalah infrastruktur penting kaitannya dengan pengembangan pertanian. Irigasi adalah merupakan sistem pengairan yang biasa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertanian. Untuk mengembangkan pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis maka infrastruktur irigasi ini perlu dibangun guna meningkatkan produksi pertanian yang ada.
- b. Jalan akses ke sentral produksi
Seringkali usaha tani tidak berkembang dengan baik disebabkan oleh tidak adanya akses yang memadai ke sentra produksi, sehingga untuk mobilisasi sarana produksi dan hasil produksi cenderung membutuhkan biaya yang besar. Pembangunan jalan akses kesentra produksi perlu diwujudkan guna meringankan beban biaya produksi petani.
- c. Pembangunan Sub Terminal
Kawasan agropolitan perlu didukung oleh infrastruktur sub terminal angkutan yang bertujuan untuk memberi kemudahan pada kegiatan koleksi dan distribusi hasil pertanian. Pembangunan sub terminal ini memiliki sasaran pelayanan bagi pelaku usaha tani pada kawasan agropolitan.
- d. Teknologi Komunikasi
Perkembangan sistem informasi yang sedemikian cepat perlu dimanfaatkan oleh para petani, guna mengakses informasi, baik yang berkaitan dengan harga, kebutuhan konsumen, serta informasi-informasi lain yang penting. Dengan demikian maka Teknologi komunikasi menjadi sesuatu yang perlu dibangun di kawasan agropolitan.

Sedangkan sarana yang dibutuhkan dapat diperkirakan sebagai berikut :

- a. Sarana Produksi
Sarana produksi pertanian sangat dibutuhkan oleh petani dalam upaya melakukan kegiatan pertaniannya. Permasalahan yang sering dijumpai berkaitan dengan sarana produksi ini adalah tingkat ketersediaan dan pemertaannya yang sering terjadi tidak kontinue dan seimbang, sehingga petani sering merasa kebingungan dalam mendapatkannya. Sarana produksi pertanian meliputi alat dan mesin produksi, pupuk, bibit dan benih serta saranan lainnya. Untuk menyikapi masalah tersebut maka perlu disusun program penanggulangannya seperti :

- Program penyediaan alat dan mesin pertanian melalui badan keswadayaan petani atau melalui sub terminal agribisnis
 - Program penyediaan dan distribusi pupuk melalui kerjasama dengan distributor
 - Program penyediaan benih dan bibit melalui kerjasama dengan lembaga penangkar benih dan bibit
- b. Sarana Pengembangan dan Penelitian
- Pengembangan usaha tani mau tidak mau setiap saat harus mengalami perkembangan dan peningkatan yang berarti baik dari sisi produksi maupun dari sisi kualitas. Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu terus diupayakan penelitian dan pengembangan yang menunjang kearah peningkatan kinerja tani yang baik. Pengembangan dan penelitian perlu ditempuh dengan membangun laboratorium pertanian dan pengembangan demplot.
- c. Sarana Pendidikan dan Pelatihan
- Permasalahan mendasar pengembangan pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis khususnya dan di Indonesia pada umumnya adalah lemahnya kualitas sumberdaya manusia yang tersedia. Hal ini terbukti dengan besarnya daya dukung lahan di kawasan agropolitan di Nangabadau tetapi produksi yang dihasilkan belum memperlihatkan angka yang optimal, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sumberdaya manusia yang tersedia. Dengan demikian maka pengembangan sistem pelatihan dan pendidikan bagi petani khususnya perlu ditingkatkan.
- d. Sarana Promosi
- Tidak sedikit hasil pertanian yang diperoleh tidak memiliki akses pasar yang baik, padahal komoditas tersebut permintaannya cukup besar dipasaran. Hal ini diakibatkan sistem promosi yang belum berjalan dengan baik. Dengan demikian maka perlu dikembangkan model promosi produk pertanian yang dihasilkan melalui sarana promosi yang baik.
- e. Sarana Pemasaran
- Selama ini petani jika ingin menjual produknya cukup dengan menunggu tengkulak yang datang, dan seringkali posisi tawar petani menjadi rendah karena tidak tau lagi kemana produknya harus dijual. Sarana pemasaran produk pertanian yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah melalui pengembangan subterminal agribisnis dan terminal agribisnis, bahkan jika memungkinkan perlu juga dibangun balai lelang, sehingga petani bisa mendapat peluang bertransaksi langsung dengan pembeli dan bias terjadi kontrak tanam atau kontrak jual.
- f. Sarana Permodalan
- Modal seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi petani dan sulit untuk dipecahkan, lembaga perbankan kadang tidak memiliki kepercayaan yang penuh terhadap petani apalagi jika petani mengajukan kredit secara individual. Melihat permasalahan tersebut maka perlu dikembangkan

lembaga penyedia permodalan baik bank maupun non bank yang khusus konsern terhadap pembiayaan usaha tani.

g. Sarana Pengangkutan

Sarana pengangkutan yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mengangkut sarana produksi dan hasil produksi, bisa dilakukan melalui pengembangan trayek angkutan atau melalui pengembangan terminal agribisnis dimana pemerintah memberikan jasa pelayanan bagi petani untuk mengangkut hasil produksinya ke sub terminal agribisnis atau ke terminal agribisnis.

h. Sarana Penyimpanan

Sarana penyimpanan dapat diwujudkan melalui pembangunan gudang. Pembangunan gudang lebih tepat dikoordinasikan oleh pengelola terminal agribisnis dimana pemerintah bisa berperan sebagai penyedia jasa penyimpanan selama produk tersebut belum dipasarkan. Gudang ini sangat penting guna menyimpan produk pertanian dan dari gudang ini bisa mengontrol tingkat kontinuitas dan kualitas produk.

i. Sarana Sortasi

Sortasi dibutuhkan untuk memisahkan produk pada level tertentu sehingga kualitas yang diinginkan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Sarana sortasi bisa dikembangkan pada tingkat kelompok tani atau pada terminal agribisnis sebagai jasa layanan yang diberikan pemerintah.

j. Sarana Pengolahan

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan karena seringkali petani menjualnya dalam bentuk hasil primer sehingga harganya pun menjadi murah. Dengan adanya sarana pengolahan petani diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produknya. Sarana pengolahan dapat berupa industri hasil pertanian yang ditempatkan di sekitar sentra pertanian dengan melibatkan kelompok tani sebagai unsure pengelola.

k. Sarana Pengepakan

Pengepakan atau pengemasan akan memberikan nilai tambah produk menjadi meningkat. Teknologi Pengepakan perlu disosialisasikan kepada para petani. Sarana pengepakan bisa dibangun di subterminal agribisnis atau di terminal agribisnis. Dan bisa saja pengepakan ini dilakukan oleh pemerintah melalui jasa layanannya di terminal agribisnis.

4.4.2 Pengembangan Komoditas Unggulan

Pengembangan Komoditas Unggulan bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian. Dengan demikian maka pengembangan setidaknya harus diarahkan pada peningkatan kualitas serta peningkatan nilai tambah produk. Beberapa program pengembangan yang diduga memiliki keterkaitan erat



dengan tujuan pengembangan komoditas unggulan antara lain :

- a. Penyediaan dan pemerataan sarana produksi perkebunan pada setiap zona pengembangan perkebunan
- b. Pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan
- c. Pengembangan pusat-pusat penelitian dan pengembangan
- d. Pengembangan sarana pengolahan produk guna meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan
- e. Pengembangan jaringan koleksi dan distribusi melalui terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis
- f. Program pengembangan kelembagaan petani
- g. Program peningkatan akses terhadap sumber permodalan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan

4.4.3 Pengembangan Kelembagaan Pengelola Pembangunan Prasarana dan Sarana dikawasan Agropolitan

Salah satu tujuan utama pengembangan kawasan agropolitan adalah membantu pemerintah untuk memikul tanggung jawab dalam kaitannya dengan pengadaan sarana dan prasaran pengembangan kawasan agropolitan. Tanggungjawab tersebut meliputi kegiatan merencanakan pelaksanaan pembangunan sampai operasional dan pemeliharaan yang memadai.

Pelaksanaan pembahasan kelembagaan didasarkan atas analisa ditempat tentang situasi yang ada seperti :

- a. Struktur kelembagaan pertanian yang ada
- b. Tingkat kerjasama dan koordinasi
- c. Kondisi sumberdaya

Kegiatan pertanian yang ada di wilayah studi tampaknya berjalan secara alamiah dan belum menampilkan kelembagaan yang baik. Hal ini terlihat dari pola usaha tani yang ada cenderung subsiten dan tidak terfokus sehingga ada kesan bahwa usaha tani belum memiliki daya tarik yang kuat terlebih bagi generasimuda. Kegiatan usaha tani berjalan secara individual dan tidak terintegrasi dengan baik sehingga kurang efresien dan efektif.

Beberapa program yang mungkin dapat memberikan solusi guna mewujudkan kawasan agropolitan yang handal antara lain :

- a. Pembentukan kelompok tani
- b. Pembentukan badan keswadayaan petani yang bertugas menjembatani kepentingan petani dan pemerintah
- c. Pembentukan lembaga pengelola infrastruktur sub terminal agribisnis dan terminal agribisnis dengan memposisikan pemerintah sebagai agen penyedia jasa (pengangkutan, penyimpanan, sortasi, pengepakan dan pemasaran)
- d. Peningkatan pembinaan dan pengawasan





Bab 5

Strategi Pengembangan

Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis

5.1 Isu Pengembangan Kawasan Agropolitan

Dalam rangka pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis menuju keadaan yang lebih baik melalui dengan mengembangkan konsep agropolitan, maka harus terkait dengan beberapa isu mendasar yang selama ini ada di kawasan perencanaan, meliputi :

Pertama, isu yang menyangkut pengembangan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten berbasis konservasi. Dimana sebagian wilayahnya memiliki fungsi konservasi termasuk di kawasan agropolitan. Dalam isu ini muncul pertanyaan bagaimana dan sejauh mana kegiatan pertanian, perikanan, kehutanan, dan agrowisata dapat berkembang tanpa harus mengganggu fungsi konservasi. Dengan kata lain, bagaimana mensinergikan aspek-aspek tersebut.

Kedua, isu yang menyangkut keadaan kehidupan para petani di kawasan perencanaan yang tidak meningkat kearah yang lebih baik sesuai dengan harapan mereka. Kesejahteraan para petani belum tercapai secara optimal, karena mereka belum mampu menguasai harga jual komoditi pertanian mereka, sehingga harga hasil komoditi pertanian pertanian, perikanan, dan kehutanan mereka kebanyakan di bawah harga yang sepatutnya.

Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan kualitas kehidupan dan penghidupan penduduk relatif rendah. Hal ini perlu segera diantisipasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mempersiapkan kawasan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.

5.2 Strategi Pengembangan Agribisnis

Untuk merealisasikan rencana pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dan untuk mewujudkan suatu tujuan maka perlu



disusun suatu strategi sebagai cara untuk mencapainya. Strategi dalam pengembangan usahatani/Agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis secara umum meliputi :

5.2.3 Strategi Umum

5.2.3.1 Pengembangan Sistem Koordinasi

Koordinasi merupakan bagian penting dalam membangun komitmen dan pembagian tanggung jawab baik antar dinas dalam satu pemerintahan maupun antar lembaga dalam lingkup yang lebih luas. Koordinasi, substansinya meliputi

- Koordinasi gagasan, gagasan atau ide seringkali mengawang-ngawang dan tampaknya sangat sulit untuk terwujud. Dengan adanya koordiansi maka persoalan yang tampaknya sulit untuk direalisasikan ada kemungkinan menjadi rasional, karena ada masukan dan koreksi dari yang lain sehingga memudahkan untuk melangkah pada tahapan berikutnya.
- Koordinasi perencanaan, perencanaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program kerja. Kegiatan yang tidak terencana seringkali menjadi tidak punya arah dan tampak abstrak dalam implementasinya. Perencanaan tanpa dikoordinasikan juga seringkali tumpang tindih dan tekesan inefisiensi. Dengan demikian koordinasi perencanaan menjadi penting dilakukan.
- Koordinasi pembiayaan, betapa banyak program pembangunan yang sudah matang tidak bisa direalisasikan karena terhalang oleh faktor biaya, padahal permasalahan biaya bisa diatasi melalui berbagai cara, termasuk koordinasi dalam penghimpunannya.
- Koordinasi pemeliharaan, sering kali terjadi hasil-hasil pembangunan tidak tahan lama (awet) karena aspek pemeliharaan yang sangat lemah. Pembagian tanggung jawab pemeliharaan terhadap hasil pembangunan yang tidak dikoordinasikan sering kali berjalan tidak optimal dan cenderung saling menyalahkan anantara satu pihak dengan pihak lainnya, maka dari itu koordinasi dalam aspek tugas pemeliharaan menjadi penting.

5.2.3.2 Deregulasi Peraturan

Deregulasi atau penyederhanaan terhadap peraturan dianggap merupakan suatu strategi dalam mengembangkan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan perijinan dan perolehan informasi. Pemerintah harus mampu melahirkan sebuah peraturan yang menciptakan mekanisme pasar yang kondusif bagi pengembangan agribisnis, baik peraturan penataan ruang, penetapan fungsi kawasan, peraturan investasi, peraturan perdagangan dan lain sebagainya.

Sering kali perkembangan suatu daerah terhambat salah satu sebabnya adalah karena peraturan-peraturan yang di buat tidak kondusif untuk pengembangan



suatu kegiatan. Jika Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis akan mengembangkan Agribisnis maka perlu dirangsang oleh peraturan dan kebijakan yang mendukung kearah berkembangnya agribisnis tersebut.

5.2.3.3 Mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan cermin keamanan dalam berinvestasi. Para investor seringkali mengalami keragu-raguan untuk menanamkan investasinya pada suatu kawasan karena payung hukum yang mengatur kegiatan dikawasan tersebut belum terbentuk. Demikian juga pemerintah tidak punya kekuatan untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijin pada suatu aktifitas kegiatan manakala perangkat hukum dan peraturannya bulum ada.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah di sahkan merupakan salah satu perangkat hukum yang dapat disosialisasikan kehalayak umum, dimana didalamnya memuat alokasi pemanfaatan ruang, penetapan fungsi kawasan, dan memuat sejumlah kbijaksanaan pengembangan yang terencana.

Pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis pun jika ingin memiliki kekuatan hukum maka perlu dimasukkan kedalam produk hukum baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra) maupun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.2.3.4 Penataan

Penataan dapat dibedakan kedalam dua bagian, yaitu :

- Penataan sarana dan prasarana

Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis secara defakto memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan agribisnis, meskipun jumlah dan kapasitasnya masih relative belum memadai seperti antara lain prasarana jalan, irigasi, listrik, telepon serta sejumlah sarana meliputi pasar, dan sebagainya.

Komponen-komponen tersebut perlu ditata agar memberikan fungsi yang optimal. Bentuk penataannya bisa dilakukan melalui perbaikan dan refungsionalisasi atau pengembangan fungsi.

- Penataan aktifitas kegiatan

Yang dimaksud dengan penataan aktifitas kegiatan adalah menata kegiatan-kegiatan yang sudah berkembang, terutama yang memiliki hubungan erat dengan pengembangan agribisnis, seperti industri pengolahan, industri kerajinan, restoran, hotel, rumah sakit, dan sebagainya. Bentuk penataannya dapat ditempuh melalui registrasi ulang, identifikasi kebutuhan konsumsi, produksi dan lain-lain.



5.2.3.5 Perencanaan

Pengembangan agribisnis perlu direncanakan sebaik mungkin supaya bisa menghasilkan produk pembangunan yang optimal. Perencanaan pembangunan agribisnis meliputi :

- Perencanaan Makro (*master plan*)

Perencanaan makro atau rencana induk merupakan rencana umum yang menyeluruh meliputi semua aspek seperti aspek kebijaksanaan, aspek struktur ruang, aspek alokasi ruang, aspek keterkaitan antar sektor, aspek kelayakan dan aspek pengelolaan

- Perencanaan komponen kegiatan

Agribisnis merupakan kegiatan terpadu yang tersusun dari berbagai sub sistem kegiatan, seperti sub sistem sarana prasarana, sus sistem budidaya (produksi), sub sistem pengelolaan pasca panen dan subsistem sarana penunjang.

Masing-masing komponen tersebut direncanakan mekanisme pembangunannya sehingga dapat dilihat kelayakan dan keterkaitan satu sub sistem dengan sub sistem lainnya.

- Perencanaan pembiayaan

Peran pemerintah dalam pengembangan agribisnis tampaknya sangat dominan, baik dari sisi politik (kebijakan) maupun dari sisi teknis (penyediaan sarana dan prasarana). Untuk memainkan peranan tersebut, maka pemerintah membuat perencanaan pembiayaan dan mekanisme pencapaiannya.

Investasi yang dilakukan pemerintah memiliki orientasi pelayanan yang mampu merangsang tumbuh dan berkembangnya suatu kegiatan, termasuk kegiatan agribisnis, seperti membangun jalan, irigasi, stasiun, dan sebagainya. Semua komponen tersebut memerlukan biaya dan perlu dibuat perencanaannya.

- Perencanaan Manajerial

Perencanaan manajerial meliputi :

- Perencanaan pola hubungan anatar pelaku kegiatan
- Perencanaan sistem retribusi dan atau bagi hasil
- Perencanaan pengelolaan pembangunan
- Perencanaan mekanisme investasi

5.2.3.6 Sosialisasi

Sosialisasi berfungsi sebagai alat penyebarluasan informasi, disamping itu dapat juga berfungsi sebagai wahan penyadaran masyarakat, khususnya dalam bidang pembangunan agribisnis.

Rencana pembangunan yang kurang tersosialisasikan seringkali melahirkan inefisiensi, hal ini disebabkan karena program tidak merakyat dan tidak diminati oleh masyarakat. Dengan demikian sosialisasi menjadi penting untuk menyebarluaskan informasi.

5.2.3.7 Promosi

Dalam kegiatan bisnis, promosi menjadi bagian yang sangat vital dan tidak jarang menghabiskan porsi biaya yang sangat besar, hal ini dilakukan karena promosi merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen pengguna produk yang menjadi sentral kegiatan bisnis dimaksud. Demikian pula dengan program pemerintah termasuk program pengembangan agribisnis, maka promosi ini menjadi penting untuk menjaring minat investor atau siapapun yang berminat untuk mengembangkan agribisnis.

5.2.4 Strategi Pengembangan Subsistem Sarana Prasarana

Untuk merealisasikan pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dan mencapai sasaran pengembangan diperlukan rancangan strategis sebagai berikut :

- Pengaturan program pembangunan infrastruktur
- Penyiapan sumberdaya (modal dan SDM)
- Membangun sarana produksi yang selektif
- Revitalisasi pusat-pusat perdagangan
- Optimalisasi Jaringan Irigasi
- Optimalisasi lembaga pendidikan

5.2.5 Strategi Pengembangan Subsistem Budidaya

Untuk merealisasikan pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dan mencapai sasaran pengembangan diperlukan rancangan strategis pada sub sistem budidaya sebagai berikut :

- Memaksimalkan sarana produksi
- Meningkatkan penguasaan teknologi



- Mengembangkan pelatihan dan pendidikan
- Pengembangan pola intensifikasi lahan
- Pengembangan komoditas unggulan

5.2.6 Strategi Pengembangan Subsistem Pengelolaan Pasca Panen dan Pemasaran

Untuk merealisasikan pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dan mencapai sasaran pengembangan diperlukan rancangan strategis pada spek sub sistem pengelolaan pasca panen dan pemasaran sebagai berikut :

- Pengembangan pola diversifikasi vertikal
- Pengembangan teknologi pengolahan
- Meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata
- Meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar yang ada
- Meningkatkan program promosi
- Pembuatan sistem informasi pasar
- Pengembangan pusat jasa layanan penyimpanan
- Pengembangan pusat jasa layanan prosesing
- Pengembangan pusat jasa layanan pengangkutan
- Pengembangan pusat jasa layanan pemasaran

5.2.7 Strategi Pengembangan Subsistem Sarana Penunjang

Untuk merealisasikan pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dan mencapai sasaran pengembangan diperlukan rancangan strategis pada aspek subsistem sarana penunjang sebagai berikut :

- Deregulasi sistem perkreditan perbankan
- Pengembangan pola inti plasma
- Pengembangan kelompok usaha tani
- Pengembangan koperasi agribisnis
- Pendampingan (pembinaan)

5.2.8 Strategi Pengembangan Sentra Produksi

Strategi pengembangan sentra produksi adalah mengembangkan kawasan pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi alam yang menjadi sektor unggulan Agropolitan Kabupaten Ciamis ini, yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, dan agrowisata

Pertanian

Untuk pengembangan sentra produksi pertanian diarahkan pada zona-zona yang mempunyai kesesuaian lahan yang cocok dan barbasiskan pada nilai produksinya. Sesuai dengan analisis potensi dan guna lahan, maka sentra produksi pertanian lahan basah (padi sawah) dialokasikan di Kecamatan Cihaurbeuti, sentra produksi palawija (jagung) di Kecamatan Panumbangan, dan sentra produksi hortikultura (cabe merah) di Kecamatan Sukamantri.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sub-sektor pertanian tanaman pangan pada masa mendatang strategi pengembangannya adalah :

- Mendorong pengembangan komoditi yang paling diunggulkan, yaitu: padi sawah, palawija (jagung), dan hortikultura (cabe merah) dengan mendukung terwujudnya pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP).
- Mengembangkan pusat-pusat pembenihan bibit tanaman untuk memudahkan proses penanaman dan meningkatkan mutu dan jumlah produksi komoditas unggulan yang didukung oleh penggunaan varietas unggulan dan teknologi produksi tepat guna.
- Mengembangkan jaringan irigasi teknis dan infrastruktur penunjang, seperti jaringan transportasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang dapat menghambat upaya pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan.
- Mengembangkan kawasan industri pengolahan yang berbasiskan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk-produk pertanian tanaman pangan.

Kehutanan & Perkebunan

Untuk meningkatkan perkembangan sub-sektor kehutanan dan perkebunan pada masa mendatang strategi pengembangannya adalah sebagai berikut :

- Mendorong pengembangan produksi komoditi unggulan terpilih, yaitu: alabasia dan rimba campuran untuk sektor kehutanan, serta teh dan kopi untuk sektor perkebunan dengan memberikan insentif pengembangan infrastruktur regional dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian lahan.



- Mendorong perkembangan lahan Perkebunan Besar Swasta (PBS), diantaranya melalui pembatasan ijin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan (KBK).
- Mengembangkan kegiatan industri pengolahan yang berbasis hasil-hasil perkebunan. Keberadaan kegiatan industri ini akan menciptakan nilai tambah (*value added*) terhadap produk-produk komoditi perkebunan.

Perikanan

Untuk mengembangkan sub-sektor perikanan, maka strategi yang diterapkan, yaitu :

- Menentukan jalur distribusi hasil-hasil perikanan yang berorientasi ekspor dimana dilakukan pembedaan jalur distribusi ekspor perikanan di dalam kawasan agropolitan itu sendiri dengan jalur distribusi untuk ekspor hasil-hasil perikanan ke luar kawasan agropolitan.
- Mengembangkan budidaya perikanan air tawar secara intensif terutama di Kecamatan Lumbung yang dipersiapkan sebagai sentra produksi perikanan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani ikan dalam upaya untuk meningkatkan hasil produksi perikanan air tawar.
- Menyusun kebijaksanaan yang mendukung peningkatan produksi di bidang perikanan dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan sumber daya alam.

Peternakan

- Meningkatkan produksi hasil peternakan sapi, domba, dan ayam terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan telur di kawasan domestik dalam kerangka target produksi yang berorientasi ekspor ke luar kawasan agropolitan, baik dalam lingkup Kabupaten Ciamis itu sendiri maupun ke luar Kabupaten Ciamis.
- Intensifikasi sistem peternakan dengan mengembangkan konsep peternakan dalam bentuk range (pembukaan lahan yang luas untuk peternakan dalam skala besar) agar hasilnya dapat terfokus dan tidak mengganggu sistem aktivitas yang lainnya, dikembangkan area padang rumput yang cukup luas yang dapat ditemukan di kaki bukit Gunung Sawal.



Pariwisata

Untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata pada masa mendatang, khususnya wisata alam dan wisata budaya strategi pengembangannya adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi keterkaitan (*linkages*) obyek wisata di kawasan agropolitan dan mewujudkannya dalam sebuah kemasan paket wisata yang mampu menggabungkan potensi lokasi obyek-obyek wisata tersebut.
- Mengembangkan fasilitas pendukung kegiatan wisata, seperti prasarana dan sarana transportasi antar obyek wisata yang memadai, jalur wisata yang terkait dengan daerah tujuan wisata lain di Kabupaten Ciamis, khususnya di kawasan agropolitan itu sendiri dan pengembangan sistem akomodasi wisata yang disesuaikan dengan karakteristik daya tarik wisatanya.
- Meningkatkan promosi obyek-obyek wisata minat khusus di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.

Sedangkan strategi pengembangan sentra produksi lainnya yang terkait adalah meningkatkan nilai ekonomi fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi. Hal ini didasari pemikiran bahwa sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan (berpotensi) lindung dan kawasan konservasi, selain untuk menjamin keberlanjutan usaha perekonomian kawasan.

Sebagai langkah awal yang akan ditempuh adalah mempertegas batas-batas dan status hukum kawasan lindung dan konservasi. Langkah selanjutnya adalah merehabilitasi kawasan lindung yang telah terkonversi habitatnya, kemudian dilakukan pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung. Pembinaan kegiatan penelitian dan pariwisata di kawasan lindung masih dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kawasan.

5.3 Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan strategi untuk mewujudkan keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengembangan sumberdaya manusia adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia masyarakat perbatasan yang sangat rendah diupayakan peningkatannya, dengan maksud supaya mereka dapat mengolah sumberdaya alamnya sendiri secara lebih optimal.

Dengan demikian, strategi ini diimbangi dengan upaya peningkatan koordinasi antar pelaku dalam pengelolaan sumberdaya alam. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan mengarah kepada peningkatan kemampuan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada, sehingga bila tidak tercipta koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pengelolaan



sumberdaya alam, maka dengan tingkat kemampuan yang sama tersebut akan terjadi eksploitasi sumberdaya alam yang tidak sinkron antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan upaya penambahan tenaga guru, penambahan dan peningkatan fasilitas pendidikan, serta pelatihan bagi penduduk setempat untuk dapat mengelola sumberdaya alam yang dimiliki. Upaya peningkatan sumberdaya manusia harus didukung dengan peningkatan kesehatan masyarakat.

Dengan sumberdaya manusia yang handal dan didukung dengan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai, pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis akan berjalan lancar karena produktivitas masyarakat dan koordinasi antar pelaku pembangunan juga semakin meningkat.

5.4 Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana merupakan strategi spasial yang ditujukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung sistem investasi dan produksi dan mengembangkan sistem perhubungan untuk kelancaran lalu lintas.

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mendukung sistem investasi dan produksi yang berlangsung pada kawasan pusat pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana yang ditingkatkan terutama adalah listrik, air baku, dan prasarana lingkungan permukiman yang saat ini kondisinya masih terbatas. Agar iklim usaha dapat membaik, maka peningkatan pelayanan transportasi, industri, dan permukiman diharapkan menjadi salah satu pemicu masuknya investasi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.

5.5 Strategi Pengembangan Ekonomi

Strategi pengembangan ekonomi ditujukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kawasan sesuai dengan peluang atau potensi pasar dan mengatasi kesenjangan ekonomi, melalui penetapan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi beserta sektor unggulannya dan merintis kerjasama ekonomi regional dengan wilayah tetangga, yang selanjutnya didukung oleh sarana-prasarana yang memadai agar kegiatan ekonomi dapat berjalan seoptimal mungkin namun dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.



Dengan mempertimbangkan karakteristik, maka strategi pengembangan ekonomi akan terfokus pada peningkatan kinerja ekonomi sektoral, karena salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah pertumbuhan ekonomi sektoral.

Strategi menerapkan pola insentif/disinsentif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan perniagaan terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga arah pemanfaatan ruang kawasan agropolitan dapat disinkronkan dengan rencana pengembangan yang disusun untuk mengakomodasi kepentingan investasi dan kepentingan konservasi dan perlindungan lingkungan. Karena dengan belum adanya kejelasan pola insentif dan disinsentif yang mendasari investasi pada kawasan agropolitan, akan menimbulkan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali bahkan cenderung melegalkan semua kepentingan investasi yang telah ada. Selain itu, strategi ini diharapkan pula dapat mendorong kerjasama ekonomi regional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik melalui penetapan pola insentif dan disinsentif ini.

5.6 Strategi Pengembangan Kelembagaan

Strategi Kelembagaan merupakan strategi yang bersifat memudahkan dalam hal operasionalisasi rencana yang telah disusun, terutama yang bersifat eksternal, yaitu menjalankan kerjasama antar Pemerintah (G to G), serta kelembagaan internal, yaitu dengan menerapkan pola kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta.

Strategi pengembangan pola kemitraan para stakeholder pembangunan dilakukan untuk mengurangi resistensi yang terjadi jika kawasan agropolitan dibuka untuk alokasi investasi dari luar. Hasil yang diharapkan tentunya adalah terjadinya juga peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan, bukan malahan semakin terdesak seperti pada pola pembangunan lainnya. Sehingga strategi pola kemitraan yang disusun terutama menyangkut dalam pola kemitraan dalam hal kepemilikan asset, seperti lahan, kegiatan plasma perkebunan, pemasaran hasil produksi masyarakat, pembukaan akses usaha kecil dan menengah, dan lain sebagainya.

Adapun strategi pengembangan kelembagaan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah mengembangkan kelembagaan tani dan kelembagaan masyarakat melalui fasilitas tani, bimbingan dan pembinaan yang diarahkan kepada kemandirian, dan partisipasi masyarakat.

5.7 Pentahapan Pengembangan Kawasan Agropolitan

5.7.1 Tahapan Pengembangan Agribisnis

Pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan dilakukan tidak lepas dari kegiatan untuk merealisasikan program ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis melalui tahapan pembangunan dan pola penerapan sistem agribisnis.

1. Tahap *Faktor Driven*

Tahap pertama pengembangan agribisnis bertumpu kepada keunggulan komparatif berupa ketersediaan lahan yang cukup luas, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang masih besar dan didukung oleh agroklimat yang sesuai. Dengan kata lain, input yang berupa sumberdaya alam (*natural resource input*) memiliki kontribusi yang cukup besar dalam proses produksi di sektor-sektor pertanian (pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan). Output yang dihasilkan pada tahap pertama belum dapat berkesinambungan ditinjau dari sudut pasar mengingat lemahnya kemampuan untuk bersaing dengan produk-produk lain. Disamping itu, secara ekonomi produk-produk yang dihasilkan pada tahap pertama tidak memberikan imbalan manfaat atau value added dari potensi pengembangan produk itu sendiri.

2. Tahap *Investment Driven*

Fungsi capital pada tahap kedua akan menggerakkan sistem agribisnis menjadi lebih produktif. Tambahan kenaikan output karena tambahan capital lebih besar dibandingkan dengan tambahan input sumberdaya alam. Dalam tahap kedua ini kekuatan investasi yang berupa peningkatan subsistem hilir (agroindustri) dan subsistem hulu (agrokimia, agrootomotif dan pengadaan input produksi lainnya) menjadi pendorong utama pertumbuhan sistem agribisnis. Dampak yang dihasilkan pada tahapan ini adalah *pertama*, akan terjadi akumulasi *capital (capital accumulation)* pada sistem produksi. *Capital labour ratio* atau perbandingan capital terhadap tenaga kerja akan lebih besar. Jumlah capital yang terakumulasi akan mengubah sistem produksi menjadi lebih produktif. Kedua, pada tahap ini akan diperoleh produk-produk yang lebih padat modal (*capital intensive*) daripada tenaga kerja terlatih (*skilled labour*). Ketiga, produk yang memiliki nilai tambah dan lebih kompetitif menggeser produk-produk yang hanya berbasis sumberdaya alam. Dan yang lebih penting produk akan lebih fleksibel terhadap perubahan-perubahan permintaan.

3. Tahap *Innovation Driven*

Adalah tahapan yang berbasiskan inovasi. Dalam tahap ini, perubahan teknologi yang merupakan produk inovasi merupakan penggerak utama walaupun tidak terjadi akumulatif capital. Inovasi menciptakan perubahan yang berkesinambungan dalam proses produksi dan juga perubahan apa

yang akan diproduksi. Perubahan teknologi atau inovasi akan menciptakan akumulasi capital secara meningkat (*increasing returns*).

5.7.2 Tahapan Pembangunan dan Pola Penerapan Sistem Agribisnis

Dasar pemikiran dalam tahapan pembangunan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah peningkatan pendapatan petani yang dapat dilakukan secara garis besar pada beberapa tahapan :

1. Peningkatan skala produksi yang dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan produktivitas per satuan luas, melalui penyediaan benih atau bibit unggul yang berkualitas dan bernilai ekonomis dengan mempertimbangkan faktor pasar dan efisiensi alokasi input. Dalam hal ini perlu mempersiapkan petani terampil dan terlatih (*skilled labour*) dan subsistem agribisnis lainnya.
2. Pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama (KUB) dan memperjelas distribusi serta pemasaran dengan pola sistem kerja sama (subsistem penunjang dan subsistem pemasaran). Kondisi ini akan memperkuat daya tawar produk pertanian, dibandingkan dengan sistem pemasaran secara perseorangan.
3. Meningkatkan pangsa pasar dengan dua cara yaitu :
 - a) melakukan penetrasi pasar atau pengembangan produk olahan (subsistem pengolahan dan sistem pemasaran). Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan outlet-outlet agribisnis pada lokasi-lokasi pasar yang strategis.
 - b) Membuka atau menjalankan kemitraan dengan pihak – pihak yang bergerak dalam pemasaran produk agropolitan.
4. Bekerjasama dengan lembaga keuangan, investor dan sumber pembiayaan lainnya, guna menunjang penyediaan modal (*capital*) dan bertujuan untuk meningkatkan penerapan dan pengembangan teknologi (subsistem penunjang).

5.7.3 Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Agribisnis

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan agribisnis ini berkaitan dengan misi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengembangan agribisnis yang terpadu. Penjabaran ini dirasa penting, terutama untuk menyamakan persepsi tentang peran-peran apa yang dilakukan dan dijalankan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam proses pengembangan agribisnis.

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah dimasa kini dan mendatang dalam pengembangan agribisnis adalah sebagai regulator, fasilitator dan stimulator yang menekankan pada upaya peningkatan kemandirian pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti sesuaidengan paradigmbangunan saat ini yang bersifat *bottom up*, maka inisiatif dan daya kreativitas dalam pengembangan dan pembangunan agribisnis harus lebih banyak datang dari masyarakat, sementara pemerintah sesuai peran diatas tanpa ikut campur dan intervensi terlampau jauh yang justru bisa mematikan upaya pembangunan dan pengembangan agribisnis yang mandiri.

Sejalan dengan itu dalam pelaksanaan pengembangan Agropolitan Kabupaten Ciamis, peran/fasilitasi pemerintah berupa :

- a. Menyusun dan menyebarkan pedoman-pedoman/petunjuk teknis/petunjuk praktis
- b. Melakukan sosialisasi keseluruh lapisan masyarakat
- c. Pelatihan
- d. Membantu mewujudkan program masyarakat
- e. Membantu melaksanakan identifikasi kawasan
- f. Membantu melaksanakan program sesuai dengan program yang disusun masyarakat
- g. Menumbuhkan motivasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- h. Membantu dalam memecahkan masalah
- i. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

2. Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengembangan agribisnis akan menjadi sangat besar dan signifikan pada masa mendatang, seiring dengan tumbuhnya proses demokratisasi pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pada periode pembangunan masa kini dan masa yang akan datang diharapkan peran masyarakat dalam pengembangan agribisnis makin strategis. Berikut ini diuraikan peran unsur-unsur masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan agribisnis :

a. Peran Pelaku Agribisnis

Pelaku agribisnis (petani, pengusaha agroindustri, pengusaha produk, dan pedagang) bagaimanapun adalah pelaku utama dari upaya pengembangan agribisnis. Untuk itu diharapkan pelaku agribisnis mampu berpartisipasi dan bahkan berprakarsa aktif di dalam program pengembangan agribisnis melalui :

- Identifikasi akar masalah atas berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi didalam pengembangan usaha mereka, serta mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai dapat membantu, seperti : penyedia BDS, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak strategis lainnya.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui upaya pengembangan jiwa kewirausahaan, pengembangan etos kerja dan disiplin kerja serta peningkatan komitmen moral yang tinggi.
- Melaksanakan secara seksama, konsisten dan berkesinambungan program pemberdayaan yang diberikan pemerintah dan lembaga lainnya untuk pengembangan usahanya.
- Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing produk barang dan jasa yang dihasilkan.
- Aktif dalam berbagai forum pengembangan usaha, asosiasi atau kadin sebagai wahana untuk pengembangan penyampaian aspirasi dan kebutuhannya untuk pengembangan usaha serta memperluas jaringan usaha.

b. Peran pengelola dan Anggota Koperasi

Wadah koperasi sebagai wadah bersama para petani/keompok agropolitan perannya akan sangat signifikan dalam upaya peningkatan daya tawar petani dan sebagai wadah dari kelompok usaha bersama. Peran pengelola dan anggota koperasi harus mampu menempatkan diri sebagai pelaku utama dalam proses pengembangan agribisnis. Untuk itu diharapkan agar pengelola dan anggota koperasi mampu berpartisipasi dan berprakarsa dalam program pemberdayaan koperasi melalui :

- Identifikasi akar masalah atas berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi , serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang dinilai dapat membantu seperti : penyedia BDS, Dekopinda dan instansi pemerintahan terkait atau DPRD.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui upaya pengembangan jiwa kewirausahaan, pengembangan etos kerja dan disiplin kerja.
- Melaksanakan secara seksama, konsisten dan berkesinambungan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk pengembangan kelembagaan dan usaha koperasinya.
- Meningkatkan loyalitas anggota sebagai pelanggan dan sekaligus sebagai pemilik melalui pendidikan perkoperasian kepada anggota dan peningkatan layanan koperasi kepada anggota.

c. Peran Asosiasi Petani

Kadin, asosiasi dan kelompok agropolitan adalah wadah bagi petani/pengusaha untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi petani/pengusaha, diharapkan memiliki peran besar dalam proses pengembangan agribisnis. Peran tersebut adalah :

- Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi pelaku bisnis dalam rangka menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi pelaku agribisnis melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan perkuatan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga internasional dan lembaga lainnya agar pelaku agribisnis dapat bersaing dalam mekanisme pasar yang sehat.
- Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi para anggotanya dan memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi pengembangan untuk anggotanya.
- Mengembangkan forum komunikasi dan mengembangkan informasi bisnis, pasar dan teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pasar, produktivitas dan daya saing anggotanya.
- Mengembangkan kerjasama antar anggota dan antar pelaku agribisnis dengan pengusaha lainnya ditingkat daerah, nasional dan internasional.
- Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan agribisnis dengan pemerintah daerah dan instansi daerah lainnya, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

d. Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan dalam pengembangan agribisnis memiliki peran yang penting, yaitu :

- Melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan dan kebutuhan pelaku agribisnis dalam pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program pemberdayaannya kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.
- Mengembangkan teknologi tepat guna dan paket teknologi dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas serta daya saing pelaku agribisnis.
- Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi, pemanfaatan teknologi, informasi serta pelatihan untuk mengembangkan kompetensi SDM pelaku agribisnis, sehingga dapat mengembangkan usahanya secara berkesinambungan.
- Mengembangkan penelitian dan pengkajian yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, pengembangan

SDM pelaku agribisnis serta model-model pengembangan alternative untuk pelaku agribisnis.

- Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan agribisnis dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, asosiasi pelaku agribisnis dan LSM.

e. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Peran LSM dalam pengembangan agribisnis antara lain :

- Melakukan identifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan pelaku agribisnis dalam pengembangan usahanya, serta merumuskan dan menyampaikan program pemberdayaan kepada pemerintah dan lembaga lain yang relevan.
- Melaksanakan advokasi kebijakan pemerintah dalam rangka menumbuhkan iklim berusahayang kondusif dan pemberian dukungan perkuatan bagi pelaku agribisnis.
- Memberikan dukungan perkuatan kepada pelaku agribisnis untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saingnya agar mampu bersaing dan kokoh dalam mekanisme pasar yang sehat.
- Mengembangkan lembaga penyedia sarana penunjang dan mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pelatihan untuk pengembangan kompetensi SDM pelaku agribisnis, sehingga dapat mengembangkan usahanya secara berkesinambungan.
- Membantu menarik investasi baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara.

f. Peran Perbankan dan Lembaga Keuangan

Peran perbankan dan lembaga keuangan dalam pengembangan agribisnis antara lain :

- Mengembangkan paket pembiayaan dan permodalan untuk mengembangkan usaha pelaku agribisnis, termasuk pengembangan pola dan model pembiayaan alternatif.
- Mengembangkan program pendampingan, bimbingan, konsultasi dan pelatihan pemanfaatan pembiayaan dan permodalan untuk pengembangan usahanya secara berkesinambungan.
- Mengembangkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan pembiayaan pelaku agribisnis dengan pihak pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, asosiasi pelaku bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

g. Peran Organisasi Profesi dan Lembaga Masyarakat Lainnya.

Peran organisasi profesi seperti partai politik, organisasi social kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak dalam bidang pengembangan agribisnis, yang utama adalah memberikan masukan atas identifikasi masalah yang mereka kembangkan, melaksanakan advokasi dan menumbuhkan iklim kondusif dalam berusaha dan pemberian dukungan perkuatan bagi pelaku agribisnis melalui jaringan kerja mereka.





Bab 6

Rencana Pengembangan

Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis

6.1 Rencana Pengembangan Ruang Makro

Sejalan dengan fungsi dan peran Kabupaten Ciamis sebagai sentra pertanian, maka rencana pengembangan ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis didominasi oleh kawasan pertanian dan peternakan. Keberadaan Gunung Sawal dan hutan berpotensi lindung di gunung tersebut relatif membatasi ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya. Kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, terutama dari sisi hidrologi.

Terkait dengan upaya pengembangan Kawasan Agropolitan, secara keruangan alokasi ruang yang tersedia dibagi menjadi dua, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Lebih jelasnya rencana alokasi ruang di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Gambar 6.1 berikut.



Gambar 6.1

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis



6.2 Rencana Pengembangan Sumberdaya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor penting dalam perencanaan wilayah. Mengamati karakteristik perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa pola perkembangan penduduk secara umum, yaitu dapat berbentuk linier, eksponensial, geometrik ataupun bentuk lainnya.

Jika dilihat dari perkembangan penduduk pada Tahun 2005 - 2009, perkembangan yang terjadi bersifat konstan. Hal ini menunjukkan adanya pola perkembangan penduduk yang bersifat eksponensial. Adapun persamaan pola perkembangan jumlah penduduk dengan menggunakan pola eksponensial adalah sebagai berikut :

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Dimana:

- P_t = Jumlah penduduk di tahun t (jiwa)
- P_o = Jumlah penduduk di tahun dasar (jiwa)
- r = Rata-rata prosentasi tambahan jumlah penduduk (%)
- n = Jangka waktu (dalam banyaknya tahun)

Jumlah penduduk tahun 2029 berdasarkan proyeksi sebesar 319.181 jiwa, ini berarti selama 20 tahun mendatang diperkirakan terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 123.881 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Proyeksi Jumlah Penduduk Dengan Metode Eksponensial
Wilayah Utara Ciamis Tahun 2009 - 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	
		2009	2029
1.	Cihaurbeuti	52.181	89.599
2.	Lumbung	9.833	16.558
3.	Panjalu	46.537	71.914
4.	Panumbangan	61.776	91.878
5.	Sukamantri	24.973	49.232
	Jumlah	195.300	319.181

Sumber : Laporan BP4K dan Hasil Analisis Tahun 2010

Keterangan ; Kecamatan Lumbung terdiri dari dua desa, yaitu Desa Lumbung dan Rawa

6.3 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah

6.3.1 Rencana Penyediaan Sarana Umum

6.3.1.1 Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan di Kawasan Agropolitan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yaitu berupa TK, SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi. Standar minimal penyediaan sarana pendidikan mengacu pada SPM Sarana Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepmen PU No. 378/KPTS/1987 yang berdasarkan jumlah penduduk. Untuk lebih jelas mengenai jumlah sarana pendidikan dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Proyeksi Fasilitas Pendidikan
di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sarana Pendidikan	Sarana yang ada	Sarana Minimal
1.	Cihaurbeuti	89.599	TK	11	89
			SD	36	56
			SMP	6	19
			SMA	6	19
			PT	-	1
2.	Lumbung	16.558	TK	8	17
			SD	24	10
			SMP	3	3
			SMA	6	3
			PT	-	-
3.	Panjalu	71.914	TK	7	72
			SD	33	45
			SMP	8	15
			SMA	6	15
			PT	-	1
4.	Panumbangan	91.878	TK	12	92
			SD	41	57
			SMP	6	19
			SMA	3	19
			PT	-	1
5.	Sukamantri	49.232	TK	2	49
			SD	16	30
			SMP	4	10
			SMA	2	10
			PT	-	0

Sumber : Ciamis dalam Angka & Hasil Analisis 2010

6.3.1.2 Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kawasan Agropolitan mencakup puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, poskesdes, balai pengobatan, praktek dokter/bidan, serta apotek. Perkiraan jumlah sarana kesehatan yang dibutuhkan ini didasarkan pada SPM Sarana Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kepmen PU No. 378/KPTS/1987. Namun dilihat dari kondisi ekisting terdapat beberapa jenis sarana kesehatan yang tidak terdapat dalam standar, namun baik jumlah maupun sebarannya sudah dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat, yaitu Puskesmas Keliling, Poskesdes, dan Posyandu.

Tabel 6.3
Proyeksi Fasilitas Kesehatan
Pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sarana Pendidikan	Sarana yang ada	Sarana Minimal
1.	Cihaurbeuti	89.599	RS	-	-
			Balai Pengobatan	4	30
			Puskesmas	2	0
			Puskesmas Pembantu	3	3
			Persalinan	11	9
			Apotek	-	9
			Praktek Dokter	11	18
2.	Lumbung	16.558	RS	-	-
			Balai Pengobatan	2	5
			Puskesmas	1	-
			Puskesmas Pembantu	3	-
			Persalinan	5	2
			Apotek	-	2
			Praktek Dokter	6	3
3.	Panjalu	71.914	RS	-	-
			Balai Pengobatan	2	24
			Puskesmas	1	-
			Puskesmas Pembantu	3	2
			Persalinan	4	7
			Apotek	2	7
			Praktek Dokter	6	14
4.	Panumbangan	91.878	RS	-	-
			Balai Pengobatan	3	30
			Puskesmas	2	-
			Puskesmas Pembantu	3	3
			Persalinan	6	9
			Apotek	1	9
			Praktek Dokter	10	18

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sarana Pendidikan	Sarana yang ada	Sarana Minimal
5.	Sukamantri	49.232	RS	-	-
			Balai Pengobatan	2	16
			Puskesmas	1	-
			Puskesmas Pembantu	3	2
			Persalinan	1	5
			Apotek	-	5
			Praktek Dokter	1	10

Sumber : Ciamis dalam Angka & Hasil Analisis 2010

Gambar 6.2

Sarana Pendidikan



Gambar 6.3

Sarana Kesehatan



6.3.1.3 Peribadatan

Kebutuhan ketersediaan fasilitas peribadatan di Kawasan Agropolitan mencakup mesjid, mushola, langgar, dan gereja. Kebutuhan fasilitas terbesar didasarkan pada SPM Sarana Peribadatan yang dikeluarkan oleh Kepmen PU No. 378/KPTS/1987. Dari informasi yang didapatkan, ternyata tingkat ketersediaan sarana peribadatan berada jauh di atas sarana minimal yang ada. Hanya saja harus diperhatikan bahwa untuk penyediaan sarana peribadatan bagi umat non musim harus memperhatikan jumlah pemeluk agamanya, sehingga tidak perlu mengikuti standar dikarenakan jumlahnya yang sedikit.

Tabel 6.4
Proyeksi Fasilitas Peribadatan
Pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sarana Pendidikan	Sarana yang ada	Sarana Minimal
1.	Cihaurbeuti	89.599	Masjid	72	1
			Musholla	9	5
			Langgar	300	5
			Gereja	0	-
2.	Lumbung	16.558	Masjid	26	1
			Musholla	103	2
			Langgar	103	2
			Gereja	1	-
3.	Panjalu	71.914	Masjid	80	1
			Musholla	50	2
			Langgar	140	2
			Gereja	0	-
4.	Panumbangan	91.878	Masjid	90	1
			Musholla	60	3
			Langgar	233	3
			Gereja	0	-
5.	Sukamantri	49.232	Masjid	70	0
			Musholla	9	1
			Langgar	186	1
			Gereja	0	-

Sumber: Ciamis dalam Angka dan Hasil Analisis, 2010.

6.3.1.4 Ekonomi

Kebutuhan fasilitas ekonomi di Kawasan Agropolitan mencakup pasar, warung, toko, dan minimarket. Kebutuhan fasilitas ekonomi didasarkan pada SPM Sarana Perekonomian yang dikeluarkan oleh Kepmen PU No. 378/KPTS/1987. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah sarana yang saat ini, beserta

proyeksinya sampai tahun 2029, sehingga dapat diprediksi berapa jumlah sarana perekonomian yang harus tersedia di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis untuk mendukung kegiatan penduduknya.

Tabel 6.5
Proyeksi Fasilitas Ekonomi
Pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2029

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sarana Pendidikan	Sarana yang ada	Sarana Minimal
1.	Cihaurbeuti	89.599	Pasar	1	2
			Warung	179	309
			Toko	0	31
			Minimarket	3	2
2.	Lumbung	16.558	Pasar	1	1
			Warung	98	187
			Toko	0	19
			Minimarket	2	1
3.	Panjalu	71.914	Pasar	1	2
			Warung	238	264
			Toko	0	26
			Minimarket	2	2
4.	Panumbangan	91.878	Pasar	2	3
			Warung	227	405
			Toko	0	37
			Minimarket	2	3
5.	Sukamantri	49.232	Pasar	1	1
			Warung	261	228
			Toko	0	23
			Minimarket	2	1

Sumber : Ciamis dalam Angka dan Hasil Analisis, Tahun 2007

Gambar 6.4

Sarana Peribadatan



Gambar 6.5

Sarana Perdagangan



6.3.2 Arahan Penyediaan Prasarana Umum

6.3.2.1 Air Bersih

Pengembangan air bersih direncanakan sebagai berikut ::

- Wilayah dengan kategori terlayani system perpipaan PDAM eksisting, tetap dilayani system perpipaan PDAM.
- Wilayah dengan kategori rencana pengembangan PDAM dilayani dengan system perpipaan PDAM.
- Wilayah dengan kategori terlayani program WSLIC-2, dilayani dengan sisten eksisting WSLIC-2.
- Wilayah dengan kategori tidak dilayani system PDAM dan tidak termasuk ke dalam rencana pengembangan system perpipaan PDAM, direncanakan dilayani dengan sarana air bersih perdesaan.
- Wilayah dengan kategori tidak dilayani system PDAM dan tidak termasuk dalam rencana pengembangan system perpipaan PDAM, sebagian pelayanan dilakukan dengan program WSLIC-2, direncanakan dilayani dengan sarana air bersih perdesaan.
- Wilayah dengan kategori non PDAM, tetapi sebagian terlayani dengan program WSLIC-2, pengembangannya direncanakan dengan sarana air bersih perdesaan.

Tabel 6.6
Arahan Pelayanan Air Bersih
Pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis Tahun 2009

No.	Kecamatan	Usulan Sisem PDAM dan Pengembangan	Usulan Sistem Non PDAM (Perdesaan)
1.	Cihaurbeuti	Sistem penyediaan air bersih eksisting PDAM wilayah pelayanan Ciamis, melalui peningkatan debit produksi sumber air S. Cimuntur & S. Citanduy	SAB perdesaan dengan sumber air dan air tanah atau mata air, untuk pelayanan kecamatan : 1. Panjalu 2. Cihaurbeuti
2.	Panumbangan		
3.	Lumbung	Pembangunan system penyediaan air bersih wilayah PALUPASU (Panawangan, Lumbung, Panjalu, dan Sukamantri dengan sumber air Kalijambe)	
4.	Panjalu		
5.	Sukamantri		

Sumber : Hasil Analisis, 2010

6.3.1.2 Air Limbah

- Mengembangkan sistem pengelolaan limbah tinja dengan menggunakan sistem penyaluran limbah *on site*.
- Membangun kesadaran masyarakat untuk memperhatikan dan berpartisipasi dalam hal sanitasi lingkungan.
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau membangun dan menggunakan MCK baik pribadi maupun umum untuk mengurangi beban limbah domestik di badan air penerima.
- Melengkapi industri dengan IPAL
- Idealnya, diperlukan luasan 2 Ha untuk kebutuhan pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja) yang dapat melayani 10.000 orang.
- Arahan sampai dengan tahun 2029 khusus untuk Kawasan Agropolitan sedikitnya dibutuhkan 2 (dua) IPLT dengan lingkup pelayanan sebagai berikut
 - IPLT Kawali, dengan lingkup pelayanan didalamnya termasuk Kecamatan Lumbung.
 - IPLT Panumbangan, dengan lingkup pelayanan Kecamatan Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, dan Sukamantri.
- Perencanaan lebih rinci diatur dalam masterplan air limbah.

6.3.1.3 Drainase

- Penataan dan pengembangan sistem drainase dengan memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan secara terpadu dan menyeluruh dengan infrastruktur lain.
- Pengembangan sistem jaringan drainase tetap memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada, membangun sistem jaringan drainase baru serta memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebagai jaringan pembuangan akhir.
- Rencana pengembangan sistem drainase diarahkan pada sistem drainase makro dan sistem drainase perkotaan.
- Sasaran dari rencana pengembangan sistem drainase ini adalah tersedianya sistem yang memiliki kapasitas memadai.
- Adapun pokok-pokok rencana tersebut antara lain :
 - Normalisasi jaringan drainase yang ada ;
 - Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan ;
 - Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan ;

- Pembangunan & pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan ;
- Pembuatan embung penahan aliran pada lokasi sesuai.
- Perencanaan drainase diatur lebih rinci dalam masterplan drainase.

6.3.1.4 Irigasi

Upaya peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui intensifikasi diantaranya penyediaan prasarana irigasi agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim. Hal ini merupakan bagian terpenting untuk menjamin Indeks Pertanaman 300 % diperlukan keterjaminan air irigasi, maka di sentra – sentra produksi padi perlu dibuat jaringan irigasi dan di daerah yang telah ada irigasinya dilakukan perbaikan dan pemeliharaan yang intensif.

Tabel 6.7
Rencana Peningkatan dan Pembangunan
Jaringan Irigasi Berdasarkan Luas Lahan Sawah
Pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2008 (Ha)

No.	Kecamatan	Peningkatan Status (Ha)		Pembangunan Tadah Hujan (Ha)
		Irigasi 1/2 teknis	Irigasi Sederhana	
1.	Cihaurbeuti	-	1.036	-
2.	Lumbung	10	811	98
3.	Panumbangan	410	266	55
4.	Sukamantri	-	467	373

Sumber : Hasil Analisis, 2010

6.3.1.5 Persampahan

Sistem yang terkait adalah sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengelolaan akhir.

- Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah melalui pengembangan sistem pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pemulihan.
- Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah dilaksanakan melalui sistem terpilah.
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola persampahan secara reguler.

- Direncanakan 2 (dua) wilayah pelayanan TPA di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, yang tiap wilayah pelayanan harus memiliki TPA sebagai berikut :
 - Wilayah pelayanan Kecamatan Lumbung ;
 - Wilayah pelayanan Kecamatan Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, dan Sukamantri.
- Pengaturan pengelolaan sampah diatur lebih rinci dalam masterplan persampahan.

Gambar 6.7
Peta Irigasi



Gambar 6.6

Peta Sistem Persampahan



6.3.1.6 Energi

- Pengembangan jaringan listrik dilakukan melalui penambahan daya listrik secara bertahap dan terpadu dengan pengembangan infrastruktur lainnya.
- Pengembangan pemanfaatan sumber energi listrik mikrohidro.
- Pengembangan pemanfaatan sumber – sumber energi dari tenaga surya dan tenaga angin di wilayah perdesaan potensial serta belum terjangkau jaringan listrik.
- Pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas sebagai sumber energi alternatif di kawasan perdesaan.
- Energi tak terbarukan, mencakup pengembangan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak (BBM), gas, dan batu bara untuk meningkatkan pasokan energi listrik. Rencana pengembangan energi tak terbarukan mewujudkan pemerataan cakupan pelayanan energi listrik melalui pengembangan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik.

6.3.1.7 Telematika

- Pengembangan sistem jaringan telepon diprioritaskan di kawasan perkotaan (ibu kota kecamatan).
- Pengembangan jaringan telepon selular pada kawasan perkotaan dan perdesaan yang jaraknya jauh atau belum terjangkau jaringan telepon kabel atau kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan terestrial telekomunikasi.
- Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon genggam/handphone (daerah *blank spot*).
- Pengembangan jaringan telepon pada desa-desa yang dapat diakses oleh jaringan kabel telepon atau sinyal handphone tetapi desa tersebut tergolong miskin.
- Penerapan sistem pemakaian jaringan BTS bersama antar berbagai operator telepon selular untuk efisiensi jaringan dan lahan.

Khusus untuk Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, prioritasnya adalah :

- Prioritas I, wilayah dengan peruntukkan lahan yang penting dan vital bagi perkembangan ekonomi kota/desa, termasuk di dalamnya Kecamatan Panjalu.

- Prioritas II, meliputi kawasan yang berkedudukan sebagai pusat pelayanan kawasan selain Kecamatan Panjalu, dan kawasan perdesaan yang merupakan sentra-sentra produksi pertanian.
- Prioritas III, yaitu pemerataan pelayanan di seluruh kawasan perdesaan, terutama di desa-desa pusat pertumbuhan.

6.4 Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

Rencana pengembangan sistem transportasi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis meliputi rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kecamatan Cihaurbeuti, rencana fungsi jalan kolektor primer, rencana jalan fungsi lokal primer dan lingkungan primer, serta pengembangan terminal. Rencana pengembangan transportasi tersebut merupakan sistem yang menunjang terhadap aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, sehingga diperlukan rencana pengembangan transportasi yang terpadu dengan sistem rencana tata ruangnya agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara sinergis.

Fungsi utama sistem transportasi adalah menunjang kegiatan pemindahan manusia dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam pengembangan wilayah, sistem transportasi berfungsi untuk menjembatani keterkaitan fungsional antar kegiatan sosial ekonomi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan tata ruang wilayah di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis. Rencana pengembangan sistem transportasi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem transportasi Kabupaten Ciamis.

Pengembangan sistem transportasi darat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis ditujukan untuk menunjang dan mendorong kelangsungan sektor-sektor strategis. Pengembangan sistem transportasi ini digunakan sebagai prasarana utama untuk mengangkut hasil sektor-sektor strategis ke pusat pengumpulan dan atau pusat pemasaran. Secara umum pengembangan sistem transportasi darat diarahkan untuk dapat mempercepat tercapainya tujuan pemerataan dan peningkatan pembangunan wilayah. Prioritas utama pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi darat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis ditujukan pada daerah-daerah berakses rendah. Hal ini bertujuan untuk membuka keterisolasian kawasan serta dapat menghubungkan daerah produksi dengan pusat koleksi dan distribusi.

Sebagai salah satu instrumen pemicu pengembangan wilayah, kebutuhan terhadap sistem transportasi jalan raya sangat dibutuhkan untuk perkembangan

kegiatan ekonomi, khususnya yang berskala menengah dan besar. Rencana Pengembangan sistem transportasi darat diupayakan saling mendukung dengan sistem transportasi lainnya sehingga diharapkan peranan dari masing-masing mata transportasi dapat terjalin dengan baik.

6.4.1 Rencana Fungsi Jalan Kolektor

Rencana pengembangan fungsi jalan kolektor di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis meliputi peningkatan kualitas dan peningkatan dimensi badan jalan standar minimal 9 m (eksisting 3 – 4,5 m) yang berlokasi di PKW Kadipaten – PKL Ciamis, melalui Cipaku – Kawali – Panawangan yang berbatasan langsung dengan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.

6.4.2 Rencana Jalan Fungsi Lokal Primer dan Lingkungan Primer

Rencana jalan fungsi lokal primer dan lingkungan primer merupakan rencana peningkatan kualitas dan peningkatan dimensi dari jalan kabupaten dan beberapa jalan desa yang dapat diusulkan untuk ditingkatkan menjadi jalan kabupaten.

Untuk peningkatan dimensi, badan jalan standar direncanakan mengalami peningkatan minimal 7,5 m untuk lokal primer dan 6,5 m untuk lingkungan primer dari kondisi eksisting yang hanya 3 – 4,5 m.

Untuk Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, ruas jalan yang direncanakan untuk mengalami peningkatan kualitas dan dimensi adalah :

- Lokal primer :
 - PKL Panjalu – PPK Sukamantri – Perbatasan (Jahim)
 - PKL Panjalu – PPK Panumbangan (perbatasan kabupaten)
- Lingkungan primer :
 - PPK Panawangan – PPK Jatinegara yang berbatasan langsung dengan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
 - PPK Panumbangan – PPK Sukamantri – PPK Panawangan – Perbatasan (Sindangbarang, Cimuncang)
 - PPK Cihaurbeuti – PPK Panumbangan

6.4.3 Rencana Pengembangan Terminal

- Pengoptimalan terminal tipe C di Kecamatan Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, dan Sukamantri.
- Penyediaan terminal tipe C di Kecamatan Lumbung yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kota.
- Penyediaan Terminal Sub Agribisnis di Kecamatan Cihaurbeuti, Panjalu, dan Sukamantri.

Gambar 6.7

Rencana Pengembangan Transportasi



Tabel 6.8
Rincian Rencana Pengembangan Sarana & Prasarana
Kawasan Panumbangan

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
1.	Sarana Pendidikan	• TK	92 unit
		• SD	57 unit
		• SMP	19 unit
		• SMA	19 unit
		• Perguruan Tinggi	1 unit
2.	Sarana Kesehatan	• RS	-
		• Balai Pengobatan	30 unit
		• Puskesmas	-
		• Puskesmas Pembantu	3 unit
		• Persalinan	9 unit
		• Apotek	9 unit
		• Praktek Dokter	18 unit
3.	Sarana Peribadatan	• Masjid	1 unit
		• Musholla	3 unit
		• Langgar	3 unit
		• Gereja	-
4.	Sarana Perdagangan	• Pasar	3 unit
		• Warung	405 unit
		• Toko	37 unit
		• Minimarket	3 unit
5.	Sarana Penunjang Pertanian	1. Tanaman Pangan :	10
		Hand Traktor	69
		Hand Spayer	2.5
		Power Sprayer	1
		Pompa Air	4988
		Cangkul	6100

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
		Congkrang	3125
		garpu	635
		Emposan Tikus	9
		Huller	76135
		Caplak	7
		Pedal Trasher	43
		Pemipil Jagung	875
		2. Perkebunaan :	25
		Gacok	160
		Garpu	38
		Gunting Stek	58
		Gaet Pangkas	880
		Parang	7
		Mist Blower	0
		3. Perikanan :	1875
		Sair Lambit	1435
		Sirib	280
		Hapa	10
		Heurap	10
		4. Pompa Air	42
		5. Saung Tani	1
		6. Penakar Hujan	1
		7. Soil Tester	1
		8. Soil Kit	5
		9. Papan BWD	1
		10. Pengukur Suhu	1
		11. Perpustakaan	2
		12. Poultry Shop	1
		13. Pasar Ikan	3
		14. Koptan	8
		15. Kios Saprotan	14

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
		16. Huller	1
		17. BRI	1
		18. BNI	1
		19. Bank Jabar	1
		20. Pasar Umum	1
		21. STA	1
		22. KUD	1
		23. Penggilingan Pakan Ternak	10
6.	Prasarana Air Bersih	Usulan sistem PDAM & Pengembangan Sistem penyediaan air bersih eksisting PDAM wilayah pelayanan Ciamis, melalui peningkatan debit produksi sumber air S. Cimuntur & S. Citanduy	
7.	Prasarana Air Limbah	IPLT Panumbangan	
8.	Prasarana Transportasi	Jalan Lokal Primer	
		Jalan Lingkungan Primer	
		<ul style="list-style-type: none"> • PPK Panumbangan – PPK Sukamantri – PPK Panawangan – Perbatasan (Sindangbarang, Cimuncang) • PPK Cihaurbeuti – PPK Panumbangan 	
		Pengoptimalan Terminal Tipe C	
9.	Prasarana Irigasi	Tadah Hujan	55 ha
		Irigasi Sederhana	266 ha
		Irigasi ½ teknis	410 ha
10.	Prasarana Listrik	Perluasan Jaringan	
		Penambahan Daya	
11.	Prasarana Telekomunikasi	Prioritas II	
12.	Prasarana Persampahan	Pembuatan TPA	
13.	Kelompok Tani	Penambahan Kelompok Tani	37 kel.

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Tabel 6.9
Rincian Rencana Pengembangan Sarana & Prasarana
Kawasan Cihaurbeuti

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
1.	Sarana Pendidikan	• TK	89 unit
		• SD	56 unit
		• SMP	19 unit
		• SMA	19 unit
		• Perguruan Tinggi	1 unit
2.	Sarana Kesehatan	• RS	-
		• Balai Pengobatan	30 unit
		• Puskesmas	0
		• Puskesmas Pembantu	3 unit
		• Persalinan	9 unit
		• Apotek	9 unit
		• Praktek Dokter	18 unit
3.	Sarana Peribadatan	• Masjid	1 unit
		• Musholla	5 unit
		• Langgar	5 unit
		• Gereja	-
4.	Sarana Perdagangan	• Pasar	2 unit
		• Warung	309 unit
		• Toko	31 unit
		• Minimarket	2 unit
5.	Sarana Penunjang Pertanian	Hand Sprayer	58
		Huller	21
		Hand Traktor	8
		Pedal Treser	1
		Sabit Bergerigi	3316
		Caplak	1175

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
		Mesin Tepung	7
		Panrik Tahu	45
		Perontok Kedelai	1
		Terpal	345
		TPK Saptodi	1
		Pompa Air	2.5
		APO	1
6.	Prasarana Air Bersih	Usulan sistem PDAM & Pengembangan	
		Sistem penyediaan air bersih eksisting PDAM wilayah pelayanan Ciamis, melalui peningkatan debit produksi sumber air S. Cimuntur & S. Citanduy	
		Usulan Sistem Non PDAM (Perdesaan)	
		SAB perdesaan dengan sumber air dan air tanah atau mata air	
7.	Prasarana Air Limbah	IPLT Panumbangan	
8.	Prasarana Transportasi	Lingkungan Primer	
		➤ PPK Cihaurbeuti – PPK Panumbangan	
		Pengoptimalan Terminal Tipe C	
		Penyediaan Sub Terminal Agribisnis	
9.	Prasarana Irigasi	Irigasi Sederhana	1.036 ha
10.	Prasarana Listrik	Perluasan Jaringan	
		Penambahan Daya	
11.	Prasarana Telekomunikasi	Prioritas II	
12.	Prasarana Persampahan	Pembuatan TPA	
13.	Kelompok Tani	Penambahan Kelompok Tani	48 kel.

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Tabel 6.10
Rincian Rencana Pengembangan Sarana & Prasarana
Kawasan Lumbung

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
1.	Sarana Pendidikan	• TK	17 unit
		• SD	10 unit
		• SMP	3 unit
		• SMA	3 unit
		• Perguruan Tinggi	-
2.	Sarana Kesehatan	• RS	-
		• Balai Pengobatan	5 unit
		• Puskesmas	-
		• Puskesmas Pembantu	-
		• Persalinan	2 unit
		• Apotek	2 unit
		• Praktek Dokter	3 unit
3.	Sarana Peribadatan	• Masjid	1 unit
		• Musholla	2 unit
		• Langgar	2 unit
		• Gereja	-
4.	Sarana Perdagangan	• Pasar	1 unit
		• Warung	187 unit
		• Toko	19 unit
		• Minimarket	1 unit
5.	Sarana Penunjang Pertanian	BRI	1
		KUD	1
		Kios Saprotan	8
		Pasar Umum	1
		Lumbung	1
		Huller	19

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
		Hand Sprayer	89
		Traktor	4
		Pompa Air	1
		Cangkul	3299
		Sabit Bergerigi	1971
		Caplak	3080
		Banting bertirai	3063
		Light trep	1
		Pengggajian kayu	5
6.	Prasarana Air Bersih	Usulan sistem PDAM & Pengembangan	
		Pembangunan system penyediaan air bersih wilayah PALUPASU (Panawangan, Lumbung, Panjalu, dan Sukamantri dengan sumber air Kalijambe)	
7.	Prasarana Air Limbah	IPLT Kawali	
8.	Prasarana Transportasi	Penyediaan Terminal Tipe C	
9.	Prasarana Irigasi	Tadah Hujan	98 ha
		Irigasi Sederhana	811 ha
		Irigasi 1/2 teknis	10 ha
10.	Prasarana Listrik	Perluasan Jaringan	
		Penambahan Daya	
11.	Prasarana Telekomunikasi	Prioritas III	
12.	Prasarana Persampahan	Pembuatan TPA	
13.	Kelompok Tani	Penambahan Kelompok Tani	24 kel.

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Tabel 6.11
Rincian Rencana Pengembangan Sarana & Prasarana
Kawasan Panjalu

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
1.	Sarana Pendidikan	• TK	72 unit
		• SD	45 unit
		• SMP	15 unit
		• SMA	15 unit
		• Perguruan Tinggi	1 unit
2.	Sarana Kesehatan	• RS	-
		• Balai Pengobatan	24 unit
		• Puskesmas	-
		• Puskesmas Pembantu	2 unit
		• Persalinan	7 unit
		• Apotek	7 unit
		• Praktek Dokter	14 unit
3.	Sarana Peribadatan	• Masjid	1 unit
		• Musholla	2 unit
		• Langgar	2 unit
		• Gereja	-
4.	Sarana Perdagangan	• Pasar	2 unit
		• Warung	264 unit
		• Toko	26 unit
		• Minimarket	2 unit
5.	Sarana Penunjang Pertanian	Traktor	6
		Hand Sprayer	84
		Huller	17
		Cangkul	4479
		Caplak	2397
		Sabit Bergerigi	1382

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Kuantitas
		Rontogan (RMU)	10
		Penggilingan Kopi	1
		Pengolahan The Hijau	1
		Kebun Rumput	16
		Kandang Ayam	137
		Kandang Sapi	78
		Jaring Apung	1
		Kakaban	853
		Hapa	16
		Kolam	58
		Garpu	78
		Mist Blower	2
		Power Sprayer	3
		Mesin Pemipil Jagung	5
		Pabrik Pakan	1
		Pengolahan Susu Pasteurisasi	1
		Appo	2
		Copper	1
		Motor 3 roda	2
		Mesin Penyedot Air	9
6.	Prasarana Air Bersih	Usulan sistem PDAM & Pengembangan	
		Pembangunan system penyediaan air bersih wilayah PALUPASU (Panawangan, Lumbung, Panjalu, dan Sukamantri dengan sumber air Kalijambe)	
		Usulan Sistem Non PDAM (Perdesaan)	
		SAB perdesaan dengan sumber air dan air tanah atau mata air	
7.	Prasarana Air Limbah	IPLT Panumbangan	
8.	Prasarana Transportasi	Lokal Primer	

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
		<ul style="list-style-type: none"> • PKL Panjalu – PPK Sukamantri – Perbatasan (Jahim) • PKL Panjalu – PPK Panumbangan (perbatasan kabupaten) 	
		Pengoptimalan Terminal Tipe C	
		Penyediaan Sub Terminal Agribisnis	
9.	Prasarana Irigasi	-	
10.	Prasarana Listrik	Perluasan Jaringan	
		Penambahan Daya	
11.	Prasarana Telekomunikasi	Prioritas I	
12.	Prasarana Persampahan	Pembuatan TPA	
13.	Kelompok Tani	Penambahan Kelompok Tani	67 kel.

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Tabel 6.12
Rincian Rencana Pengembangan Sarana & Prasarana
Kawasan Sukamantri

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Kuantitas
1.	Sarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • TK • SD • SMP • SMA • Perguruan Tinggi 	<p>49 unit</p> <p>30 unit</p> <p>10 unit</p> <p>10 unit</p> <p>-</p>
2.	Sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • RS • Balai Pengobatan • Puskesmas 	<p>-</p> <p>16 unit</p> <p>-</p>

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
		• Puskesmas Pembantu	2 unit
		• Persalinan	5 unit
		• Apotek	5 unit
		• Praktek Dokter	10 unit
3.	Sarana Peribadatan	• Masjid	1 unit
		• Musholla	1 unit
		• Langgar	1 unit
		• Gereja	-
4.	Sarana Perdagangan	• Pasar	1 unit
		• Warung	228 unit
		• Toko	23 unit
		• Minimarket	1 unit
5.	Sarana Penunjang Pertanian	BRI Unit	1
		Koptan	1
		Kios Saprotan	13
		Unit Penggilingan padi	7
		Unit penggilingan tapioka	1
		Unit Penggilingan Tepung ganyong	2
		Unit Penggergajian kayu	3
		Unit Pemipil Jagung	3
		Pasar Umum	1
		Pasar Agro	1
		Traktor	4
		Pompa Air	5
		Motor Sprayer	7
		Hand Spray	57
		Blower	6
		Alat Penipung Beras	4
		Emposan Tikus	2
		Cangkul	1069

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
		Alat Olahan manisan	2
		TPS (sayuran)	2
		P4S (pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya)	1
		Golok	226
		Gunting Stek	383
		gaet Pangkas	78
		Parang	133
		Sair Lambit	675
		Sirib	1298
6.	Prasarana Air Bersih	Usulan sistem PDAM & Pengembangan	
		Pembangunan system penyediaan air bersih wilayah PALUPASU (Panawangan, Lumbung, Panjalu, dan Sukamantri dengan sumber air Kalijambe)	
7.	Prasarana Air Limbah	IPLT Panumbangan	
8.	Prasarana Transportasi	Lokal Primer	
		• PKL Panjalu – PPK Sukamantri – Perbatasan (Jahim)	
		Lingkungan Primer	
		• PPK Panawangan – PPK Jatinegara	
		• PPK Panumbangan – PPK Sukamantri – PPK Panawangan – Perbatasan (Sindangbarang, Cimuncang)	
		Pengoptimalan Terminal Tipe C	
		Penyediaan Sub Terminal Agribisnis	
9.	Prasarana Irigasi	Tadah Hujan	373 ha
		Sederhana	467 ha
10.	Prasarana Listrik	Perluasan Jaringan	
		Penambahan Daya	

No	Rencana Pengembangan	Jenis Sarana / Prasarana	Penambahan (Kuantitas)
11.	Prasarana Telekomunikasi	Prioritas II	
12.	Prasarana Persampahan	Pembuatan TPA	
13.	Kelompok Tani	Penambahan Kelompok Tani	34 kel.

Sumber : Hasil Analisis, 2010

6.5 Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis

6.5.1 Rencana Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditetapkan komoditan unggulan dalam pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ciamis. Penetapan komoditas unggulan di Kabupaten Ciamis ditetapkan berdasarkan arahan kebijakan, tingkat produksi dan produktivitas pengembangan lahan yang ada. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, rencana pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Ciamis terdiri dari :

1. Padi
2. Palawija (Jagung)
3. Hortikultura (cabe)
4. Perkebunan (Teh dan Kopi)
5. Kehutanan (Albasia dan kayu rimba campuran)
6. Perikanan air tawar (Ikan Nila, Gurame dan udang galah)
7. Peternakan (Ayam Ras, Ayam petelur, Domba dan Sapi Potong)

Tabel 6.13
Arahan Pengembangan
Komoditas Unggulan

No	Komoditas Unggulan	Arah Pengembangan		
		Sentra Produksi	Penunjang Produksi	Komponen Pendukung
1	Padi Sawah	Kawasan Cihaurbeuti	Kawasan Lumbung Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Pertanian Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Jaringan Irigasi Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh Pertanian, Lembaga Pemasaran
2	Jagung	Kawasan Panumbangan	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Lumbung Kawasan Panjalu Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Pertanian Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh Pertanian, Lembaga Pemasaran embaga Penelitian dan Pengembangan
3	Cabe	Kawasan Sukamantri	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Lumbung Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Pertanian Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan,

No	Komoditas Unggulan	Arah Pengembangan		
		Sentra Produksi	Penunjang Produksi	Komponen Pendukung
				Lembaga Penyuluh Pertanian, Lembaga Pemasaran
4	Teh	Kawasan Sukamantri	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Lumbung Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Pertanian Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh Pertanian, Lembaga Pemasaran
5	Kopi	Kawasan Sukamantri	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Lumbung Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Pertanian Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh Pertanian, Lembaga Pemasaran
6	Albasia	Kawasan Cihaurbeuti	Kawasan Lumbung Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran
7	Kayu Rimba Campuran	Kawasan Cihaurbeuti	Kawasan Lumbung Kawasan Panjalu	Sarana : Sarana Produksi

No	Komoditas Unggulan	Arah Pengembangan		
		Sentra Produksi	Penunjang Produksi	Komponen Pendukung
			Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran
8	Ayam Ras	Kawasan Panjalu	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Lumbung Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran
10	Domba	Kawasan Panjalu	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Lumbung Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran
11	Sapi Potong	Kawasan Panjalu	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Lumbung Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik

No	Komoditas Unggulan	Arah Pengembangan		
		Sentra Produksi	Penunjang Produksi	Komponen Pendukung
				Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran
12	Ikan Nila	Kawasan Lumbung	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran
13	Ikan Gurame	Kawasan Lumbung	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran
14	Udang Galah	Kawasan Lumbung	Kawasan Cihaurbeuti Kawasan Panjalu Kawasan Panumbangan Kawasan Sukamantri	Sarana : Sarana Produksi Alat dan Mesin Saran pengolahan Sarana penyimpanan hasil Prasarana : Jalan / Aksesibilitas Telekomunikasi Listrik Kelembagaan : Lembaga Keuangan, Lembaga Penyuluh, Lembaga Pemasaran

Sumber : Hasil Analisis, 2010

6.5.2 Rencana Pengembangan Lahan

Potensi Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis untuk pengembangan pertanian dan perkebunan pada dasarnya ditentukan oleh sifat lingkungan fisik yang mencakup iklim, tanah, topografi/bentuk wilayah, hidrologi. Kecocokan antara sifat lingkungan fisik dengan persyaratan penggunaan atau komoditas yang dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan tersebut potensial untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa lahan yang digunakan untuk penggunaan tertentu dengan mempertimbangkan masukan (input) yang diperlukan akan mampu memberikan hasil (keluaran) sesuai yang diharapkan. Untuk meningkatkan produktivitas lahan yang tersedia, maka perlu disusun sebuah rencana pengembangan yang meliputi hal-hal berikut ini.

6.5.2.1 Rencana Pola Pemanfaatan Lahan

Lahan yang terdapat di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis memiliki tingkat kecocokan yang besar bagi hampir semua komoditas pertanian/perkebunan, oleh karena itu maka pola pemanfaatan lahan diupayakan intensif bagi penggunaan komoditas strategis dengan memperhatikan pola tanam dan kalender musim.

Asumsi Kebutuhan Lahan untuk HMT

Untuk menentukan kebutuhan lahan untuk HMT (Hijauan Makanan Ternak) dan seberapa besar kapasitas dari HMT tersebut, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Memilah jenis penggunaan lahan yang memungkinkan untuk dijadikan HMT. Dari hasil penelaahan terdapat tiga jenis penggunaan lahan yang dapat digunakan sebagai HMT, yaitu penggunaan lahan untuk tegalan, penggunaan lahan untuk pengembalaan hewan ternak, dan penggunaan lahan untuk lainnya (lahan kritis, pekarangan, dll).
2. Kebutuhan HMT untuk ternak sapi adalah minimal 25 tumbak, dengan jarak tanam 60 cm, untuk kebutuhan 1 tahun penggemukan dengan syarat produk tiftus baik (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat).

Tabel 6.14
Penggunaan Lahan untuk HMT
Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis
Tahun 2008

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)				Jumlah Luasan HMT 1+2+4	Ternak Besar & Kecil (ekor) (Sapi & Kambing)
		Tegalan	Penggembalaan	Penggunaan Lahan Lain-Lain			
		1	2	3	4	5	
1	Panumbangan	2062		267	80.1	2142.1	612.029
2	Panjalu	1747	64	609	182.7	1993.7	569.629
3	Cihaurbeuti	996	7	423	126.9	1129.9	322.829
4	Lumbung	860	4	0	0	864	246.857
5	Sukamantri	583	21	159	47.7	651.7	186.200

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010

Dari tabel diatas terlihat jumlah luasan dari penggunaan lahan untuk difungsikan sebagai HMT, berikut jumlah ternak besar optimal yang dapat didukung oleh HMT tersebut.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk penambahan jumlah ternak, karena sumber pakan ternak selain dari HMT bisa juga menggunakan *recycle farm* dari batang dan daun jagung serta jerami padi.

6.5.2.2 Rencana Peningkatan Kualitas Lahan

Rencana peningkatan kualitas lahan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap sejumlah faktor, antara lain :

- Menjaga kondisi kelembaban tanah dengan cara memperhatikan sistem pengairan.
- Memberikan pemupukan yang berimbang dengan memperhatikan komoditas yang dibudidayakan.
- Memberikan sistem aerasi terhadap kondisi tanah dengan upaya menjaga tingkat kegemburan.
- Memberikan bahan yang memberikan rangsangan terhadap perbaikan struktur tanah sehingga diperoleh zona perakaran yang baik.
- Melakukan pengolahan tanah yang tepat dalam arti efektif dan efisien.
- Mengatur tingkat keasaman tanah pada posisi yang optimal bagi pertumbuhan tanaman.

- Membuat sistem drainase yang baik untuk menghindari banjir atau genangan yang menyebabkan busuknya akar tanaman.
- Rekayasa fisik bagi lahan yang potensial terkena erosi dengan menerapkan sistem konservasi tanah.

6.5.2.3 Rencana Pengembangan Kawasan

Sistem pengembangan kawasan pertanian di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis pada dasarnya merupakan upaya peningkatan fungsi kawasan yang didasarkan pada peluang pengembangan yang terkandung didalamnya. Upaya ini bisa dilakukan melalui pendekatan teknis, strategis dan pendekatan politis. Pendekatan teknis dilakukan melalui penelaahan kemampuan Kabupaten Ciamis secara komprehensif, dimana secara faktual Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis mempunyai kemampuan lahan yang baik bagi pengembangan pertanian dan perkebunan baik dilihat dari sumberdaya lahan, agroklimat dan sumberdaya ruang.

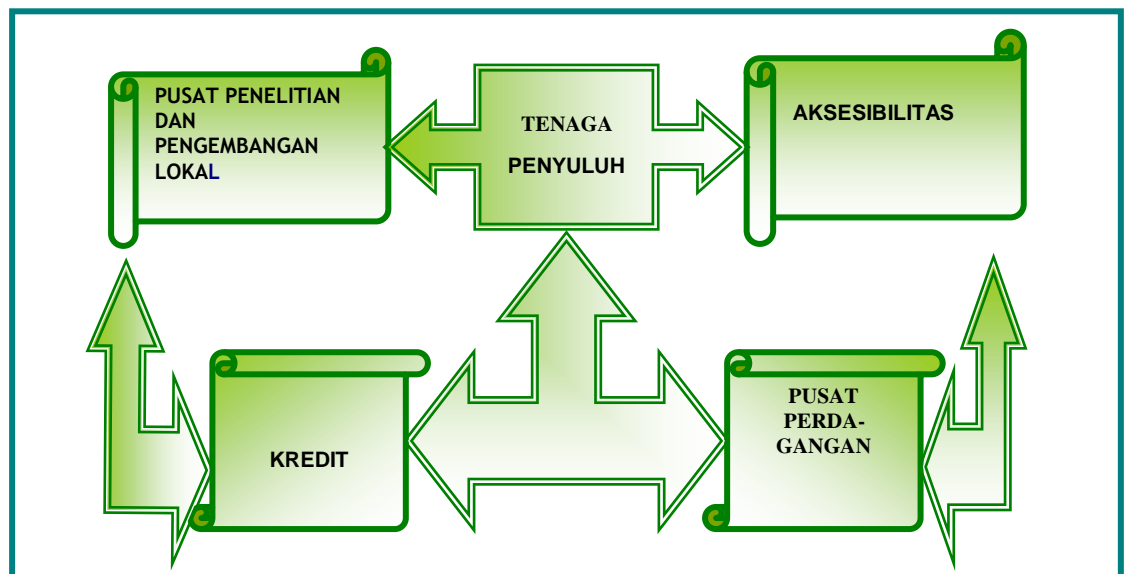
Pendekatan strategis dapat dilihat dari tingkat kepentingan Kabupaten Ciamis dalam menyediakan sumber bahan pangan bagi penduduknya yang ternyata masih impor bagi sejumlah komoditas. Oleh karena itu pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Ciamis sangat strategis untuk dilakukan. Sedangkan pendekatan politis dilakukan melalui kebijakan yang ada, dimana hal tersebut telah sesuai dengan kondisi eksisting yang terdapat di Kabupaten Ciamis. Untuk mensinergiskan perkembangan kawasan secara keseluruhan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, maka perlu adanya keterpaduan sistem pengembangan melalui konsep lokalitas pertanian. Lokalitas pertanian tersebut merupakan suatu rekayasa wilayah yang tidak terlalu luas, sehingga para petani dapat melakukan mobilisasi dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi menuju pusat koleksi dan distribusi dengan aksesibilitas yang tinggi.

Lokalitas pertanian/perkebunan dibentuk untuk memudahkan pertumbuhan wilayah terutama mempercepat pertumbuhan sektor pertanian/perkebunan. Strategi pembentukan lokalitas pertanian/perkebunan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- Membentuk satu pusat koleksi distribusi dengan beberapa tempat jual beli untuk hasil bumi dan dibentuk lokasi-lokasi untuk mengecerkkan sarana produksi dan alat-alat pertanian.
- Membangun dan atau memperbaiki prasarana jalan yang menghubungkan sentral produksi dengan tempat koleksi dan distribusi.
- Membentuk lokasi pengujian lokal untuk memperoleh cara-cara bertani yang paling menguntungkan.

- Menyediakan dan memberdayakan penyuluh pertanian.
- Menyediakan lembaga permodalan, baik berupa bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Gambar 6.8
Komponen Lokalitas Usaha Tani



6.5.3 Rencana Pengembangan Off Farm Hulu

6.5.3.1 Rencana Penyediaan Sarana Prasarana

Dalam sistem agribisnis, rencana pengadaan sarana produksi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis merupakan titik awal kegiatan pertanian yang sangat menentukan proses selanjutnya. Sarana produksi pertanian yang memiliki kualitas baik merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu usahatani. Rencana sarana produksi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis tersebut meliputi bibit unggul, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan serta alat dan mesin produksi.

Dalam sistem usahatani terpadu di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, pengadaan dan penyaluran sarana produksi ditangani secara baik, terorganisir dan memiliki ketepatan baik dari sisi waktu, mutu, lokasi dan daya guna. Untuk memenuhi target-target tersebut maka pengadaan dan penyaluran sarana produksi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dilakukan melalui berbagai alternatif, antara lain dengan cara :

- 1) mendirikan sub terminal agribisnis
- 2) peningkatan kinerja kelompok tani
- 3) peningkatan peran dan fungsi koperasi.

Penyedia sarana dan prasarana pada sub sistem *off farm hulu* di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis terdiri dari penyediaan prasarana wilayah dan penyediaan sarana produksi. Rencana penyediaan dan atau pengembangan prasarana wilayah di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

A. Rencana pemeliharaan dan perbaikan sistem irigasi

Jaringan irigasi merupakan sumberdaya prasarana pertanian yang memiliki nilai investasi yang cukup mahal, sehingga harus dipelihara dan dioptimalkan penggunaannya. Rencana pemeliharaan dan perbaikan sistem irigasi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, meliputi :

- Memelihara saluran primer dengan melakukan pengerukan sedimen dan pembersihan saluran dari tumbuhan liar.
- Menjaga debit aliran dengan upaya melindungi sumber-sumber air baku.
- Pemeliharaan jaringan sekunder dan tersier terutama pada lokasi-lokasi sentra produksi.

B. Rencana pengembangan daerah pelayanan irigasi

Daerah pelayanan irigasi merupakan areal pertanian yang memiliki sistem pengairan dari sistem irigasi yang ada. Pada saat berlimpah biasanya areal ini tidak memiliki masalah dengan pemenuhan kebutuhan air, tetapi pada musim kemarau tidak jarang areal yang menjadi daerah pelayanan irigasi mengalami kesulitan air. Rencana pengembangan daerah pelayanan irigasi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, meliputi :

- Pengaturan pola tanam pada areal pelayanan irigasi dengan pendekatan efisiensi penggunaan air.
- Melakukan sistem pergiliran pengaliran air irigasi pada saat terjadi penurunan debit.

C. Rencana pemeliharaan sumber-sumber air baku

Rencana pemeliharaan sumber air baku dapat dilakukan melalui :

- Pengamanan lokasi sumber air baku dari aktivitas manusia yang akan mengurangi kuantitas dan kualitasnya.
- Menjadikan kawasan tangkapan air sebagai kawasan lindung.
- Menjaga sumber-sumber air dari pencemaran lingkungan.

D. Rencana pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah sentra produksi

Rencana pemeliharaan jalan dan jembatan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, khususnya wilayah-wilayah sentra produksi meliputi :

- Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
- Membatasi moda angkutan besar/berat yang menggunakan jalan dan jembatan tersebut.
- Peningkatan proses pemeliharaan jalan dan jembatan.

E. Rencana Pengembangan jaringan listrik

Rencana pengembangan jaringan listrik di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dilakukan melalui :

- Pengembangan layanan jaringan pada lokasi-lokasi yang belum mendapatkan pasokan listrik.
- Penambahan kapasitas terutama pada wilayah sentra produksi.

F. Rencana pengembangan jaringan komunikasi

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dilakukan melalui :

- Pengembangan layanan jaringan pada lokasi-lokasi yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi.
- Pengembangan jaringan telepon seluler.
- Penambahan kapasitas terutama pada wilayah sentra produksi.

Selain rencana pengembangan prasarana produksi, maka perlu direncanakan pula penyediaan sarana produksi. Rencana pengembangan sarana produksi di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut.

A. Rencana pengembangan alat dan mesin pertanian

Pengembangan alat dan mesin pertanian di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu komponen yang dapat menjadi pendorong peningkatan produksi pertanian. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat tumbuhkembangannya kegiatan agropolitan di Kabupaten Ciamis.

B. Rencana penyediaan pupuk dan obat-obatan

Rencana penyediaan pupuk dan obat-obatan di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan sistem klaster, dimana pasokan pupuk dan obat-obatan akan dipusatkan pada sentral produksi dengan pendekatan sistem lokalita. Pada radius 10 km diupayakan terdapat agen penyalur pupuk dan obat-obatan yang dibutuhkan bagi usaha tani.

C. Rencana penyediaan pakan

Untuk kegiatan usaha peternakan dan perikanan, penyediaan pakan merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu maka ketersediaannya perlu diatur agar memiliki kontinuitas yang baik. Rencana sistem penyediaan pakan di Kabupaten Ciamis dapat dilakukan dengan cara :

- Penyediaan pakan alami, dimana pakan seperti ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan peternakan diluar kandang. Pakan disediakan secara alami pada lahan-lahan pengangonan.
- Penyediaan pakan buatan, diantaranya melalui pengembangan pabrik pakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Pakan buatan disediakan melalui distributor yang penyediaannya diupayakan.

D. Rencana penyediaan bibit dan benih unggul

Rencana penyediaan bibit dan benih unggul di Kabupaten Ciamis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

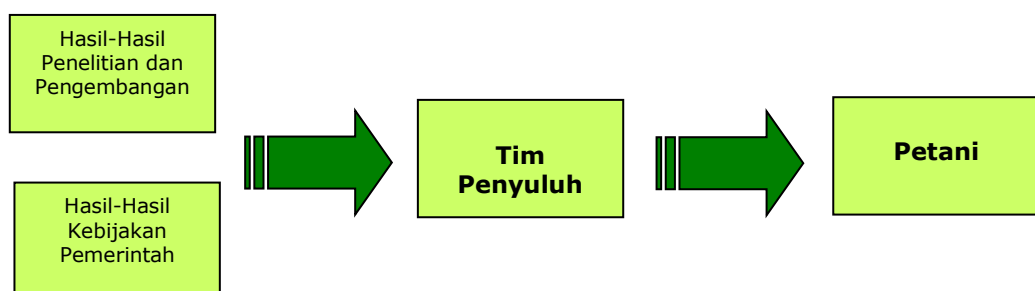
- Penangkaran bibit dan benih lokal.
- Introduksi bibit dan benih unggul dari daerah lain.

6.5.3.2 Rencana Pengembangan Pola Pembinaan dan Penyuluhan

Pembinaan dan penyuluhan kepada petani merupakan hal yang penting untuk menciptakan sistem usaha tani yang baik. Perubahan-perubahan teknologi dan informasi terbaru tidak atau belum diketahui diperlukan oleh para petani, sehingga peran aktif pihak lain (dalam hal ini penyuluh) sangat diperlukan.

Rencana pola pembinaan petani ditempuh melalui upaya-upaya yang dilakukan tim penyuluh dalam rangka menyerap hasil-hasil penelitian dan pengembangan, baik yang dilakukan oleh balai penelitian dan pengembangan maupun oleh perguruan tinggi serta kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kemudian disampaikan kepada petani dengan cara-cara yang mudah dipahami dan diaplikasikan.

Gambar 6.9
Mekanisme Penyuluhan Pertanian

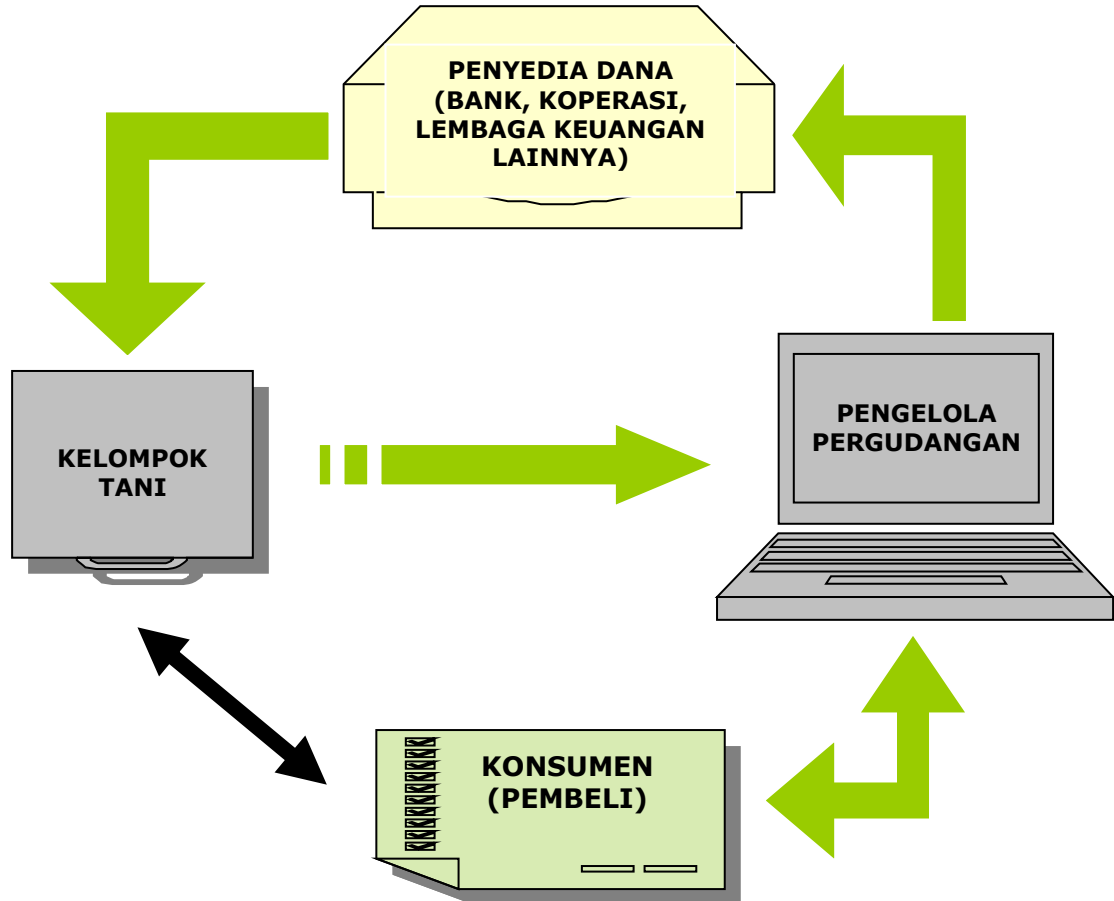


6.5.3.3 Rencana Pengembangan Pembiayaan Usaha Tani

Rencana pembiayaan usaha tani yang diusulkan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah pembiayaan usaha tani dengan melibatkan sistem pergudangan, dimana petani bisa mendapatkan biaya usaha melalui penerbitan resi gudang. Pada prinsipnya pembiayaan usaha tani dengan sistem resi gudang (*warehouse receipt financing*) adalah sistem pendanaan yang menggunakan komoditi sebagai aset yang dijadikan koleteral atau jaminan bagi pihak pemberi dana. Penggunaan pembiayaan resi gudang yang juga dikenal dengan kredit inventori/persediaan, dapat membantu para petani untuk mengatasi masalah kebutuhan dana, baik untuk keperluan pribadi, modal kerja atau kebutuhan lainnya dengan menyimpan komoditi hasil pertanian mereka di gudang.

Pada dasarnya sistem ini terdiri dari tiga pihak yang terlibat, yaitu penyedia dana, produsen (petani) dan penyelenggara pergudangan. Petani menyimpan komoditinya di gudang, pihak penyelenggara gudang melakukan grading dan klasifikasi barang serta mengeluarkan resi yang menyatakan komoditi yang disimpan petani. Petani kemudian membawa resi gudang tersebut ke lembaga keuangan atau penyedia dana untuk ditaksir nilai komodiitinya kemudian lembaga keuangan memberikan pinjaman dana kepada petani. Apabila komoditi yang disimpan di gudang tersebut ingin ditarik oleh petani, maka petani diwajibkan melunasi hutangnya baik kepada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman maupun kepada penyelenggara pergudangan sebagai imbal jasa pemeliharaan dan penyimpanan komoditi. Dipihak lain petani dapat menjadikan pergudangan sebagai sarana untuk menjual produknya, dimana pada saat komoditinya terjual maka petani akan mendapat sisa dari nilai pinjaman dan kewajiban terhadap penyelenggara gudang dengan nilai jual komoditi.

Gambar 6.10
Sistem Pembiayaan Usaha Tani



6.5.4 Rencana Pengembangan On Farm

6.5.4.1 Sistem Budidaya

Rencana pengembangan sistem budidaya di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

A. *Motivasi Petani*

Paradigma usaha yang dikembangkan oleh mayoritas petani di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis perlu adanya perubahan orientasi, dimana pemikiran usaha yang hanya mengedepankan rutinitas yang kurang produktif dan terlalu tradisional perlu diupayakan untuk dikembangkan menjadi pemikiran maju yang lebih mengedepankan sisi bisnis dari kegiatan yang teorganisir dengan baik. Orientasi usaha yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja perlu dirubah kepada orientasi bisnis yang bersifat komersil,

sehingga diharapkan ada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pemikiran yang lebih dinamis. Pada permasalahan ini, peranserta penyuluh menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memberikan pembinaan dan pencerahan pemikiran pada tataran spiritual berusaha. Hal ini harus dilakukan secara rutin dan bertahap sehingga usaha pada bidang pertanian dan perkebunan akan memberikan harapan yang baik bagi pelakunya.

B. Penyediaan Sarana Produksi

Ketersediaan sarana produksi pada sub sistem budidaya merupakan hal yang sangat menentukan baik kualitas dan kuantitas hasil produksi maupun pada efisiensi dan efektifitas proses produksi. Sarana produksi tersebut meliputi bibit/benih, pupuk, obat-obatan, serta alat dan mesin pertanian. Penyediaan sarana tersebut menjadi penting bagi siapapun yang berniat berusaha pada bidang pertanian. Yang menjadi permasalahan adalah mengenai kemudahan, harga dan kualitas serta kuantitas dari sarana tersebut, sehingga sistem penyediaan sarana produksi pertanian tersebut perlu diatur dan ditata dengan baik.

Pada pengembangan usahatani terpadu, maka penyediaan sarana produksi tersebut merupakan bagian yang harus dipadukan melalui mekanisme yang baik, seperti membangun pusat koleksi dan distribusi sarana tersebut pada sentral-sentral produksi atau melalui agen-agen yang ditunjuk.

C. Sistem Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah merupakan rangkaian selanjutnya pada proses budidaya pertanian/perkebunan, dimana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan sebagai upaya untuk menyediakan media pertumbuhan. Pengolahan tanah lebih ditujukan untuk mewujudkan kondisi tanah optimal, sehingga menjadi kondusif bagi proses penyerapan hara. Model pengolahan tanah yang dilakukan oleh para petani dilakukan melalui beberapa tipe antara lain dengan diolah penuh sampai tanah menjadi gembur serta tipe tanpa olah tanah (*zero tilage*). Pengolahan tanah yang intensif, terutama pada lahan yang memiliki topografi yang curam akan merangsang terjadinya erosi, sehingga perlu diterapkan model pengolahan tanah yang berkaidah konservasi.

D. Pola Tanam

Pola tanam yang dikembangkan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah. Pola tanam yang baik secara teknis adalah pola tanam yang memperhatikan kondisi klimatologi, artinya harus dapat membaca kapan terjadi bulan basah dan kapan terjadi bulan kering. Pada saat bulan basah pola tanam yang dikembangkan bisa menerapkan komoditas pertanian yang membutuhkan air dalam volume besar seperti padi, tetapi pada bulan kering maka tanaman yang mesti dikembangkan adalah komoditas yang tidak terlalu membutuhkan air terlalu besar seperti tanaman tahunan dan tanaman perkebunan.

E. Pengairan

Jika melihat kelas lahan, maka wilayah kajian sebagian besar merupakan lahan basah, yang secara teknis air merupakan masalah yang serius bagi pengembangan komoditas tanaman pangan seperti padi sawah dan hortikultura, sehingga perlu ditingkatkan efisiensi penggunaan air tersebut, dan perlu diperhatikan juga kontinuitas dari ketersediaan air tersebut.

F. Pemupukan

Penerapan pupuk berimbang mesti dilakukan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk. Pupuk yang harus diberikan paling tidak adalah pupuk yang mengandung Nitrogen (N), Fosfor (P) dan Kalium (K), dimana unsur-unsur ini diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Yang perlu diperhatikan pada proses pemupukan adalah dosis, jenis dan cara memupuk.

G. Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi penyiangan, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit. Para petani masih akrab dengan pestisida, dimana jika dilihat dari keamanan lingkungan cukup berbahaya. Tampaknya untuk pemberantasan hama perlu dikembangkan pengganti pestisida dengan mengembangkan predator atau bahan-bahan organik.

H. Pengembangan Sumberdaya Genetik

Penggunaan benih varietas unggul tidak dapat dipisahkan dari sistem produksi pertanian/perkebunan. Penggunaan varietas unggul secara nyata dapat meningkatkan hasil produksi, namun pada dasarnya varietas unggul merupakan varietas yang memiliki respon tinggi terhadap dosis pemupukan tinggi sehingga apabila dikembangkan pada daerah yang menggunakan input luar dalam tingkat yang rendah, maka resiko kerugian hasil produksi akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lokal. Promosi varietas unggul telah mengakibatkan banyak sekali varietas lokal yang hilang (erosi genetik). Ini berarti bencana bagi petani yang harus menghasilkan tanaman dengan input luar yang rendah dalam kondisi yang beragam dan rawan resiko, juga untuk alasan ekonomi maupun ekologi harus berproduksi dengan input kimia yang lebih sedikit pada masa yang akan datang, padahal mereka memiliki sumberdaya alam termasuk varietas lokal yang cukup potensial untuk dikembangkan.

Untuk menunjang optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan yang menggunakan faktor-faktor penunjang produksi (pupuk dan pestisida) dalam jumlah minimal, maka diperlukan suatu perbaikan sistem pengadaan benih ditingkat petani menuju pada sistem benih unggul lokal yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu ditingkat petani perlu diarahkan untuk dapat mengelola sumberdaya genetik yang dimiliki (varietas unggul lokal) dengan sebaik-baiknya, baik dalam hal

konservasi varietas, penanganan, maupun penyimpanan benih hingga benih siap digunakan.

Konservasi semacam ini sangat penting dilakukan sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada petani dalam memasok benih. Suatu pendekatan yang dapat diupayakan dalam pengelolaan sumberdaya genetik adalah pembentukan unit-unit suplai benih yang dibuat dengan cara membentuk unit-unit pertanian/perkebunan kecil untuk memproduksi benih unggul yang cukup memadai untuk kebutuhan lokal. Tentu saja para petani tersebut memerlukan arahan dari unit-unit inspeksi benih terpusat. Jika petani telah terbiasa dengan teknik tersebut, mereka dapat mengambil alih perawatan penangkaran hingga akhirnya menjadi yayasan benih yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Pengadaan benih dapat dilakukan pada tingkat desa dengan teknik-teknik yang bersifat padat karya sehingga mengurangi biaya transportasi, yang sekarang menjadi bagian utama yang menentukan harga benih. Apabila sistem ini telah berjalan dengan baik maka kebutuhan petani terhadap 4 tepat benih (tepat mutu, jumlah, waktu, dan harga) dapat terpenuhi.

1. Pengelolaan Hama Terpadu

Pengendalian hama terpadu adalah upaya mengendalikan tingkat populasi atau tingkat serangan organisme terhadap tanaman dengan menggunakan dua atau lebih teknik pengendalian dalam satu kesatuan untuk mencegah atau mengurangi kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan tanaman dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pengendalian dan eradikasi. Dalam perkembangannya, istilah pengendalian berubah menjadi pengelolaan untuk lebih menekankan pada usaha untuk mengurangi populasi organisme yang harus ditangani secara terus menerus sejak dari penanaman, misalnya dengan menentukan jenis tanaman, cara pembukaan lahan, penggarapan tanah, jarak tanam, dan sebagainya. Oleh karena itu istilah pengelolaan hama terpadu dianggap lebih tepat dibandingkan dengan pengendalian hama terpadu.

Rencana pengelolaan hama terpadu meliputi :

- 1) Secara terpadu memperhatikan semua hama penting,
- 2) Tidak bertujuan untuk mendapatkan suatu keadaan yang bebas hama, tetapi untuk mengendalikan populasi hama agar kerusakan yang terjadi selalu di bawah ambang ekonomi,
- 3) Menggabungkan berbagai cara yang kompatibel. Sedikit mungkin memakai cara buatan tetapi lebih mementingkan penekanan hama oleh faktor-faktor alami,
- 4) Selalu didasari oleh pertimbangan ekologi.

Berdasarkan rencana tersebut maka rencana pengelolaan hama terpadu yang lebih sempurna adalah perlu melibatkan pemerintah, yang dimulai dari pencegahan masuknya hama dari luar negeri. Untuk lebih jelasnya, rencana pengelolaan yang lebih sempurna meliputi :

- 1) Pengendalian hama tumbuhan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Hama-hama dari luar negeri dicegah masuk dengan cara peraturan karantina, sedangkan penyakit yang baru saja masuk dicoba dihilangkan dengan usaha eradikasi agar tidak meluas,
- 2) Penanaman kultivar yang tahan penyakit dan berproduksi tinggi,
- 3) Pengendalian dengan cara kultur teknis,
- 4) Pengendalian dengan cara biologis,
- 5) Pengendalian secara fisik, serta alternatif terakhir,
- 6) Pengendalian secara kimia.

Pengelolaan penyakit pada pertanian/perkebunan berkelanjutan harus didasari dengan kesadaran akan lingkungan dan kesadaran akan biaya. Jika kerusakan sangat berat dan semua usaha yang dilakukan tidak memberikan hasil, maka tanaman tersebut harus diganti.

6.5.4.2 Keterpaduan Sistem Kegiatan Usaha Pertanian

Untuk merealisasikan rencana pengembangan pertanian/agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dan mencapai sasaran pengembangan, diperlukan rancangan strategis pada aspek budidaya sebagai berikut :

- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan,
- Memaksimalkan sarana produksi,
- Meningkatkan penguasaan teknologi,
- Mengembangkan pelatihan dan pendidikan,
- Pengembangan pola intensifikasi lahan,
- Efisiensi sumberdaya air.

Beberapa alternatif yang dapat dikemukakan dalam usaha mewujudkan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui pertanian secara terpadu adalah dengan cara sistem tanam ganda; komplementari hewan ternak dan tumbuhan; usaha terpadu peternakan & perkebunan; *agroforestry*; pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya genetik; dan pengelolaan hama terpadu.

6.5.5 Rencana Pengembangan *Off Farm Hilir*

6.5.5.1 Rencana Penanganan dan pengolahan hasil produksi

Rencana penanganan dan pengolahan hasil produksi untuk setiap jenis komoditas di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis meliputi : proses panen, pemilahan/sortasi, pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran.

6.5.5.2 Rencana Pola Pengembangan Pemasaran

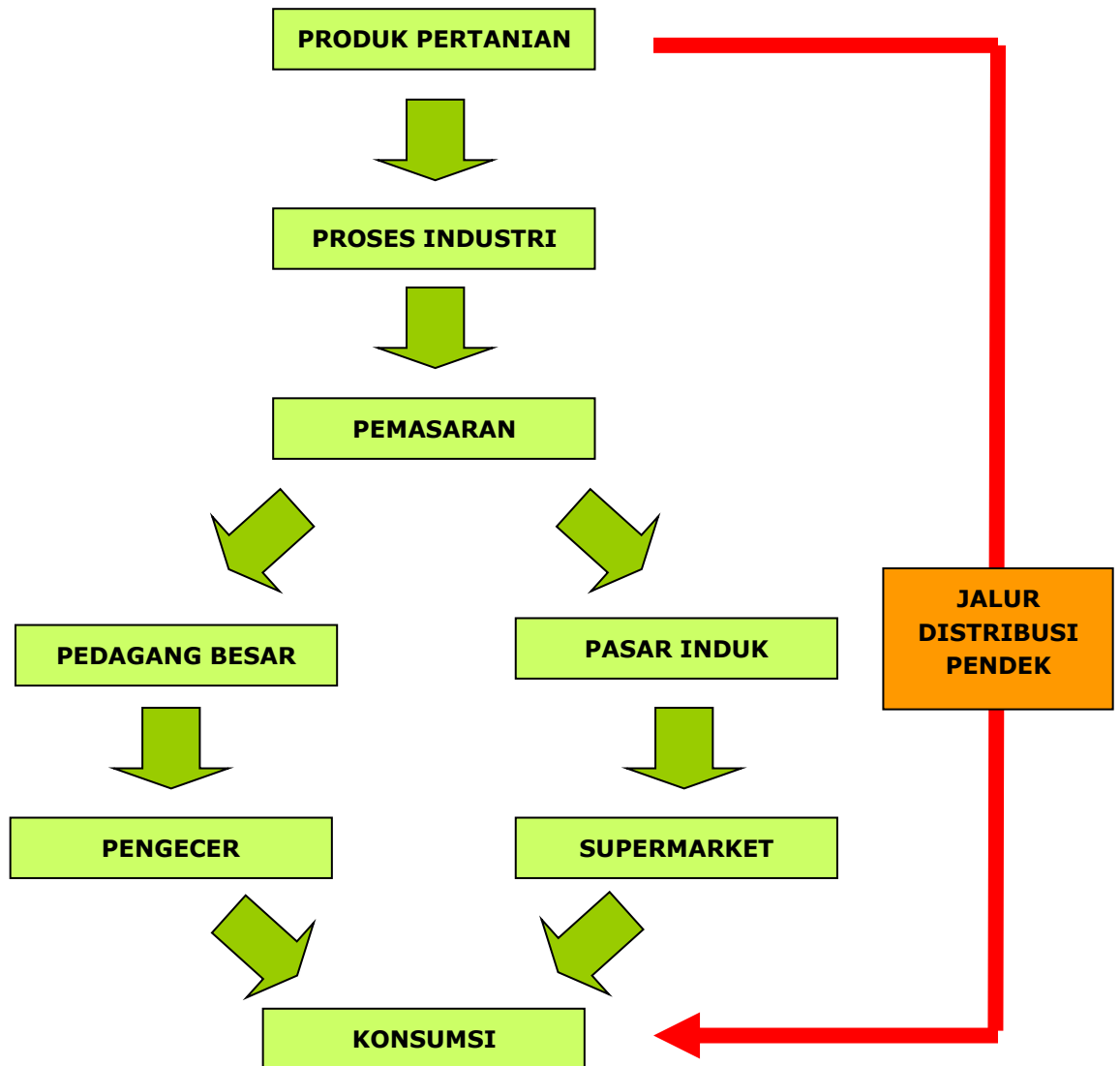
A. Jalur Distribusi

Aspek pemasaran hasil merupakan salah satu syarat mutlak dalam pembangunan pertanian, karena pasar merupakan goal bagi petani yang dapat meningkatkan kegairahan mereka dalam berusaha. Tingkat harga produk yang berfluktuasi merupakan dinamika dan resiko yang harus dihadapi oleh petani, serta terkait langsung dengan masalah permintaan dan penawaran terhadap produk pertanian. Pola pemasaran hasil pada sektor pertanian pada umumnya berbeda dengan produk industri. Hal ini disebabkan karena karakteristik komoditas pertanian yang khas, sehingga posisi tawar petani cenderung tetap rendah.

Pendek atau panjang sebuah jalur distribusi tidak bergantung pada jarak fisik antara produsen dengan konsumen, melainkan pada berapa banyak unsur atau pihak yang terlibat diantaranya dalam perjalanan distribusi sebuah produk dari produsen ke tangan konsumen. Kedua jalur distribusi ini penting dan saling melengkapi, dalam rangka memecahkan masalah atas berbagai situasi, bergantung pada jenis produknya - buah segar ataupun buah yang diawetkan atau buah kering misalnya ataupun jenis wilayah geografisnya.

Petani yang hasil produksinya kecil, sebaiknya menggunakan *direct selling* dan jalur distribusi pendek. Sedangkan sentra produk pertanian kolektif yang jumlah produksinya besar namun terpencil letaknya sebaiknya menggunakan jalur distribusi panjang yang mungkin bahkan bersifat nasional. Jalur distribusi pendek memungkinkan untuk memotong perantara antara produsen dan konsumen. Jalur distribusi terpendek tentunya adalah bila produsen menjual langsung kepada konsumen (*direct selling*). Menjual melalui jalur distribusi pendek bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk dan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan kegiatan menjual dilaksanakan secara lokal, sehingga membantu menjaga adanya pekerjaan di wilayahnya sendiri – tidak terjadi migrasi ke kota-kota besar.

Gambar 6.11
Jalur Distribusi



B. Mekanisme Koleksi/Suplai

Dalam upaya pemenuhan syarat kelayakan ekonomi maupun syarat konsumen di pasar berkaitan dengan kelemahan para petani dalam memenuhi konsistensi produk akan jumlah satuan (kuantitas), mutu hasil panen sebagai input pengolahan (kualitas) dan aspek ketepatan penyerahan (*delivery time*) serta kesinambungan pasokan (kontinuitas). Lokasi terpencar dan skala ekonomi yang tidak memenuhi syarat kelayakan dengan karakteristik komoditas yang cepat rusak (*perishable*) dan bernilai rendah (*bulky*) perlu diatasi dengan integrasi usaha tani berdasar komoditas dalam sentra produksi komoditas.



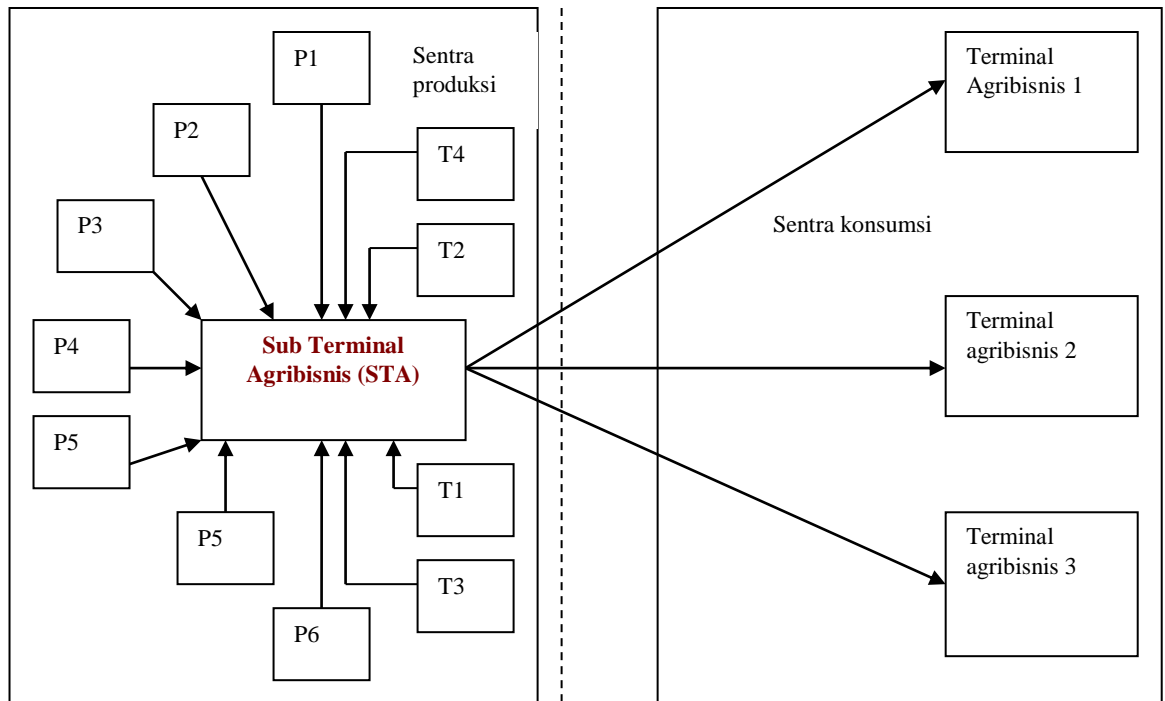
Dalam hal lain masalah ketepatan penyerahan dan menjaga kesinambungan pasokan (kontinuitas) diatasi dengan strategi perwilayahan dan penjadwalan tanam.

Syarat skala usaha yang memenuhi kelayakan ekonomi dalam pengusahaan komoditas merupakan syarat ekonomi bagi pencapaian efisiensi produksi sebagai ciri terpenting yang menunjukkan pengusahaan pertanian telah bertujuan komersial. Kehadiran badan usaha dalam menjalin kerjasama produksi dengan para petani maupun koperasi milik para petani sangat penting dalam mengatasi masalah individual para petani. Badan usaha maupun koperasi pada tingkat produksi dapat mengambil peranan, seperti mengatasi masalah keterbatasan modal, keterbatasan akan akses informasi pasar serta mengatasi masalah dari kondisi luas penguasaan lahan para petani masing-masing yang sangat kecil.

Keberadaan kawasan sentra produksi (KSP) dalam mengembangkan komoditas unggulan dengan pengelolaan oleh koperasi/badan usaha sebagai lembaga produsen yang menerapkan strategi bauran pemasaran (*marketing mix*), keseluruhannya akan mendorong berlangsungnya kegiatan perdagangan dengan posisi rebut tawar (*bargaining position*) yang berkeselimbangan. Jaringan pemasaran antara para petani yang terintegrasi vertikal dalam koperasi maupun badan usaha/koperasi sampai konsumen melalui layanan STA dengan tatacara perdagangan lelang, akan memberi jaminan pada makin pendeknya rantai pemasaran secara efisien tersebut. Sub terminal agribisnis sebagai fasilitas bisnis diharapkan bisa diakses oleh semua pelaku bisnis pada wilayah jangkauan ekonomis. Artinya, para pelaku bisnis yang secara ekonomis bisa mengakses tempat STA, bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Berikut ini gambar interaksi yang mungkin terjadi diantara para pelaku bisnis.



Gambar 6.12
Proses Interaksi Petani/Produsen, Pedagang/Tengkulak



6.5.5.3 Terminal agribisnis

Guna memperbaiki kelemahan distribusi sekaligus mendorong kearah integrasi vertikal antara produksi dan distribusi direncanakan mekanisme, sarana dan prasarana terminal jasa agribisnis (TA/STA) yaitu *Warehouse Receipt System* (WRS) sebagai manajemen pengelolaan lembaga jasa dalam kesatuan layanan. Dengan sarana pemasaran dalam fungsinya masing-masing yakni pengelolaan hasil panen (*sortasi, grading, pengemasan*) mencapai standar mutu tertentu, jasa survey mutu independen, jasa transportir (*forwarder*) dan jasa pergudangan resmi (*public warehouse*) yang mengelola dan menyimpan komoditi para petani/produsen. Dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pendirian terminal agribisnis (TA/STA) ini perencanaan pembangunan TA/STA baru sebagai pemodelan yang dilakukan pemerintah, akan sangat mempengaruhi minat dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan investasi baru maupun melakukan pemanfaatan akan kapasitas terpasang yang telah tersedia. Dengan pemodelan TA/STA yang mampu memperlihatkan kelayakan ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha, TA/STA akan menjadi sarana pemasaran yang segera tumbuh dan berkembang baik dengan memanfaatkan sarana dalam penguasaan pemerintah, investasi baru dunia usaha dan maupun sarana dalam penguasaan koperasi.



6.5.5.4 Sarana dan Prasarana Pemasaran

Kondisi pemasaran yang efisien yaitu kegiatan ekonomi pemindahan barang semurah-murahnya serta memberi keadilan dalam pemberian imbal jasa kepada pelakunya sesuai kontribusi jasanya masing-masing akan mewujudkan kondisi pemasaran hasil pertanian. Dengan perdagangan secara langsung antara petani dalam koperasi melalui layanan STA, margin usaha akan terdistribusikan kepada pelaku petani, pelayanan jasa-jasa agribisnis serta lembaga usaha bersama para petani dalam koperasi. Dengan mekanisme layanan STA, para produsen akan mampu memenuhi syarat konsistensi produk (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan dengan transmisi informasi pasar yang cepat dan akurat dari pasar kepada para petani. Tatacara perdagangan komoditas di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis diarahkan dengan rencana optimalisasi STA yang sudah ada, penguatan kelembagaan dan usaha serta kewenangan dalam mengembangkan perdagangan dan perindustrian. Panjangnya mata rantai tata niaga yang telah melahirkan berbagai masalah dalam meningkatkan daya saing agribisnis perlu diatasi dengan tiga langkah strategis yang perlu dilaksanakan secara simultan sebagai satu kesatuan tindakan, meliputi :

- a. Pembangunan kelembagaan petani dalam badan usaha koperasi maupun pengembangan kemitraan dalam spirit kooperatif antara petani dengan badan usaha non-koperasi.
- b. Mengintegrasikan secara vertikal antar produksi oleh para petani dalam koperasi.
- c. Membakukan tatacara perdagangan jual nota (*split pricing*) sebagaimana telah berlangsung secara tradisional antara petani dengan pedagang perantara selama ini menjadi tatacara jual nota secara berdokumen dan transparan.

Membangun kerjasama masyarakat petani menjadi koperasi/badan usaha maupun kerjasama dengan badan usaha lainnya dalam spirit kooperatif perlu dilakukan melalui pilihan bentuk kerjasama kontrak *farming* yang telah hidup dan sesuai dengan nilai masyarakat yaitu diantaranya pola inti plasma (*nucleus estate smallholder*), bagi hasil (nengah maro), kontrak grower, kredit dengan bayar saat panen (*yarnen*) dan kerjasama bagi hasil (*profit loss sharing*) lainnya seperti mertiga/mertelu maupun skema bagi hasil (mudharabbah dan musyarakkah) berdasar tatacara syariah. Dengan melakukan kajian akan salah satu pola yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah kajian, masalah rendahnya skala usaha tani dan kemampuan petani secara individual dalam memenuhi syarat kepastian penyerahan (*delivery time*) maupun syarat kuantitas dapat diatasi oleh keunggulan koperasi/badan usaha selaku pengelola produksi pada jumlah dan luas usaha tani gabungan para petani.

Strategi kedua yaitu memberi kondisi kearah integrasi vertikal yang hanya akan berjalan efektif jika dalam hubungan antara para petani dalam koperasi maupun kerjasama antara para petani dengan badan usaha /koperasi menjadi produsen memiliki mekanisme, sarana dan prasarana yang mampu mengatasi kendala

pengelolaan penyimpanan, peningkatan kualitas produk, kepastian *delivery time* dan perbaikan tampilan produk yang keseluruhannya sebagai unsur kegiatan distribusi (*placement*).

6.5.5.5 Kelembagaan dalam Jaringan Pemasaran

a. *Petani*

Sesuai keperluan, petani yang tergabung dalam kelembagaan badan usaha produsen (koperasi) dapat ikut serta dalam memanfaatkan STA ini. Kategori petani terdiri atas (a) Petani yang akan menggunakan lahan usaha pertaniannya dan telah tergabung kedalam kelembagaan usaha produsen koperasi, (b) Petani/usaha kecil yang telah memiliki usaha pertanian tetapi dalam keadaan yang perlu ditingkatkan aksesibilitas pasarnya dan dalam hal ini memerlukan layanan sarana pemasaran STA.

Untuk katagori (a) pengelola kegiatan dimulai dengan penyiapan koperasi menjadi produsen yang bertransaksi dengan konsumen pembeli, sedangkan untuk katagori (b) kegiatan dimulai dengan penyamaan pemahaman dari adanya peranan STA dalam pelayanan jasa pengelolaan hasil panen, pengangkutan dan penyimpanan dalam pergudangan STA. Luas lahan para petani yang tergabung dalam koperasi atau skala usaha bisa bervariasi sesuai luasan atau skala yang dimiliki oleh masing-masing petani/usaha kecil. Pada setiap kelompok tani/kelompok usaha, ditunjuk seorang Ketua dan Sekretaris merangkap Bendahara. Tugas Ketua dan Sekretaris Kelompok adalah mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan penjadwalan produksi dan budidaya, perencanaan tingkat teknologis dan input yang akan digunakan oleh para petani anggotanya, mewakili petani didalam mengadakan hubungan dengan pihak Koperasi dan instansi lainnya yang perlu sesuai hasil kesepakatan anggota. Ketua kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin yang waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok.

b. *Koperasi*

Para petani yang tergabung dalam koperasi atau petani sebagai usaha kecil pertanian sebagai calon pelanggan STA, sebaiknya menjadi nasabah suatu Bank di tempatnya berada. Koperasi bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu petani didalam pembangunan kebun/usaha sesuai keperluannya. Jika menggunakan skim Kredit Usaha Kecil (KUK), kehadiran koperasi tidak merupakan keharusan.

c. *Perusahaan/Badan Usaha Pengelola STA*

Suatu perusahaan yang bersedia menjalin kerjasama sebagai pengelola STA harus memiliki kemampuan dalam mengelola fasilitas pengolahan untuk bisa menyajikan hasil panen menjadi produk dalam standar mutu tertentu, mengelola kebutuhan petani dan produsen dalam hal pengangkutan serta bersedia

menjamin keberadaan barang para petani dari segala resiko penyusutan mutu dan maupun penyusutan jumlah untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada pemilik asli surat Tanda Penerimaan Gudang (TPG) atau resi gudang. Disamping itu, perusahaan pengelola perlu memberikan bimbingan teknis usaha dan membantu dalam pengadaan sarana produksi untuk keperluan petani melalui koperasi serta usaha kecil.

Apabila Perusahaan pengelola STA tidak memiliki kemampuan cukup untuk mengadakan seluruh layanan pemasaran diatas, STA tetap akan bisa dikembangkan dengan sekurang-kurangnya pihak pengelola memiliki jalinan kerjasama dengan pemilik fasilitas pengolahan, memiliki hubungan baik dengan perusahaan ekspedisi dan jasa pengangkutan berdokumen (*forwarder*) serta perusahaan jasa pergudangan publik (*public warehouse*) serta asuransi penjamin. Hal ini penting untuk memastikan adanya layanan bagi pemasaran hasil produksi para petani dan produsen. Meskipun demikian petani dalam koperasi/usaha kecil dimungkinkan untuk mengolah hasil panennya terlebih dahulu, yang kemudian diserahkan kepada pengelolaan STA untuk mendapat layanan pengangkutan dan penyimpanan dalam memenuhi persyaratan pelanggan yang telah mengikat hubungan kontrak sebelumnya.

Dalam hal perusahaan pengelola STA tidak bisa melakukan pembinaan teknis, kegiatan pembimbingan harus dapat diadakan oleh koperasi dengan memanfaatkan bantuan tenaga pihak Dinas Pertanian setempat atau pembimbingan oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya yang dikoordinasikan oleh Koperasi petani. Apabila koperasi menggunakan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), perlu mendapatkan persetujuan Dinas Pertanian setempat dan koperasi memberikan bantuan biaya yang diperlukan.

Koperasi juga bisa mempekerjakan langsung tenaga-tenaga teknis yang memiliki keterampilan dibidang pertanian/usaha untuk membimbing petani/usaha kecil dengan dibiayai sendiri oleh Koperasi. Tenaga-tenaga tersebut dapat diberi honorarium oleh Koperasi yang bisa kemudian dibebankan kepada petani dari setiap transaksi yang dilakukan melalui pusat pemasaran STA dari hasil penjualan petani secara proporsional menurut besarnya produksi, sehingga makin tinggi tingkat produktivitas kebun petani/usaha kecil akan semakin besar pula honorarium yang diterimanya.

d. Bank

Bank berdasarkan adanya kontrak jual-beli antara petani dalam koperasi/ usaha kecil dengan pelanggan dalam pelayanan STA sebagai penyedia layanan jasa, dapat melibatkan diri untuk membiayai para petani melalui produsen berupa dana talangan atas setiap hasil panen yang memenuhi standar pelayanan STA.

Disamping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek budidaya/produksi dan pemasaran yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan. Pihak bank dalam mengadakan evaluasi juga harus memastikan

bagaimana pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga dapat menunjang keberhasilan transaksi perdagangan antara para petani dalam koperasi dengan pelanggan. Skim kredit yang dapat digunakan untuk pembiayaan ini, bisa dipilih berdasarkan besarnya tingkat bunga dan jadwal waktu yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pemasaran dan usaha tani ini, sehingga mengarah pada perolehannya pendapatan bersih petani yang paling besar.

Dalam pelaksanaannya, Bank harus dapat mengatur cara petani dalam mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional bagi berlangsungnya pemasaran sehingga petani akan membayar pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya sesaat penerimaan pembayaran dari konsumen pembeli atau pelanggan yang telah melakukan kontrak sebelumnya. Untuk ini, bank agar membuat perjanjian kerjasama segitiga dengan pihak perusahaan pengelola STA dengan berdasarkan kesepakatan pihak petani/kelompok tani/koperasi. Perusahaan pengelola STA akan memotong uang hasil penjualan petani dalam koperasi/usaha kecil yang dibayar pelanggan sejumlah uang yang disepakati bersama sebagai biaya layanan pemasaran STA untuk dibayarkan langsung kepada bank pengelola STA.

Besarnya potongan bagi petani penerima kredit Bank disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah disepakati pada waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani/Kelompok tani/koperasi dengan pihak Bank. Perusahaan pengelola STA akan memotong uang hasil penjualan petani dan koperasi produsen/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada Bank.

6.5.6 Rencana Pengembangan On Farm Hilir

6.5.6.1 Rencana Pola Pengembangan Pemasaran

A. Jalur Distribusi

Aspek pemasaran hasil merupakan salah satu syarat mutlak dalam pembangunan pertanian, karena pasar merupakan goal bagi petani yang dapat meningkatkan kegairahan mereka dalam berusaha. Tingkat harga produk yang berfluktuasi merupakan dinamika dan resiko yang harus dihadapi oleh petani, serta terkait langsung dengan masalah permintaan dan penawaran terhadap produk pertanian. Pola pemasaran hasil pada sektor pertanian pada umumnya berbeda dengan produk industri. Hal ini disebabkan karena karakteristik komoditas pertanian yang khas, sehingga posisi tawar petani cenderung tetap rendah.

Pendek atau panjang sebuah jalur distribusi tidak bergantung pada jarak fisik antara produsen dengan konsumen, melainkan pada berapa banyak unsur atau pihak yang terlibat diantaranya dalam perjalanan distribusi sebuah produk dari



produsen ke tangan konsumen. Kedua jalur distribusi ini penting dan saling melengkapi, dalam rangka memecahkan masalah atas berbagai situasi, bergantung pada jenis produknya - buah segar ataupun buah yang diawetkan atau buah kering misalnya ataupun jenis wilayah geografisnya.

Petani yang hasil produksinya kecil, sebaiknya menggunakan *direct selling* dan jalur distribusi pendek. Sedangkan sentra produk pertanian kolektif yang jumlah produksinya besar namun terpencil letaknya sebaiknya menggunakan jalur distribusi panjang yang mungkin bahkan bersifat nasional. Jalur distribusi pendek memungkinkan untuk memotong perantara antara produsen dan konsumen. Jalur distribusi terpendek tentunya adalah bila produsen menjual langsung kepada konsumen (*direct selling*). Menjual melalui jalur distribusi pendek bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk dan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan kegiatan menjual dilaksanakan secara lokal, sehingga membantu menjaga adanya pekerjaan di wilayahnya sendiri – tidak terjadi migrasi ke kota-kota besar.

Gambar 6.13
Jalur Distribusi



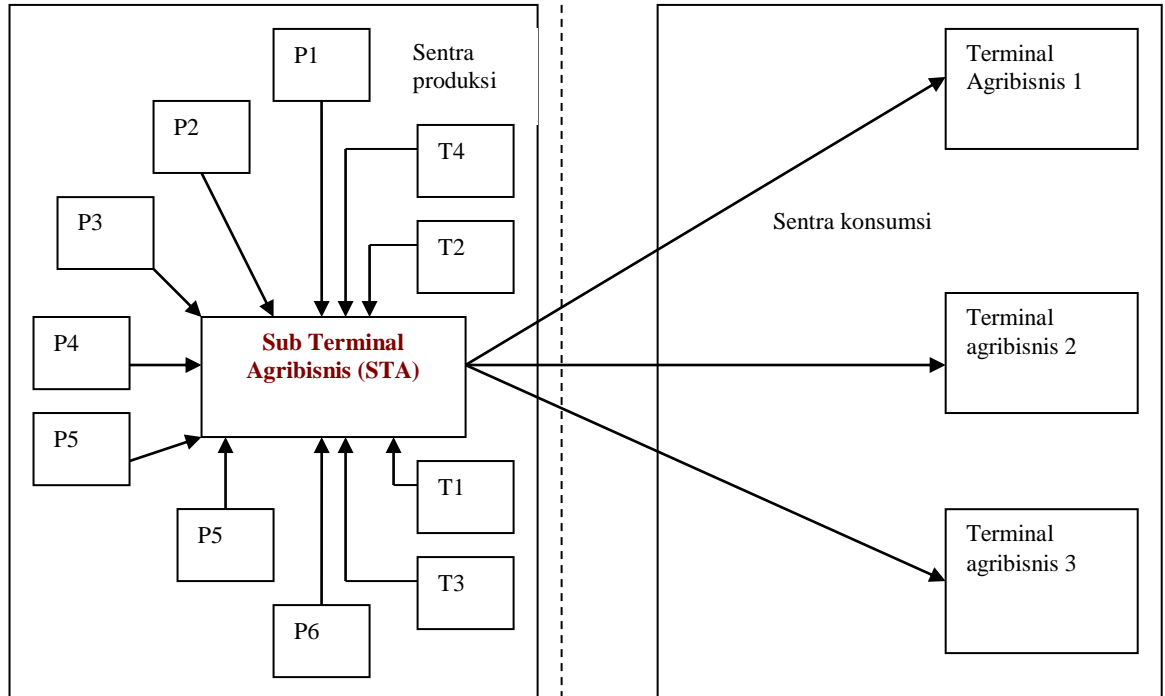
B. Mekanisme Koleksi/Suplai

Dalam upaya pemenuhan syarat kelayakan ekonomi maupun syarat konsumen di pasar berkaitan dengan kelemahan para petani dalam memenuhi konsistensi produk akan jumlah satuan (kuantitas), mutu hasil panen sebagai input pengolahan (kualitas) dan aspek ketepatan penyerahan (*delivery time*) serta kesinambungan pasokan (kontinuitas). Lokasi terpencar dan skala ekonomi yang tidak memenuhi syarat kelayakan dengan karakteristik komoditas yang cepat rusak (*perishable*) dan bernilai rendah (*bulky*) perlu diatasi dengan integrasi usaha tani berdasar komoditas dalam sentra produksi komoditas. Dalam hal lain masalah ketepatan penyerahan dan menjaga kesinambungan pasokan (kontinuitas) perlu diatasi dengan strategi perwilayahan dan penjadwalan tanam.

Syarat skala usaha yang memenuhi kelayakan ekonomi dalam pengusahaan komoditas merupakan syarat ekonomi bagi pencapaian efisiensi produksi sebagai ciri terpenting yang menunjukkan pengusahaan pertanian telah bertujuan komersial. Kehadiran badan usaha dalam menjalin kerjasama produksi dengan para petani maupun koperasi milik para petani sangat penting dalam mengatasi masalah individual para petani. Badan usaha maupun koperasi pada tingkat produksi dapat mengambil peranan, seperti mengatasi masalah keterbatasan modal, keterbatasan akses informasi pasar serta mengatasi masalah dari kondisi luas penguasaan lahan para petani masing-masing yang sangat kecil.

Keberadaan kawasan sentra produksi (KSP) dalam mengembangkan komoditas unggulan dengan pengelolaan oleh koperasi/badan usaha sebagai lembaga produsen yang menerapkan strategi bauran pemasaran (*marketing mix*), keseluruhannya akan mendorong berlangsungnya kegiatan perdagangan dengan posisi rebut tawar (*bargaining position*) yang berkeimbangan. Jaringan pemasaran antara para petani yang terintegrasi vertikal dalam koperasi maupun badan usaha/koperasi sampai konsumen melalui layanan STA dengan tatacara perdagangan lelang, akan memberi jaminan pada makin pendeknya rantai pemasaran secara efisien tersebut. Sub terminal agribisnis sebagai fasilitas bisnis diharapkan bisa diakses oleh semua pelaku bisnis pada wilayah jangkauan ekonomis. Artinya, para pelaku bisnis yang secara ekonomis bisa mengakses tempat STA, bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Berikut ini gambar interaksi yang mungkin terjadi diantara para pelaku bisnis.

Gambar 6.14
Proses Interaksi Petani/Produsen, Pedagang/Tengkulak



6.5.6.2 Terminal agribisnis

Guna memperbaiki kelemahan distribusi sekaligus mendorong kearah integrasi vertikal antara produksi dan distribusi perlu diperkenalkan mekanisme, sarana dan prasarana terminal jasa agribisnis (TA/STA) yaitu *Warehouse Receipt System* (WRS) sebagai manajemen pengelolaan lembaga jasa dalam kesatuan layanan. Dengan sarana pemasaran dalam fungsinya masing-masing yakni pengelolaan hasil panen (*sortasi, grading, pengemasan*) mencapai standar mutu tertentu, jasa survey mutu independen, jasa transportir (*forwarder*) dan jasa pergudangan resmi (*public warehouse*) yang mengelola dan menyimpan komoditi para petani/produsen. Dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pendirian terminal agribisnis (TA/STA) ini perencanaan pembangunan TA/STA baru sebagai pemodelan yang dilakukan pemerintah, akan sangat mempengaruhi minat dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan investasi baru maupun melakukan pemanfaatan akan kapasitas terpasang yang telah tersedia. Dengan pemodelan TA/STA yang mampu memperlihatkan kelayakan ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha, TA/STA akan menjadi sarana pemasaran yang segera tumbuh dan berkembang baik dengan memanfaatkan sarana dalam penguasaan pemerintah, investasi baru dunia usaha dan maupun sarana dalam penguasaan koperasi.

6.5.6.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran

Kondisi pemasaran yang efisien yaitu kegiatan ekonomi pemindahan barang semurah-murahnya serta memberi keadilan dalam pemberian imbal jasa kepada pelakunya sesuai kontribusi jasanya masing-masing akan mewujudkan kondisi pemasaran hasil pertanian. Dengan perdagangan secara langsung antara petani dalam koperasi melalui layanan STA, margin usaha akan terdistribusikan kepada pelaku petani, pelayanan jasa-jasa agribisnis serta lembaga usaha bersama para petani dalam koperasi. Dengan mekanisme layanan STA, para produsen akan mampu memenuhi syarat konsistensi produk (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dan dengan transmisi informasi pasar yang cepat dan akurat dari pasar kepada para petani. Tatacara perdagangan komoditas di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis diarahkan dengan rencana pendirian STA, penguatan kelembagaan dan usaha serta kewenangan dalam mengembangkan perdagangan dan perindustrian. Panjangnya mata rantai tata niaga yang telah melahirkan berbagai masalah dalam meningkatkan daya saing agribisnis perlu diatasi dengan tiga langkah strategis yang perlu dilaksanakan secara simultan sebagai satu kesatuan tindakan, meliputi :

- a. Pembangunan kelembagaan petani dalam badan usaha koperasi maupun pengembangan kemitraan dalam spirit kooperatif antara petani dengan badan usaha non-koperasi.
- b. Mengintegrasikan secara vertikal antara produksi oleh para petani dalam koperasi.
- c. Membakukan tatacara perdagangan jual nota (*split pricing*) sebagaimana telah berlangsung secara tradisional antara petani dengan pedagang perantara selama ini menjadi tatacara jual nota secara berdokumen dan transparan.

Membangun kerjasama masyarakat petani menjadi koperasi/badan usaha maupun kerjasama dengan badan usaha lainnya dalam spirit kooperatif perlu dilakukan melalui pilihan bentuk kerjasama kontrak *farming* yang telah hidup dan sesuai dengan nilai masyarakat yaitu diantaranya pola inti plasma (*nucleus estate smallholder*), bagi hasil (nengah maro), kontrak grower, kredit dengan bayar saat panen (*yarnen*) dan kerjasama bagi hasil (*profit loss sharing*) lainnya seperti mertiga/mertelu maupun skema bagi hasil (mudharabbah dan musyarakkah) berdasar tatacara syariah. Dengan melakukan kajian akan salah satu pola yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah kajian, masalah rendahnya skala usaha tani dan kemampuan petani secara individual dalam memenuhi syarat kepastian penyerahan (*delivery time*) maupun syarat kuantitas dapat diatasi oleh keunggulan koperasi/badan usaha selaku pengelola produksi pada jumlah dan luas usaha tani gabungan para petani.

Strategi kedua yaitu memberi kondisi kearah integrasi vertikal yang hanya akan berjalan efektif jika dalam hubungan antara para petani dalam koperasi maupun

kerjasama antara para petani dengan badan usaha /koperasi menjadi produsen memiliki mekanisme, sarana dan prasarana yang mampu mengatasi kendala pengelolaan penyimpanan, peningkatan kualitas produk, kepastian *delivery time* dan perbaikan tampilan produk yang keseluruhannya sebagai unsur kegiatan distribusi (*placement*).

6.5.6.4 Kelembagaan dalam Jaringan Pemasaran

A. Petani

Sesuai keperluan, petani yang tergabung dalam kelembagaan badan usaha produsen (koperasi) dapat ikut serta dalam memanfaatkan STA ini. Kategori petani terdiri atas (a) Petani yang akan menggunakan lahan usaha pertaniannya dan telah tergabung kedalam kelembagaan usaha produsen koperasi, (b) Petani/usaha kecil yang telah memiliki usaha pertanian tetapi dalam keadaan yang perlu ditingkatkan aksesibilitas pasarnya dan dalam hal ini memerlukan layanan sarana pemasaran STA.

Untuk katagori (a) pengelola kegiatan dimulai dengan penyiapan koperasi menjadi produsen yang bertransaksi dengan konsumen pembeli, sedangkan untuk katagori (b) kegiatan dimulai dengan penyamaan pemahaman dari adanya peranan STA dalam pelayanan jasa pengelolaan hasil panen, pengangkutan dan penyimpanan dalam pergudangan STA. Luas lahan para petani yang tergabung dalam koperasi atau skala usaha bisa bervariasi sesuai luasan atau skala yang dimiliki oleh masing-masing petani/usaha kecil. Pada setiap kelompok tani/kelompok usaha, ditunjuk seorang Ketua dan Sekretaris merangkap Bendahara. Tugas Ketua dan Sekretaris Kelompok adalah mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan penjadwalan produksi dan budidaya, perencanaan tingkat teknologis dan input yang akan digunakan oleh para petani anggotanya, mewakili petani didalam mengadakan hubungan dengan pihak Koperasi dan instansi lainnya yang perlu sesuai hasil kesepakatan anggota. Ketua kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin yang waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok.

B. Koperasi

Para petani yang tergabung dalam koperasi atau petani sebagai usaha kecil pertanian sebagai calon pelanggan STA, sebaiknya menjadi nasabah suatu Bank di tempatnya berada. Koperasi bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu petani didalam pembangunan kebun/usaha sesuai keperluannya. Jika menggunakan skim Kredit Usaha Kecil (KUK), kehadiran koperasi primer tidak merupakan keharusan.

C. Perusahaan/Badan Usaha Pengelola STA

Suatu perusahaan yang bersedia menjalin kerjasama sebagai pengelola STA harus memiliki kemampuan dalam mengelola fasilitas pengolahan untuk bisa menyajikan hasil panen menjadi produk dalam standar mutu tertentu, mengelola kebutuhan petani dan produsen dalam hal pengangkutan serta bersedia menjamin keberadaan barang para petani dari segala resiko penyusutan mutu dan maupun penyusutan jumlah untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada pemilik asli surat Tanda Penerimaan Gudang (TPG) atau resi gudang. Disamping itu, perusahaan pengelola perlu memberikan bimbingan teknis usaha dan membantu dalam pengadaan sarana produksi untuk keperluan petani melalui koperasi serta usaha kecil.

Apabila Perusahaan pengelola STA tidak memiliki kemampuan cukup untuk mengadakan seluruh layanan pemasaran diatas, STA tetap akan bisa dikembangkan dengan sekurang-kurangnya pihak pengelola memiliki jalinan kerjasama dengan pemilik fasilitas pengolahan, memiliki hubungan baik dengan perusahaan ekspedisi dan jasa pengangkutan berdokumen (*forwarder*) serta perusahaan jasa pergudangan publik (*public warehouse*) serta asuransi penjamin. Hal ini penting untuk memastikan adanya layanan bagi pemasaran hasil produksi para petani dan produsen. Meskipun demikian petani dalam koperasi/usaha kecil dimungkinkan untuk mengolah hasil panennya terlebih dahulu, yang kemudian diserahkan kepada pengelolaan STA untuk mendapat layanan pengangkutan dan penyimpanan dalam memenuhi persyaratan pelanggan yang telah mengikat hubungan kontrak sebelumnya.

Dalam hal perusahaan pengelola STA tidak bisa melakukan pembinaan teknis, kegiatan pembimbingan harus dapat diadakan oleh koperasi dengan memanfaatkan bantuan tenaga pihak Dinas Pertanian setempat atau pembimbingan oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya yang dikoordinasikan oleh Koperasi petani. Apabila koperasi menggunakan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), perlu mendapatkan persetujuan Dinas Pertanian setempat dan koperasi memberikan bantuan biaya yang diperlukan.

Koperasi juga bisa mempekerjakan langsung tenaga-tenaga teknis yang memiliki keterampilan dibidang pertanian/usaha untuk membimbing petani/usaha kecil dengan dibiayai sendiri oleh Koperasi. Tenaga-tenaga tersebut dapat diberi honorarium oleh Koperasi yang bisa kemudian dibebankan kepada petani dari setiap transaksi yang dilakukan melalui pusat pemasaran STA dari hasil penjualan petani secara proporsional menurut besarnya produksi, sehingga makin tinggi tingkat produktivitas kebun petani/usaha kecil akan semakin besar pula honorarium yang diterimanya.

D. Bank

Bank berdasarkan adanya kontrak jual-beli antara petani dalam koperasi/ usaha kecil dengan pelanggan dalam pelayanan STA sebagai penyedia layanan jasa, dapat melibatkan diri untuk membiayai para petani melalui produsen berupa dana talangan atas setiap hasil panen yang memenuhi standar pelayanan STA.

Disamping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek budidaya/produksi dan pemasaran yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan. Pihak bank dalam mengadakan evaluasi juga harus memastikan bagaimana pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga dapat menunjang keberhasilan transaksi perdagangan antara para petani dalam koperasi dengan pelanggan. Skim kredit yang dapat digunakan untuk pembiayaan ini, bisa dipilih berdasarkan besarnya tingkat bunga dan jadwal waktu yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pemasaran dan usaha tani ini, sehingga mengarah pada perolehannya pendapatan bersih petani yang paling besar.

Dalam pelaksanaannya, Bank harus dapat mengatur cara petani dalam mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional bagi berlangsungnya pemasaran sehingga petani akan membayar pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya sesaat penerimaan pembayaran dari konsumen pembeli atau pelanggan yang telah melakukan kontrak sebelumnya. Untuk ini, bank agar membuat perjanjian kerjasama segitiga dengan pihak perusahaan pengelola STA dengan berdasarkan kesepakatan pihak petani/kelompok tani/koperasi. Perusahaan pengelola STA akan memotong uang hasil penjualan petani dalam koperasi/usaha kecil yang dibayar pelanggan sejumlah uang yang disepakati bersama sebagai biaya layanan pemasaran STA untuk dibayarkan langsung kepada bank pengelola STA.

Besarnya potongan bagi petani penerima kredit Bank disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah disepakati pada waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani/Kelompok tani/koperasi dengan pihak Bank. Perusahaan pengelola STA akan memotong uang hasil penjualan petani dan koperasi produsen/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada Bank.

6.5.7 Rencana Pengembangan Ekonomi dan Investasi Kawasan Agopolitan Kabupaten Ciamis

Menurut Mangunwidjaja (2005) yang dimaksud dengan agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan, serta jasa untuk kegiatan tersebut. Agroindustri dengan demikian mencakup Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Industri

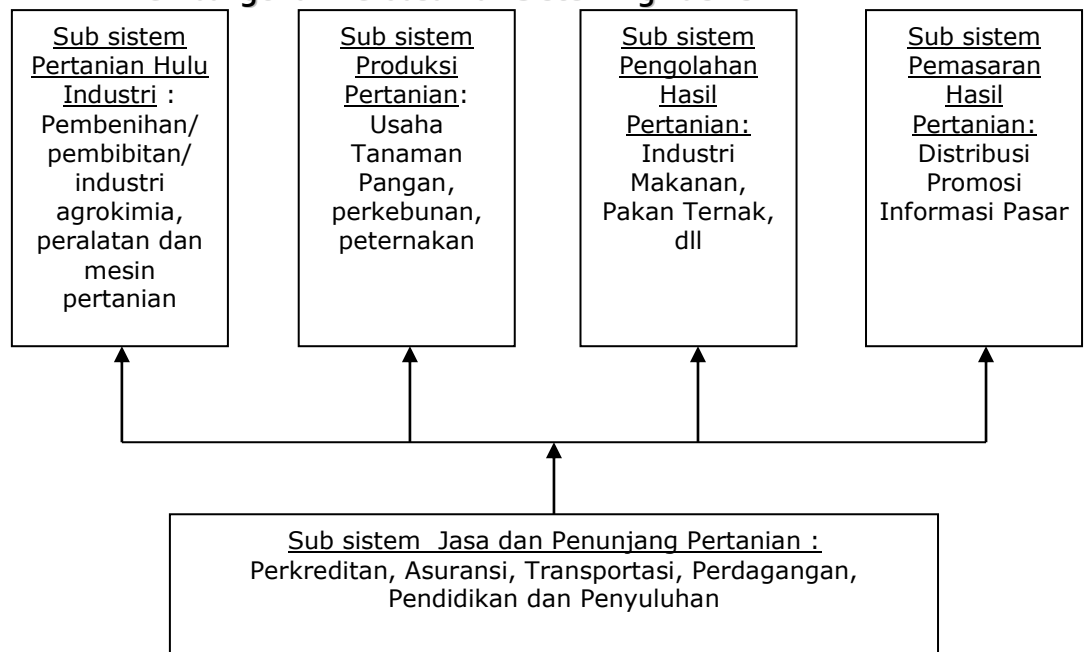
Peralatan dan Mesin Pertanian, dan Industri Jasa Sektor Pertanian.

Industri Pengolahan Hasil Pertanian (IPHP) dapat dipilah menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. IPHP Tanaman Pangan.
2. IPHP Tanaman Perkebunan.
3. IPHP Hasil Hutan.
4. IPHP Perikanan, dan
5. IPHP Peternakan.

Selain industri pengolahan hasil pertanian (IPHP) terdapat pula aktivitas lain yang terkait mengingat agroindustri merupakan kegiatan yang salinghubung (interrelasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi hasil pertanian. Untuk lebih jelasnya mengenai pembangunan berdasarkan sistem agribisnis dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 6.15
Pembangunan Berdasarkan Sistem Agribisnis



Gambar tersebut di atas memperlihatkan pembangunan dalam kerangka sistem agribisnis merupakan suatu rangkaian dan keterkaitan dari : (1) Sub agribisnis hulu (*upstream agribusiness*) yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer (usahatani); (2) Sub agribisnis usahatani (*onfarm agribusiness*) atau pertanian primer, yaitu kegiatan yang menggunakan sarana produksi dan sub agribisnis hulu untuk menghasilkan komoditas pertanian

primer. Sub ini di Indonesia disebut pertanian; (3) Sub agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik bentuk produk antara (*intermediate product*) maupun bentuk produk akhir (*finished product*); dan (4) Sub Jasa penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa bagi ketiga sub agribisnis di atas.

Pengembangan usaha agribisnis merupakan upaya meningkatkan kuantitas, kualitas manajemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri, dan memanfaatkan peluang pasar dari pelaku agribisnis. Pelaku utama agribisnis adalah petani dan dunia usaha meliputi usaha rumah-tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah, maupun usaha besar. Pelaku agribisnis tersebut merancang, merekayasa dan melakukan kegiatan agribisnis itu sendiri mulai dari identifikasi pasar yang kemudian diterjemahkan kedalam proses produksi. Pemerintah memberikan fasilitas dan mendorong berkembangnya usaha-usaha agribisnis tersebut.

6.5.7.1 Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Partisipatif

Selain kegiatan ekonomi yang berskala besar, pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis juga dapat memperhatikan kegiatan ekonomi skala kecil yang melibatkan masyarakat setempat. Untuk itu perlu kiranya dibentuk pola-pola kemitraan untuk memberdayakan masyarakat lokal guna membuka peluang yang lebih luas. Pola kemitraan partisipatif yang ditawarkan oleh Prof. Eriyatno (Mangunwidjaja, 2005) menerapkan prinsip berikut :

1. Rekayasa Lembaga Ekonomi Masyarakat harus mengacu pada adat budaya setempat.
2. Kemitraan usaha didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menghidupi.
3. Transformasi Kelembagaan (kelompok informal binaan menjadi lembaga formal mandiri) dilakukan melalui proses yang wajar dan sesuai dengan tahap penataan sistem agroindustri yang diterapkan.
4. Sumber dana terpadu berasal dari berbagai sumber yang dapat menjamin efisiensi biaya serta memungkinkan diterapkannya pola bagi hasil.
5. Untuk mencapai efisiensi bisnis yang tinggi maka pelaku utama kemitraan seyogyanya mempunyai entity bisnis dalam jalur sistem bisnis yang sedang dikembangkan.

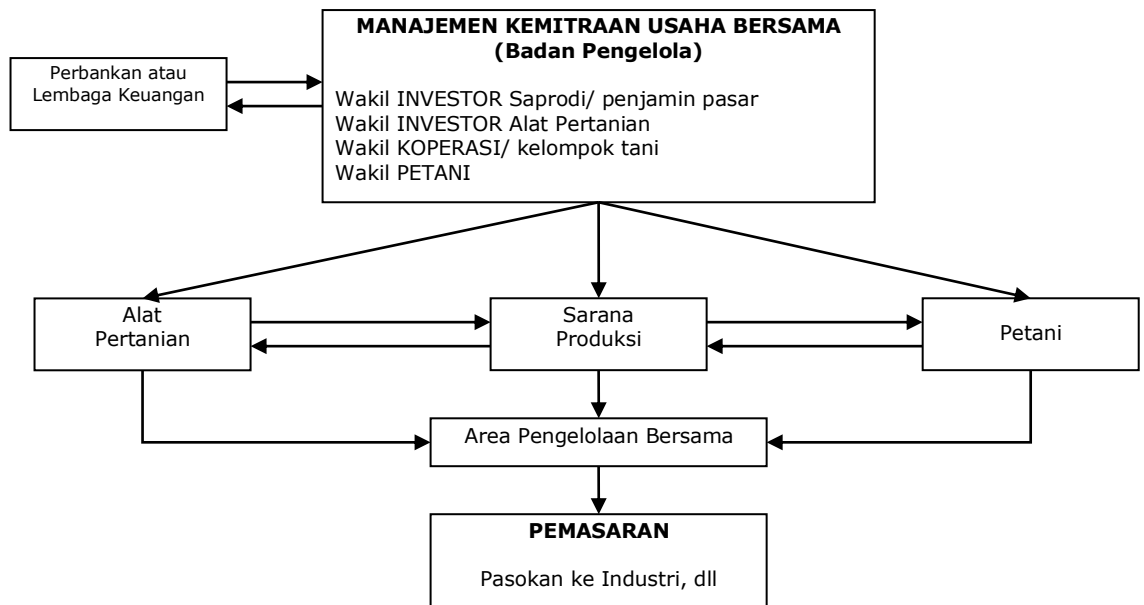
6.5.7.2 Investasi Pengembangan Agroindustri dan Kemitraan Usaha Bersama

Kemitraan Usaha Bersama merupakan salah satu upaya mendukung kebijakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan taraf hidup petani. Permasalahan yang melekat pada pengelolaan sumber-sumber permodalan seperti 5C (*character, colleteral, capacity, capital* dan *condition*), tidak memperhatikan variabel kebutuhan modal, tingkat perkembangan dan teknologi, belum adanya kesadaran untuk memprioritaskan sektor pertanian.

Pola kemitraan usaha bersama merupakan salah satu alternatif yang dapat meningkatkan produksi komoditas yang diunggulkan secara signifikan. Pendekatan dengan pola kemitraan usaha bersama dapat menjawab kebutuhan investasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisasi alat pertanian dan sarana produksi serta kebutuhan lainnya.

Upaya mewujudkan kemitraan usaha bersama yang kompak harus dilaksanakan dengan menerapkan sistem yang tepat. Kemitraan jenis ini dapat didefinisikan sebagai "Sistem Agribisnis dari hulu (*on farm*) sampai hilir (*off farm*) yang dikelola bersama antara investor alat pertanian dan mesin pertanian, investor saprodi (benih, pupuk, pestisida), perusahaan penjamin pasar, koperasi primer, dan kelompok tani dengan tujuan menjamin kontinuitas pasokan dan kualitas hasil panen yang berdaya saing.

Gambar 6.16
Manajemen Kemitraan



Mekanisme usaha bersama antara hulu dan hilir dapat diatur, dimana pihak hulu (petani produsen) dan hilir (industri pengolahan) melalui unit usaha petani bersepakat mengenai volume permintaan, mutu, cara pengiriman, pasokan dan dasar harga. Pihak hulu mempersiapkan produksi, dimana atas dasar kesepakatan dengan *trader* (pemasok) unit usaha petani mengenai pasokan produk yang diunggulkan, pihak bank menyediakan kredit kepada pemasok unit usaha petani berupa peralatan dan natura yang akan digunakan oleh petani untuk memproduksi. Sebagai jaminan berupa stok produk (yang telah diproduksi) dari industri pengolahan.

Setelah produk diterima oleh industri dan pembayaran dilakukan oleh industri, pinjaman mulai diangsur oleh pemasok unit usaha tani. Perhitungan pinjaman dari penggunaannya perlu diatur bersama antara bank pemberi pinjaman, pemasok unit usaha tani, industri pengolah produk, dan unit usaha tani.

Pelaku Kemitraan Usaha Bersama dapat dikelompokkan menjadi lima komponen, yaitu : penyedia dana (bank), kelompok (perusahaan) investor alat dan mesin pertanian, kelompok (perusahaan) investor sarana produksi, koperasi primer, kelompok tani dan kelompok usaha (perusahaan) penjamin pasar.

1. Kelompok Investor Alat Pertanian :

Kelompok ini meliputi kelompok perusahaan untuk ketersediaan alat pertanian seperti traktor tangan, peralatan pompa air, alat pemelihara tanaman, mesin pengering, mesin penggiling dan sebagainya.

2. Kelompok Investor Sarana Produksi :

Terdiri dari kelompok perusahaan dalam upaya mencukupi kebutuhan bnh, pupuk dan pestisida.

3. Koperasi Primer

Untuk mempersiapkan atau mencari lahan lokasi Kemitraan Usaha Bersama dan sekaligus tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam hal ini termasuk kelompok tani.

4. Kelompok Tani/ Petani

Merupakan pemilik lahan dan tenaga penggarap.

5. Perusahaan Penjamin Pasar

Kelompok usaha atau perusahaan yang akan membeli hasil usaha. Perusahaan ini dapat berasal dari empat kelompok diatas atau dari kelompok lainnya.



Bab 7

Indikasi Program Pembangunan

7.1 Indikasi Program Pembangunan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis sebagian besar wilayah daratannya memiliki karakteristik sebagai daerah pertanian. Daerah pertanian yang sering diidentikkan dengan kawasan perdesaan dalam beberapa faktor memiliki banyak perbedaan yang menonjol dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Diantara perbedaan yang menonjol adalah dalam hal kepadatan penduduk yang rendah dan dominasi sektor pertanian. Hingga tahun 2000, kawasan perdesaan merupakan kawasan tempat tinggal sebagian besar penduduk Indonesia.

Indikasi Program pengembangan kawasan perbatasan ini merupakan arahan program beserta pentahapannya yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sasaran pengembangan kawasan perbatasan yang telah ditetapkan dalam rencana dan struktur pemanfaatan ruang.

Oleh karena itu, indikasi program pengembangan ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu :

- a. Indikasi Program pengembangan antar wilayah, yang dimaksudkan untuk penyusunan langkah-langkah selanjutnya untuk mempercepat pengembangan kawasan cepat tumbuh (kawasan agropolitan) Kabupaten Ciamis dari sisi luar kawasan (faktor eksternal).
- b. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Lindung, yang dimaksudkan untuk pemantapan arahan pemanfaatan ruang karena hampir sebagian besar komposisi wilayah kawasan perbatasan didominasi oleh kawasan lindung.
- c. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Budidaya, dimaksudkan untuk perwujudan rencana pemanfaatan ruang kawasan perbatasan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi, yang meliputi program-program sektoral di dalamnya.

- d. Indikasi Program pengembangan struktur wilayah, yang dimaksudkan untuk mewujudkan rencana sistem perwilayahan pelayanan, terutama untuk penetapan kota-kota petumbuhan dan interaksi antar mereka dan inter kota di luarnya. Program-program ini meliputi Program Bidang Perhubungan, Permukiman perkotaan dan perdesaan, serta program infrastruktur lainnya.

Indikasi program adalah bagian yang memuat rincian tahapan dan program-program pembangunan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan berkenaan dengan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh (Kawasan Agropolitan) Kabupaten Ciamis. Pelaksanaan program pembangunan ditentukan sesuai dengan prioritasnya, mengingat adanya keterbatasan sumber dana pembangunan. Kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tingkat kepentingan/kebutuhan yang mendesak.
- b. Memperhatikan sektor-sektor yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan penduduk.
- c. Mempertimbangkan masalah yang perlu segera ditangani dan antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin timbul.
- d. Mempertimbangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat serta keterkaitan pengusaha swasta/investor untuk pengembangan suatu kegiatan tanpa bantuan atau dengan bantuan.
- e. Mempertimbangkan sektor-sektor kegiatan wilayah yang mempunyai tingkat perkembangan tinggi.
- f. Mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa besarnya kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan yang harus disediakan dalam setiap tahapan adalah proporsional dengan peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahapan pembangunan.
- b. Program yang diprioritaskan adalah yang mendukung tercapai keteraturan pengembangan ruang sebagaimana yang diharapkan.
- c. Ada beberapa unsur dalam wilayah yang perlu didahulukan pembangunannya dalam upaya untuk merangsang arah pertumbuhan wilayah ataupun memberikan pelayanan pelayanan bagi daerah yang mutlak memerlukan dalam waktu yang relatif lebih dekat (lebih mendesak).

Dengan berdasarkan tiga prinsip tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi rencana tata ruang yang telah disusun perlu dibuat suatu sistem prioritas, baik prioritas yang menyangkut lokasi maupun prioritas sektoral.



Setelah tahap penyusunan elemen-elemen pembangunan diselesaikan, maka dapat dilakukan penyusunan tahapan pelaksanaan rencana pembangunan. Pentahapan pelaksanaan merupakan penjabaran jenis kegiatan pembangunan yang harus dilakukan setiap lima tahun. Pelaksanaan pembangunan akan menjadi lebih terarah dan dapat mencapai tujuan pembangunan itu sendiri bila rencana pembangunan ditunjang oleh dasar hukum yang kuat. Hal ini antara lain dapat ditunjang oleh adanya kerjasama antara semua pihak, baik swasta/perorangan maupun instansi pemerintahan. Secara rinci tahapan rencana pembangunan yang dijabarkan dalam indikasi program dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Ciamis

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
1	Pengembangan Kawasan Budidaya	➤ Peningkatan dan Pengendalian Produksi kehutanan, yang meliputi: 1) Pencadangan lahan untuk kegiatan Hutan Tanaman Industri pada daerah-daerah kritis atau lahan kritis, 2) Pengendalian lahan terutama pada daerah-daerah yang berpotensi lindung untuk menjaga iklim mikro dan cadangan air tanah.			☐	☐	APBN, APBD Provinsi
		➤ Pembangunan kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan di Kecamatan Sukamantri, Panjalu, Panumbangan dan Cihaur beuti yang meliputi: 1) pencadangan lahan untuk kegiatan perkebunan 2) pelibatan kelembagaan masyarakat dalam pola tanam bersama (DUDI) Dunia Usaha dan Dunia Industri, 3) bantuan pengadaan benih ikan, bibit tanaman, plasma, dan peralatan penunjang secara proporsional, 4) menggalakkan kegiatan pelatihan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.	☐	☐	☐	☐	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		➤ Pembangunan Industri di Kecamatan Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu dan Sukamantri yang meliputi	☐	☐	☐	☐	APBD Provinsi, APBD Kabupaten

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		industri pakan dan pembenihan.					
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan sistem pariwisata terpadu agropolitan di seluruh kawasan agropolitan, yang meliputi : 1) menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Agropolitan, 2) membangun fasilitas penunjang, seperti akomodasi wisata, transportasi wisata, dan pusat informasi, 4) membentuk kelembagaan khusus untuk promosi dan pendampingan wisata terpadu agropolitan, bekerjasama dengan Dinas terkait. 	□	□	□	□	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
2	Pengembangan Struktur Ruang Wilayah	<p>1. Sistem Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Jalan di dalam Kawasan Agropolitan Terutama pada Ruas-Ruas Jalan yang merupakan intrance dan ekstrance terutama pada ruas Cihaurbeuti-Panumbangan, panumbangan panjalu, dan Panjalu-Sukamantri kearah Kabupaten Majalengka. ➢ Perbaiki Jalan pada jalan Kolektor sekunder yang menghubungkan antar desa di Kawasan Agropolitan. ➢ Membangun dan Meningkatkan kualitas perkerasan terutama pada jalan-jalan lingkungan yang menjadi perlintasan jalan menuju produksi menjadi jalan aspal, jalan kolektor sekunder dan kolektor primer menjadi perkerasan hotmix. ➢ Peningkatan kualitas & dimensi badan jalan ruas PKW Kadipaten-PKL Ciamis (melalui Cipaku-Kawali-Panawangan). ➢ Peningkatan kualitas & dimensi badan jalan ruas PPK 	□	□			
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Perbaiki Jalan pada jalan Kolektor sekunder yang menghubungkan antar desa di Kawasan Agropolitan. 		□	□	□	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Membangun dan Meningkatkan kualitas perkerasan terutama pada jalan-jalan lingkungan yang menjadi perlintasan jalan menuju produksi menjadi jalan aspal, jalan kolektor sekunder dan kolektor primer menjadi perkerasan hotmix. 	□	□			
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas & dimensi badan jalan ruas PKW Kadipaten-PKL Ciamis (melalui Cipaku-Kawali-Panawangan). 	□	□			APBN, APBD Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas & dimensi badan jalan ruas PPK 	□	□			APBN, APBD

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		Panawangan-PPK Jatinegara, PPK Panumbangan-PPK SUkamantri-PPK Panawangan-Perbatasan (Sindangbarang, Cimuncang), PKL Panjalu-PPK Sukamantri-Perbatasan (Jahim), PKL Panjalu-PPK Panumbangan (perbatasan kab.), dan PPK Cihaurbeuti-PPK Panumbangan)					Provinsi, APBD Kabupaten
		2. Sistem Pusat Permukiman Perkotaan dan Perdesaan					
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis sebagai pusat pertumbuhan dan kota berbasis pertanian seperti transportasi kota, penyediaan sumber air bersih, penyediaan sumber energi listrik dan jaringan telekomunikasi 		□	□		APBN, APBD Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan fasilitas pendukung kawasan agropolitan seperti rumah sakit, sekolah dan lain-lain untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di pusat wilayah pengembangan dan sub-sub pusatnya 	□	□			APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		3. Sistem Infrastruktur Wilayah Lainnya					
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan jaringan listrik secara terpadu untuk melayani perkotaan dan perdesaan dalam Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis 	□	□			APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan jaringan telekomunikasi yang menghubungkan pusat pertumbuhan. 	□	□			APBD Provinsi, APBD Kabupaten

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan jaringan dan sumber-sumber penyediaan air bagi kebutuhan kawasan baik untuk kebutuhan kegiatan permukiman di kota dan desa maupun untuk kebutuhan kegiatan produksi pertanian, perkebunan industri dan lain-lain 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Provinsi, APBD Kabupaten
3	Pengembangan Komoditas Unggulan	<p>1. Meningkatkan penyediaan dan layanan kebutuhan input sarana produksi yang terjangkau dan layak bagi masyarakat tani</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyediaan benih unggul dan lokal spesifik wilayah ➤ Penumbuhan dan penangkaran benih komoditas unggulan (kebun koleksi flasma nuftah) ➤ Pelatihan penangkaran benih komoditas unggulan bagi petani ➤ Pengembangan kerjasama kelompok tani dengan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan alsintan dan saprodi ➤ Pengembangan kios saprodi di tingkat lokal melalui peran dan fungsi kelompok tani dan koperasi tani ➤ Akselerasi penyampaian informasi dan inovasi teknologi tentang aplikasi sarana produksi ➤ Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis tentang aplikasi penggunaan saprodi melalui pelatihan penggunaan input sarana produksi bagi petani 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		<p>2. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas unggulan</p>					

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan teknis budidaya komoditas unggulan ➤ Pemanfaatan teknologi tepat guna ➤ Pola pengembangan tanaman terpadu (<i>biocyclefarming</i>) ➤ Studi banding melalui kerjasama petani antar daerah ➤ Diseminasi Standar Mutu (penerapan SNI) produk hasil pertanian bagi petani 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBN, APBD Kabupaten
		3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani dalam penanganan hasil pertanian untuk mempertahankan kualitas hasil pertanian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBN, APBD Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan tentang teknis penanganan hasil produk pertanian segar dari mulai panen sampai dipasarkan serta jaminan kualitas produk ➤ Pelatihan teknologi penyimpanan, teknologi pengeringan, dan teknologi pengemasan (<i>packaging</i>) bahan pangan ➤ Pengenalan teknik pengendalian hama dan penyakit di gudang penyimpanan ➤ Diseminasi Standar Mutu (penerapan SNI) produk hasil pertanian bagi petani ➤ Pembangunan <i>packing house</i> di setiap hamparan kebun yang dikelola oleh kelompok tani ➤ Pengadaan gudang dan alat penyimpanan hasil pertanian di tingkat kelompok tani 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		4. Meningkatkan Keterampilan Praktis usaha pengolahan berbahan baku komoditas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		unggulan (<i>off farm</i>) melalui diversifikasi produk yaitu dengan cara Pelatihan teknologi penyimpanan, teknologi pengeringan, dan teknologi pengemasan (<i>packaging</i>) bahan pangan					APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		5. Meningkatkan pemahaman mutu dan keamanan pangan dengan cara pengenalan teknik pengendalian hama dan penyakit di gudang penyimpanan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		6. Meningkatkan kapasitas sistem dukungan layanan (sarana dan prasarana) di kawasan agropolitan					
		➤ Diseminasi Standar Mutu (penerapan SNI) produk hasil pertanian bagi petani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		➤ Magang bagi para pelaku usaha ke daerah yang berhasil mengembangkan produk olahan berbahan baku komoditas yang diunggulkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		➤ Pelatihan Pengembangan Peluang Usaha produk pangan segar dan olahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		➤ Pengembangan teknik usaha diversifikasi produk olahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		➤ Peningkatan kemampuan penguasaan alat dan teknologi pasca panen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		➤ Peningkatan dan pengembangan alat produksi, panen, dan pasca panen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		➤ Peningkatan kemampuan teknologi pengeringan,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi,

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		penyimpanan, dan pengolahan hasil					APBD Kabupaten
		7. Meningkatkan penyediaan dan layanan kebutuhan input sarana produksi yang terjangkau dan layak bagi masyarakat tani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyediaan benih unggul dan lokal spesifik wilayah ➢ Penumbuhan dan penangkaran benih komoditas unggulan (kebun koleksi flasma nuftah) ➢ Pelatihan penangkaran benih komoditas unggulan bagi petani ➢ Pengembangan kerjasama kelompok tani dengan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan alsintan dan saprodi ➢ Pengembangan kios saprodi di tingkat lokal melalui peran dan fungsi kelompok tani dan koperasi tani ➢ Akselerasi penyampaian informasi dan inovasi teknologi tentang aplikasi sarana produksi ➢ Peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis tentang aplikasi penggunaan saprodi melalui pelatihan penggunaan input sarana produksi bagi petani 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Provinsi, APBD Kabupaten APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		8. Meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas unggulan					
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelatihan teknis budidaya komoditas unggulan ➢ Pemanfaatan teknologi tepat guna ➢ Pola pengembangan tanaman 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBN, APBD

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		terpadu (<i>biocyclefarming</i>) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Studi banding melalui kerjasama petani antar daerah ➤ Diseminasi Standar Mutu (penerapan SNI) produk hasil pertanian bagi petani 					Kabupaten
		9. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani dalam penanganan hasil pertanian untuk mempertahankan kualitas hasil pertanian					
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan tentang teknis penanganan hasil produk pertanian segar dari mulai panen sampai dipasarkan serta jaminan kualitas produk ➤ Pelatihan teknologi penyimpanan, teknologi pengeringan, dan teknologi pengemasan (<i>packaging</i>) bahan pangan ➤ Pengenalan teknik pengendalian hama dan penyakit di gudang penyimpanan ➤ Diseminasi Standar Mutu (penerapan SNI) produk hasil pertanian bagi petani ➤ Pembangunan <i>packing house</i> di setiap hamparan kebun yang dikelola oleh kelompok tani ➤ Pengadaan gudang dan alat penyimpanan hasil pertanian di tingkat kelompok tani 	□	□			APBD Provinsi, APBD Kabupaten
		10. Meningkatkan Keterampilan Praktis usaha pengolahan berbahan baku komoditas unggulan (<i>off farm</i>) melalui diversifikasi produk dengan cara : Pelatihan teknologi penyimpanan, teknologi pengeringan, dan teknologi pengemasan (<i>packaging</i>)	□	□	□	□	APBD Provinsi, APBD Kabupaten

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana	
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat		
		bahan pangan						
4	Pengembangan Sarana Penunjang Agribisnis	1. Pembangunan Terminal Agribisnis						
		➤ Pembebasan lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten	
		➤ Site Plan Terminal Agribisnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten	
		➤ Penyusunan AMDAL Terminal Agribisnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten	
		➤ Pembangunan Sarana Pergudangan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		APBD Kabupaten	
		➤ Pembangunan Show Room / Fasilitas Promosi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		APBD Kabupaten	
		➤ Pembangunan Balai Lelang / Sarana Transaksi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		APBD Kabupaten	
		➤ Pembangunan Sentral Informasi Pertanian		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		APBD Kabupaten	
		➤ Pembangunan Sarana Penunjang Terminal Agribisnis a. Sarana Bongkar Muat b. Perpustakaan c. Perkantoran d. TPS e. Ruang Sortasi f. Ruang Pengemasan			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		APBN, APBD Kabupaten
		2. Penyediaan Sarana Produksi						
		➤ Penyediaan Pupuk dan Obat-obatan (urea, ZA, TSP, KCl, pupuk organik, pupuk majemuk, puradan, zeolit, kapur pertanian pestisida, insektisida, dll)	<input type="checkbox"/>					APBD Kabupaten
		➤ Penyediaan Peralatan Pertanian (traktor, cangkul, parang, ajiran, garu, pembajak sawah, garpu, linggis, plastic mulsa, polybag, karung dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				APBD Kabupaten
		3. Pembangunan Balai Benih dan Bibit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				APBD Kabupaten
		4. Pengembangan dan Penelitian						
➤ Pembangunan laboratorium dasar dan bioteknologi (laboratorium tanah dan kultur jaringan)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Kabupaten		
➤ Pembangunan Rumah Kaca				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Kabupaten		
5. Pendidikan dan Pelatihan								

No	Program	Kegiatan	Tahun Pembangunan				Sumber Dana
			5 Tahun Pertama	5 Tahun Kedua	5 Tahun Ketiga	5 Tahun Keempat	
		➤ Pembangunan Balai Pelatihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten
		➤ Pembinaan dan Pendidikan Keterampilan usaha tani (keterampilan budidaya, dan mengolah hasil panen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten
		➤ Lomba Kemampuan Kelompok Tani			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Kabupaten
		6. Pengembangan Lembaga Keuangan					
		➤ Pengembangan Perbankan Agribisnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten
		➤ Pembentukan Lembaga keswadayaan Masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten
		7. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			APBD Kabupaten
5	Pengembangan Prasarana Penunjang Pertanian	Pembuatan Sistem Informasi Pertanian			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Kabupaten
		Pengadaan Hard Where Penunjang Sistem Informasi			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD Kabupaten

7.2 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten pada dasarnya berasal dari Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pada bagian ini akan dibahas mengenai sumber-sumber dana bagi pembiayaan pembangunan.

Kemampuan pembiayaan pembangunan wilayah menunjukkan besarnya pendapatan wilayah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinaan perkotaan tidak akan terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan pendapatan atau penghasilan pemerintahan kabupaten. Untuk melaksanakan pembiayaan program-program pembangunan daerah, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pembiayaan program lebih diarahkan untuk menangani kegiatan yang mempunyai implikasi langsung terhadap pengembangan wilayah.
- Pembiayaan program diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas produksi, distribusi pemasaran dan pelayanan.
- Pembiayaan program diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan dapat menumbuhkan roda perekonomian tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

- Pembiayaan pembangunan diarahkan pada penggalian potensi sumber pendapatan serta melestarikan kelestarian lingkungan.
- Pembiayaan pembangunan diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah.
- Pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemantapan kinerja aparat untuk menggali sumber pendapatan baru.

Untuk merealisasikan kegiatan penataan ruang kawasan perkotaan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut akan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pada umumnya didasarkan atas :

- Pemenuhan kebutuhan rutin pemerintah
- Usaha-usaha pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umumnya
- Pemenuhan kebutuhan jangka pendek

Secara garis besar belanja daerah ini terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Selain pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, ada juga beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan dan dibiayai oleh masyarakat (swadaya murni). Pembangunan dengan sistem swadaya murni akan sangat membantu kegiatan-kegiatan pembangunan kota disamping yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Sektor swasta dapat pula turut melaksanakan pembangunan melalui investasi bidang fisik prasarana atau perumahan. Hal ini akan sangat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memberatkan/menambah anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang akan diperkirakan hanyalah pembiayaan yang ditangani Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu yang tertuang dalam anggaran belanja daerah. Belanja daerah ini terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin biasanya memiliki pola linier, sedangkan belanja pembangunan biasanya tidak teratur polanya. Keadaan ini menyebabkan pola belanja total daerah menjadi tidak teratur pula. Pola belanja rutin lebih teratur polanya karena bagaimanapun juga belanja rutin ini harus dikeluarkan, yaitu yang meliputi belanja pegawai, barang, pemeliharaan dan sebagainya. Belanja pembangunan agak sulit diperkirakan mengingat besarnya sangat tergantung pada ketersediaan dana serta jumlah proyek yang direncanakan. Jika dana pembangunan terbatas, maka prioritas utama adalah belanja rutin, sedangkan belanja pembangunan menjadi prioritas kedua. Apabila anggaran dirasakan terlalu besar secara keseluruhan, maka prioritas pelaksanaan sebaiknya dibatasi pada pembangunan jalan yang diusulkan sebagai prioritas pertama saja.

Sumber-sumber dana yang diperkirakan dapat dijadikan modal pembangunan berasal dari sektor pajak, retribusi daerah dan penerimaan dari sumber dana lain

dan menurut undang-undang menjadi hak pemerintah daerah untuk memungutnya. Dengan demikian maka pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintah di daerah ini diupayakan dari sumber-sumber di daerah itu sendiri melalui pembayaran kewajiban masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Dalam upaya menggali sumber-sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan, maka perlu dilakukan :

- Peningkatan Penadapatan Asli Daerah (PAD) melalui iuran dan retribusi Daerah
- Peningkatan dan pemanfaatan usaha-usaha swasta yang memiliki kekuatan pembiayaan yang potensial bagi pembangunan
- Melakukan usaha-usaha pembangunan dengan pinjaman jangka panjang dan menengah untuk usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Meningkatkan partisipasi masyarakat secara swadaya agar mampu memelihara hasil-hasil pembangunan sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dari pemerintah.

Disamping itu untuk dapat mengembangkan wilayah sebagaimana yang direncanakan dan mengatasi keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan upaya/usaha pelibatan swasta yang kondisi pelibatangannya akan menguntungkan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam jangka panjang. Pelibatan swasta yang demikian, dapat dilakukan dengan melaksanakan pola-pola kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta. Keterlibatan Pemerintah Daerah dapat secara langsung maupun melalui suatu badan usaha daerah yang dibentuk untuk keperluan tersebut. Pola-pola kerjasama dapat diterapkan pada lokasi-lokasi pengembangan yang memiliki nilai ekonomis dan dalam perhitungan usaha akan memenuhi skala ekonomis yang menguntungkan sehingga swasta akan bersedia melakukan kerjasama.

